BUPATI SUMENEP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMENEP

TAHUN 2022

KEPADA :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

SUMENEP, TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, sesuai batas waktu yang ditentukan.

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 19 menyebutkan :

(1) Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
(3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Laporan Keterangan Pertangungjawaban Bupati Tahun 2022 adalah gambaran hasil penyelenggaraan urusan pembangunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Efektivitas pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah dapat diukur berdasar capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) Pemda, indikator Program Pemda, dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan yang mejadi kewenagan daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) selalu menjadi komitmen Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Sumenep dalam memandang bahwa setiap proses pembangunan harus dapat dilihat dari tingkat keberhasilannya, obyektif, dan sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah serta berbagai prestasi yang telah dicapai pada tahun 2022 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Aparat Keamanan, termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan. Catatan strategis hasil rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sumenep terhadap LKPJ merupakan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKPj ini kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar selalu ikhlas dan amanah dalam menjalankan tugas pembangunan di Kabupaten Sumenep. Amiiin…

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sumenep, Maret 2023

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, SH, MH

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

1.1 Dasar Hukum I-1

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah..... I-2

1.2.1 Visi I-2

1.2.2 Misi..... I-4

1.2.3 Tujuan dan Sasaran..... I-7

1.3 Data Umum Daerah I-9

1.3.1 Data Geografis Wilayah I-9

1.3.2 Jumlah Penduduk..... I-13

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk I-15

1.3.4 Jumlah ASN..... I-16

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan..... I-19

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-20

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-21

1.3.8 Realisasi Belanja masing-masing SKPD I-22

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEP II-1

2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah II-2

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... II-3

2.1.2 Pendapatan Transfer II-3

2.1.3 Lain- lain Pendapatan daerah Yang Sah II-4

2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah II-6

2.2.1 Belanja Operasi II-7

2.2.2 Belanja Modal II-7

2.2.3 Belanja Tidak Terduga..... II-8

2.2.4 Belanja Transfer II-8

2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah..... II-10

2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah II-10

2.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah II-11

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....III-1

3.1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah..... III-2

3.1.1 Indeks Pembangunaan Manusia (IPM)..... III-3

3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) III-4

3.1.3 Persentase Penduduk Miskin III-5

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)..... III-6

3.1.5 Indeks Gini III-7

3.1.6 Indeks Reformasi Birokrasi III-8
3.1.7 Indeks Kesalehan Sosial..... III-9
3.1.8 Indeks Infrastruktur III-10
3.2 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... III-11
3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan..... III-254
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya III-261
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN IV-1
4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan..... IV-2
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat diatasnya IV-4
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya..... IV-6
4.2 Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian IV-36
BAB V PENUTUP.....V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep I-10
Tabel 1.2 Topografi Kabupaten Sumenep..... I-11
Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep I-14
Tabel 1.4 Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2022 ..... I-16
Tabel 1.5 Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin..... I-17
Tabel 1.6 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Usia I-17
Tabel 1.7 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan I-18
Tabel 1.8 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan I-18
Tabel 1.9 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Eselon..... I-18
Tabel 1.10 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 ..... I-19
Tabel 1.11 Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja..... I-21
Tabel 1.12 Tabel Realisasi Pembiayaan I-22
Tabel 1.13 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 ..... I-23
Tabel 2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2022..... II-4
Tabel 2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2022..... II-9

Tabel 2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah
Tahun 2022..... II-11
Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah III-2
Tabel 3.2 Indeks Pembanguanan Manusia III-4
Tabel 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep III-5
Tabel 3.4 Persentase Penduduk Miskin III-5
Tabel 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka III-6
Tabel 3.6 Indeks Gini III-7
Tabel 3.7 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep III-8
Tabel 3.8 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep..... III-9
Tabel 3.9 Indeks Infrastruktur Kabupaten Sumenep III-11
Tabel 3.10 Kebijakan Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun
2022 ..... III-254
Tabel 3.11 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran
2021 ..... III-262
Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan
Program urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2022..... IV-5
Tabel 4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan
Program Urusan Pertanian Tahun 2022 ..... IV-6
Tabel 4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana
Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2022 ..... IV-8
Tabel 4.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Sumenep Tahun 2022 ..... IV-22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam negara kesatuan Republik Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura sekitar 153 km kearah timur Surabaya yang terdiri dari 27 kecamatan, 330 desa dan 4 kelurahan dan Kabupaten Sumenep memiliki pulau yang cukup banyak yaitu 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni dengan Luas wilayah laut kurang lebih 50.000 km2 sedangkan luas daratan (wilayah daratan dan kepulauan) sebesar 2.093,458 km dengan ketinggian wilayah daratan antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut sehingga dapat ditanami beranekaragam tanaman pangan dan perkebunan potensial.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja terhadap kewenangan yang diberikan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyampaikan Laporan keterangan pertanggungjawaban hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan serta penugasan, meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya peyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai kewajiban, “menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LEPPD).

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Capaian keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sumenep yang sudah dilaksanakan selama ini, harus terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan, sebagai modal dasar untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama dengan DPRD telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, untuk mendorong perkembangan usaha masyarakat yang makin mandiri, kesejahteraan rakyat, dan mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan dengan didukung berbagai fasilitas layanan publik yang sesuai dengan standart pelayanan minimal (SPM), serta kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Visi adalah rumusan general berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;

c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Berangkat dari tinjauan filosofis, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep, serta memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini masyarakat Sumenep, maka penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah

" "Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera"

Visi Kabupaten Sumenep dimaksud memiliki 3 makna penting yang perlu dipahami bersama yaitu : Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera.

1. UNGGUL

Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan, dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan ekonomi masyarkat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan unggul dalam penataan infrastruktur.

2. MANDIRI

Memiliki makna optimalisasi potensi diri sehingga mampu meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikin juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

3. SEJAHTERA

Memiliki arti semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih mandiri merefleksikan sikap dan komitmen untuk mencetak masyarakat yang lebih unggul, mandiri dan sejahtera, maka dirumuskan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut:

1.2.2. Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang strategis dan berpengaruh, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di Kabbupaten Sumenep. Rumusan misi tersebut diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai upaya untuk menjabarkan setiap misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memaknai target pencapaian daerah sebagai berikut :

1. **Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.** Pada misi Pertama berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang

terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat pendidikan maksimal dan jaminan mutu pendidikan. Komitmen peningkatan mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk memajukan pembangunan khsususnya di Kabupaten Sumenep, yang terdiri dari daratan dan kepulauan. Peningkatan pendidikan dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik, kesejahteraan guru honorer, gutu ngaji dan guru madrasah diniyah serta support bantuan sarana dan prasarana serta stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah umum maupun diniyah.

Kesehatan sebagai salah satu hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang saat ini terus dibangun dan ditingkatkan. Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pandangan diatas bisa terwujud bila diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik, sumber daya manusia yang handal serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sisi yang lain ikhtiar peningkatan status akreditasi BLUD puskesmas dan membangun Rumah Sakit Tipe D di tiap eks pembantu bupati. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep tergolong rendah di jawa timur, namun kesejahteraan masih tergolong rendah. Oleh karena itu kualitas Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus dalam meningkatkan daya saing SDM.

2. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir.** Misi ini dalam rangka memperkuat kemjauan ekonomi masyarakat lokal dengan menggerakan sektor unggulan daerah (desa/kecamatan); yaitu sektor pertanian pangan, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti peningkatan/pembangunan irigasi atau sumber mata air dengan kelengkapan peralatan yang didukung sarana produksi, bibit unggul,

pupuk berimbang serta alat produksi modern yang ramah lingkungan. Sektor pertanian ini dapat ditingkatkan lagi dengan mencobakan komoditas unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan efisiensi produksi yang dikerjakan dengan pola budidaya terpadu serta pengembangan sistem budidaya produksi dari hulu-hilir yang terkendali dalam tata organisasi yang terpadu dan terkendali dengan baik untuk mencapai nilai tambah yang optimal, meningkatnya swasembada beras, swasembada pangan menuju ketahanan pangan; Bidang peternakan, usaha untuk menguatkan populasi ternak yang ada di Sumenep yang kian hari semakin sedikit. Oleh sebab itu penting dilakukan terobosan yang efektif dengan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan stakeholders melalui system peternakan yang modern yaitu insemenasi bibit ternak. Demikian pula sector kelautan dan perikanan, melalui konsep budaya bahari dengan melibatkan masyarakat secara holistic dan pengembangan yang terintegrasi dengan pusat pelelangan ikan, cold storage dari hulu ke hilir. Sumenep banyak potensi pariwisata yang harus dimaksimalkan sehingga berdampak pada penguatan sektor ekonomi masyarakat. Konsepnya adalah pemerintah daerah bersama masyarakat serta melibatkan swasta dalam pengembangan pariwisata di Sumenep tanpa mencerabut nilai-nilai local wisdom. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke Sumenep.

3. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat.** Proses pembangunan wajib didukung oleh semangat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan peningkatan implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi

birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sisi laiinya adalah keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik, dan peningkatan implementasi open government secara terpadu pada seluruh instansi pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.

4. **Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal.** Masalah sosial senantiasa hadir di berbagai negara, dengan kompleksitas masalah sosial seperti masalah pengangguran dan kemiskinan, kenakalan remaja dan seks bebas, kekurangan gizi dan penyakit menular. Dengan memperhatikan keberagaman masyarakat, dilihat dari latar belakang sosial ekonomi, budaya, dan geografi, pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa membedakan latar belakang mereka. Pengentasan maslah sosial tidak semata-mata menjadi kewajiban negara (pemerintah daerah), namun semangat gotong royong yang merupakan watak, karakter dan kepribadian masyarakat kita yang harus diperkuat.

5. **Memperkuat Pembangunan Infrastuktur Berbasis Lingkungan Hidup yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan.** Pembangunan Infrastruktur diprioritaskan untuk wilayah kepulauan, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas dengan pembangunan di wilayah daratan. Oleh sebab itu, penting dilakukan percepatan pembangunan jalan-jalan strategis, irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian dan perdagangan hasil bumi serta sarana telekomunikasi dan listrik 24 jam.

1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam

mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2021-2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 1 adalah :
   - Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Tujuan dari misi 2 adalah :
   - Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat;
3. Tujuan dari misi 3 adalah :
   - Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif;
4. Tujuan dari misi 4 adalah :
   - Mewujudkan Harmonisasi Sosial Yang Berkearifan Lokal;
5. Tujuan dari misi 5 adalah :
   - Meningkatkan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan;

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Misi 1 adalah :
   a. Meningkatnya Kualiltas dan Aksesbelitas Layanan Dasar Pendidikan;
   b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
   c. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan partisipasi Perempuan Terhadap pembangunan Daerah;
2. Sasaran Misi 2 adalah :

a. Menurunkan Kesenjangan;
b. Meningkatnya Pendapatan Perkapita;
c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
d. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;

3. Sasaran Misi 3 adalah :
   a. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-goverment;
   b. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
   c. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabiel Dan Transparan;
4. Sasaran Misi 4 adalah :
   a. Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Masyarakat;
   b. Meningkatnya Solidaritas Sosial Di Masyarakat;
   c. Terwujudnya nilai-nilai Gotong Royong dan Toleransi dalam kehidupan Masyarakat;
5. Sasaran Misi 5 adalah :
   a. Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Yang Merata;
   b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

1. Letak Wilayah

   Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara 113^0 32’ 54” – 116^0 16’ 48” Bujur Timur dan 4^0 55’ – 70 24’ Lintang Selatan dengan dengan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah :

   - Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

2. Luas Wilayah

   Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,458 km, yang terbagi menjadi 27

wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan, 1,563 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan;

- Wilayah Daratan dengan luas 1.146,93 Km^2 (54,79%) terdiri dari 18 Kecamatan.
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,54 Km^2 (45,21%) terdiri dari 9 Kecamatan.

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuh lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Adminsitrasi Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km2)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	12/4	43	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km2)
		Desa/Kel.	Dusun	
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batu Putih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	61	201,89
JUMLAH		**334**	**1.563**	**2.093,47**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masysrakat dan Desa Kabupaten Sumenep Tahun 2022

3. Topografi

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong **dataran rendah** dengan **sedikit berbukit** di bagian tengah, mempunyai ketinggian tempat **sedang** dan kemiringan tanah *landai*, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)	%
A.	**Ketinggian Tempat**			
	1. Rendah	0 – 25 m dpl	65.951	33
	2. Sedang	25 – 100 m dpl	79.942	40
	3. Tinggi	> 100 m dpl	53.961	27
B.	**Ketinggian Tempat**			
	1. Datar	0^o – 2^o	51.962	26
	2. Landai	2^o – 15^o	125.908	63
	3. Miring	> 15^o	21.984	11

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022

4. Geologi

   Jenis tanah di Kabupaten Sumenep di dominasi oleh komplek Mediteran Merah, Litosol dan Grumosol, merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan lihat pada horizon bawah, bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (lebih dari 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat menembang dan mengerut (sifat *vertik)*: yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak; utamanya dengan perlakuan pemupukan.

5. Klimatologi

   Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Curah hujan misalnya paling tinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 420,7 mm. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga cuhan hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2022 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Januari, juga terjadi pada bulan Februari, yaitu 397,5 mm. Pada bulan September curah hujan menurun menjadi 3,1 mm. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami kenaikan kembali sampai bulan Desember.

   Gejala alam yang sulit diprediksi mengakibatkan pada musim kemarau masih terjadi turun hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan April -Oktober, sebab dalam kurun waktu tersebut turun hujan tidak terjadi. Menurut catatan tahun 2022, rata-rata turun hujan sejumlah 192 hari. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari. Rata-rata jumlah hari hujan paling tinggi terjadi pada

Januari dan November. Pada bulan Januari rata-rata hujan sebanyak 24 sementara pada bulan November sebanyak 25 jumlah hari hujan.

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan April, Juni, Juli, Agustus dan September memancarkan sinarnya. Sebaliknya sinar matahari agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan Desember. Bulan Desember matahari hanya memancarkan sinarnya sebesar 57,5%, sementara itu pada bulan Februari sebesar 45,8%.

Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi pada bulan April, Juni, Juli, Agustus dan September, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada suhu udara paling tinggi terjadi pada bulan September, yaitu mencapai 32,8 derajat celcius. Sementara itu pada bulan Mei suhu udara menunjukkan titik terendah dibandingkan dengan bulan lainnya yakni sebesar 28,6 derajat celcius.

Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu pada bulan Januari, Juli dan Agustus. Pada bulan Agustus kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 6,2 m/sec sedangkan bulan Juli kecepatan angin mencapai 5,5 m/sec. Sementara pada bulan Maret, April, Oktober dan November dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2022 (DKB Semester I Tahun 2022) sebanyak 1.135.441 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 547.626 jiwa (48,23%) dan perempuan 587.815 jiwa (51,77%) dengan sex ratio sebesar 93,12%. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 yang sebanyak 1.133.224 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 546.826 jiwa (48,25%) dan perempuan 586.398 jiwa

(51,75%) dengan sex ratio sebesar 93,25 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Tabel 1.3

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Kota Sumenep	Pamolokan	75.367	25.473	27,84	2707,15
2	Kalianget	Kalianget Timur	42.640	15.497	30,19	1412,39
3	Manding	Manding Laok	30.196	9.952	68,88	438,39
4	Talango	Talango	38.955	14.290	50,27	774,92
5	Bluto	Bunbungan	48.819	16.299	51,25	952,57
6	Saronggi	Tanamerah	38.317	13.839	67,71	565,9
7	Lenteng	Ellak Laok	62.013	20.596	71,41	868,41
8	Giligenting	Aenganyar	24.318	8.705	30,32	802,04
9	Guluk-guluk	Guluk-guluk	49.966	15.618	59,57	838,78
10	Ganding	Ketawang Larangan	36.677	11.734	53,97	679,58
11	Pragaan	Pragaan Laok	66.902	22.281	57,84	1156,67
12	Ambunten	Ambunten Timur	40.812	14.812	50,54	807,52
13	Pasongsongan	Panaongan	51.625	16.238	119,03	433,71
14	Dasuk	Kerta Timur	30.891	10.720	64,5	478,93
15	Rubaru	Rubaru	40.179	12.383	84,46	475,72
16	Batang-batang	Batang-batang Daya	55.402	19.782	80,36	689,42
17	Batuputih	Batuputih Laok	44.649	15.830	112,31	397,55
18	Dungkek	Dungkek	36.272	14.190	63,35	572,57
19	Gapura	Gapura Barat	38.387	13.542	65,78	583,57
20	Gayam	Pancor	31.809	13.346	88,4	359,83
21	Nonggunong	Sokarame Paseser	13.458	5.663	40,08	335,78
22	Raas	Brakas	31.886	11.849	38,9	819,69
23	Masalembu	Sukajeruk	26.194	9.410	40,85	641,22
24	Arjasa	Kalikatak	85.483	31.928	241,99	353,25
25	Sapeken	Sapeken	54.397	17.588	201,89	269,44
26	Batuan	Batuan	13.427	4.636	27,1	495,46

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
27	Kangayan	Kangayan	26.862	10.594	204,68	131,24
TAHUN 2022			**1.135.903**	**396.795**	**2.093,47**	**542,59**
TAHUN 2021			**1.134.810**	**388.876**	**2.093,47**	**542,00**
TAHUN 2020			**1.138.168**	**383.973**	**2.093,47**	**544,00**
TAHUN 2019			**1.126.724**	**360.701**	**2.093,47**	**539,89**
TAHUN 2018			**1.123.310**		**2.093,47**	**538,21**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

Pada tabel diatas, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tahun 2022 adalah Kecamatan Arjasa sebanyak 85.483 jiwa atau sekitar 7,53% dari total jumlah penduduk, sedangkan Kecamatan Batuan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 13.427 jiwa atau 1,18 % dari total jumlah penduduk. Dengan luas wilayah ± 2.093,47 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 adalah 542 jiwa/km².

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sedangkan dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Berikut tabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2018-2022 di Kabupaten Sumenep berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Tabel 1.4

Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2022

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk :						
- B P S	jiwa	1.085.227	1.088.910	1.124.436	1.133.224	1.136.632
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.130.260	1.134.129	1.138.168	1.134.810	1.135.903
Pertumbuhan penduduk:						
- B P S	%	0,372	0,339	3,26	0,78	0,60
- Dispenduk & Capil	%	0,31	0,31	0,36	0,29	0,10
Kepadatan penduduk :						
- BPS	jiwa/km2	518,39	520,15	537,11	537,11	542,94
- Dispenduk & Capil	jiwa/km2	540	542	544	542	542

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,26 % pada Tahun 2021 sebesar 0,78 % sedangkan pada tahun 2022 menurun sebesar 0,60 %.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,30 %, tahun 2018 sebesar 0,31 %, tahun 2019 sebesar 0,31 %, tahun 2020 sebesar 0,36 % dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,29 %.

1.3.4. Jumlah ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS dan PPPK juga memiliki hak sebagai aparatur sipil negara. PPPK sebagaimana dimaksud, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK dan PNS diberikan kesempatan untuk pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.

Berdasrkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan PPPK, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah", dan ayat (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sumenep berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Golongan, jenjang Pendidikan dan eselon sejak tahun 2018 s/d 2022 dapat diuraikan pada table berikut ini :

Tabel 1.5
Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021	2022
Laki – Laki	6.049	5.876	5.746	5.477	5.967
Wanita	3.092	3.123	3.191	3.269	3.645
Total	**9.141**	**8.999**	**8.937**	**8.746**	**9342**

Tabel 1.6
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Usia

Usia	2018	2019	2020	2021	2022
Usia >55	1.438	1.505	1.662	1.524	1.372
Usia 45-55	4.099	3.864	3.631	3.747	3.802
Usia 36-45	2.685	2.652	2.637	2.696	3.232
Usia 25-35	918	937	949	755	922
Usia <25	1	41	58	24	14
Total	**9.141**	**8.999**	**8.937**	**8.746**	**9.342**

Tabel 1.7
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan

Golongan	2018	2019	2020	2021	2022
Golongan I	165	142	135	110	104
Golongan II	2.230	1.980	1.836	1.671	1.590
Golongan III	4.113	4.405	4.659	4.672	5.607
Golongan IV	2.633	2.472	2.307	2.293	2.014
Total	**9.141**	**8.999**	**8.937**	**8.746**	**9.342**

Tabel 1.8
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
S-3	1	2	2	4	5
S-2	527	497	476	488	561
S-1	4.553	4768	4.947	5.272	6.082
D-III	966	1025	1.050	1.027	1.017
D-II	505	440	352	187	134
D-I	30	21	25	14	12
SLTA	2.285	2022	1887	1.590	1.367
SLTP	121	102	91	108	105
SD	153	122	107	56	59
Total	**9.141**	**8.999**	**8.937**	**8.746**	**9.342**

Tabel 1.9
Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Eselon

Eselon	2018	2019	2020	2021	2022
Eselon II	33	32	28	27	30
Eselon III	203	202	194	170	162
Eselon IV	659	683	669	604	277
Eselon V	-	-		-	-
Fungsional	5.597	5.579	5.387	4.288	4.861
Staf PNS	2.649	2.503	2.659	3.657	4.012
Total	**9.141**	**8.999**	**8.937**	**8.746**	**9.342**

Sumber: BKPSDM Kab. Sumenep 2022

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.378.950.349.088,00. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang didalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.10
Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

KODE	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.378.950.349.088,00**	**2.406.175.815.646,98**	**101,14**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**235.181.883.591,00**	**247.070.353.452,98**	**105,06**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	34.849.350.000,00	47.205.426.759,25	135,46
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9.212.595.440,00	9.528.945.161,00	103,43
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.915.000.000,00	16.021.468.294,00	100,67
4.1.04	Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	174.204.938.151,00	174.314.513.237,94	99,49
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.024.217.855.497,00**	**2.063.804.424.921,00**	**101,96**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.925.357.101.738,00	1.911.485.007.140,00	99,28
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.860.753.759,00	152.319.417.781,00	154,07
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**119.550.610.000,00**	**95.301.037.273,00**	**79,72**
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.050.150.000.00	26.285.564.250,00	10,90
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.500.460.000,00	69.015.473.023,00	73,81

Sumber : BPPKAD 2022 (unaudited)

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik dari tahun ke tahun. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang,

sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.11

Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

KODE	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2.752.723.076.208,00**	**2.364.612.040.997,17**	**99,74**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.951.156.214.049,00**	**1.620.843.224.700,58**	**83,07**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.155.113.188.781,00	949.022.282.688,00	82,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	635.372.497.521,00	530.110.205.372,07	83,43
5.1.05	Belanja Hibah	144.108.157.747,00	133.092.888.635,89	92,36
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.562.370.000,00	8.617.848.004,62	52,03
5.2	**BELANJA MODAL**	**243.651.232.729,00**	**197.059.168.131,59**	**80,88**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.267.792.640,00	2.011.296.640,00	88,69
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.529.463.726,00	57.821.544.587,70	76,55
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.994.304.499,00	57.853.492.088,87	94,85
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.713.309.382,00	74.424.676.997,02	81,15
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.146.362.482,00	4.948.157.818,00	37,64
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**22.250.000.000,00**	**12.437.756.558,00**	**50,90**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.250.000.000,00	12.437.756.558,00	55,90
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**535.665.629.430,00**	**534.271.891.607,00**	**100**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000,00	3.553.313.000,00	98,76
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	532.067.629.430,00	530.718.578.607,00	99,75

Sumber : BPPKAD 2022 (unaudited)

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
b. Transfer dari Dana Cadangan
c. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
d. Penerimaaan dana dari transfer deposito

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

a. Transfer ke Dana Cadangan
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan merupakan informasi mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

TABEL 1.12

Tabel Realisasi Pembiayaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	**Pembiayaan**	**373.772.727.120,00**	**375.069.287.120,72**	**100,34**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**399.997.727.120,00**	**400.069.287.119,72**	**100,02**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	399.997.727.120,00	399.997.727.119,72	100
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	71.560.000,00	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**26.225.000.000,00**	**25.000.000.000,00**	**95,33**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.225.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : BPPKAD 2022 (unaudited)

1.3.8. Realisasi Belanja masing-masing SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan.

Sebagai dasar pertanggungjawaban atas kewenangan yang mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan, SKPD diminta untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai wujud pertanggungjawaban kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setiap tahunnnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13

Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI	%
1	1	1	DINAS PENDIDIKAN	867.274.407.112,00	680.864.999.736,47	78,51
1	2	1	DINAS KESEHATAN	340.765.955.924,00	279.934.850.434,67	82,15
1	2	2	RSUD. H.MOH ANWAR	176.848.609.798,00	124.984.956.200,60	70,67
1	3	1	DINAS PU BINA MARGA	136.818.158.760,00	116.324.473.908,98	85,02
1	3	3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	60.662.697.930,00	52.131.888.967,11	85,94
1	5	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.623.741.528,00	11.703.272.147,20	92,71
1	5	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.905.917.958,00	4.569.860.640,00	93,15
1	6	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	39.115.017.244,00	35.903.674.343,00	91,79
2	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	31.921.786.407,00	29.150.833.941,00	91,32
2	3	1	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	90.108.217.974,00	85.455.754.199,31	94,84
2	5	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.021.447.592,00	19.274.503.896,00	96,84
2	6	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.673.801.875,00	10.490.540.576,00	89,86
2	7	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.669.174.371,00	13.831.260.238,23	94,29
2	10	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.692.244.495,00	15.991.376.266,00	95,80
2	11	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,	27.910.420.344,00	25.901.226.040,78	92,20

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI	%
			PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2	13	1	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	19.533.801.778,00	19.042.888.829,81	97,49
2	17	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.467.574.236,00	4.649.078.781,00	85,03
3	1	1	DINAS PERIKANAN	12.021.600.404,00	11.381.514.924,00	94,68
4	1	3	SEKRETARIAT DAERAH	51.309.565.647,00	66.494.558.620,00	95,46
4	1	4	SEKRETARIAT DPRD	70.073.086.706,00	58.278.159.670,76	94,89
4	1	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.750.294.844,00	11.374.652.563,00	89,21
4	1	6	KECAMATAN KOTA SUMENEP	8.824.346.072,00	8.427.923.546,00	95,51
4	1	7	KECAMATAN KALIANGET	2.555.616.050,00	2.379.022.396,00	93,09
4	1	8	KECAMATAN TALANGO	2.168.204.870,00	2.069.932.098,00	95,47
4	1	9	KECAMATAN MANDING	3.044.717.961,00	2.887.814.331,00	94,85
4	1	10	KECAMATAN BLUTO	2.866.782.111,00	2.641.913.407,00	92,16
4	1	11	KECAMATAN SARONGGI	2.946.370.930,00	2.784.199.029,00	94,50
4	1	12	KECAMATAN LENTENG	2.216.035.568,00	2.078.018.558,00	93,77
4	1	13	KECAMATAN GILIGENTENG	1.999.776.394,00	1.876.983.371,00	93,86
4	1	14	KECAMATAN GULUK_GULUK	2.106.630.794,00	1.979.841.326,00	93,98
4	1	15	KECAMATAN GANDING	2.397.122.972,00	2.258.443.727,00	94,21
4	1	16	KECAMATAN PRAGAAN	2.560.545.558,00	2.431.668.654,00	94,97
4	1	17	KECAMATAN RUBARU	2.272.608.160,00	2.116.597.770,00	93,14
4	1	18	KECAMATAN AMBUNTEN	2.598.416.671,00	2.480.943.465,00	95,48
4	1	19	KECAMATAN PASONGSONGAN	2.188.955.209,00	2.080.426.319,00	95,04
4	1	20	KECAMATAN DASUK	2.168.606.024,00	2.043.691.146,00	94,24
4	1	21	KECAMATAN BATANG_BATANG	2.905.441.000,00	2.772.989.799,00	95,44
4	1	22	KECAMATAN BATUPUTIH	2.607.658.455,00	2.416.308.454,00	92,66
4	1	23	KECAMATAN GAPURA	2.723.211.105,00	2.574.638.436,00	94,54
4	1	24	KECAMATAN DUNGKEK	2.468.580.709,00	2.319.420.542,00	93,96
4	1	25	KECAMATAN GAYAM	2.790.822.358,00	2.472.588.013,00	88,60
4	1	26	KECAMATAN NONGGUNONG	2.399.266.614,00	2.210.806.162,00	92,15
4	1	27	KECAMATAN RAAS	1.838.038.544,00	1.646.114.752,00	89,56
4	1	28	KECAMATAN MASALEMBU	1.799.344.626,00	1.591.276.223,00	88,44
4	1	29	KECAMATAN ARJASA	3.011.965.878,00	2.886.742.436,00	95,84
4	1	30	KECAMATAN SAPEKEN	2.344.491.732,00	2.216.838.756,00	94,56
4	1	31	KECAMATAN BATUAN	2.591.251.928,00	2.471.188.466,00	95,37
4	1	32	KECAMATAN KANGAYAN	2.138.655.477,00	1.793.033.668,00	83,84
4	2	1	INSPEKTORAT DAERAH	15.222.386.320,00	14.007.791.979,96	92,02

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI	%
4	3	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.636.191.528,00	10.102.344.674,82	94,98
4	4	1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	625.031.251.804,00	597.820.048.566,00	95,65
4	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.737.630.958,00	10.022.307.428,00	93,34
TOTAL BELANJA DAERAH				2.752.723.076.208,00	2.364.612.040.997,17	85,90

Sumber : BPPKAD 2022 (unaudited)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai pendanaan program pembangunan yang bertujuan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dipedomani dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Semenetara (PPAS) dengan memperhatikan asumsi makro maupun acuan lain sebagai pedoman penyusunan APBD. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah, 2) Belanja Daerah, dan 3) Pembiayaan Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daaerah dapat melalukan perubahan APBD, apabila memenuhi ketentuan Pasal 161 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. keadaan darurat; dan/atau 5. keadaan luar biasa.

Seiring dengan perkembang dinamika penyelenggaraan pemerintahan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 melalui pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar

kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja. Hal tersebut diantaranya untuk mengakomodir hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun 2022, DBH DR TA. 2022, DBH CHT TA. 2022 Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
2. Penyesuaian terhadap Surat Gubernur Jawa Timur nomor 412.2/207/112.3/2022 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
3. Penyesuaian terhadap Surat Gubernur Jawa Timur nomor 045.2/2279/102.1/2022 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2022;
4. Penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
5. Penyesuaian terhadap Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/747.25/101.1/2022 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
6. Program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2022.

2.1. Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain : Meningkatkan tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara *online system* dan pembayaran dilakukan secara non tunai; Melakukan ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah melalui updating data serta perluasan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah; Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai regulasi terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan layanan, penyerderhanaan proses serta mendukung iklim investasi dan berusaha di Kabupaten Sumenep.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, kemampuan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 234.235.972.230,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 235.181.883.591,00 bertambah sebesar Rp. 945.911.361,00 atau naik 0,40 persen.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah. Target Pendapatan Transfer Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran

2022 sebelum perubahan sebesar 1.995.445.057.131,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.024.217.855.497 bertambah sebesar Rp. 28.772.798.366,00 atau naik 1,44 persen.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari ; (i) Pendapatan Hibah; dan (ii) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp. 119.550.610.000 dan tidak mengalami perubahan.

Perubahan pendapatan daerah tahun 2022 disusun dengan menyesuaikan terhadap regulasi pusat maupun provinsi, diantaranya terkait Bantuan Keuangan Provinsi serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu terdapat penyesuaian pada sisi Pendapatan Asli Daerah. Secara umum pendapatan pada Perubahan APBD Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.1

Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2022

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2022 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2022 Rp.	SELISIH Rp.
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.349.231.639.361,0**	**2.378.950.349.088**	**29.718.709.727**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**234.235.972.230,0**	**235.181.883.591**	**945.911.361**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	34.066.297.000,0	34.849.350.000	783.053.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9.318.618.840,0	9.212.595.440	(106.023.400)
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.245.000.000,0	15.915.000.000	670.000.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	175.606.056.390,0	175.204.938.151	(401.118.239)

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2022 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2022 Rp.	SELISIH Rp.
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.995.445.057.131,0**	**2.024.217.855.497**	**28.772.798.366**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.911.342.341.372,0	1.925.357.101.738	14.014.760.366
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.102.715.759,0	98.860.753.759	14.758.038.000
4.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**119.550.610.000**	**119.550.610.000**	**0**
4.3.01	Pendapatan Hibah	26.050.150.000	26.050.150.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	93.500.460.000	93.500.460.000	0

Sumber : BPPKAD 2022 (unaudited)

Secara umum target pendapatan daerah pada tahun 2022 dalam APBD perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 29.718.709.727,00, jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar, Rp 945.911.361,-, yang disebabkan oleh kenaikan target pendapatan dari pajak dan Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan retribusi daerah dan Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penurunan.

Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp 28.772.798.366,- dari target sebelumnya yang disebabkan adanya peningkatan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan transfer antar daerah.

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi awal pada APBD tahun 2022.

2.2. Perubahan Penjabaran Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yaitu : 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, serta 3) Urusan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional. Secara umum APBD Kabupaten Sumenep diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik.

Pada APBD tahun 2022 Pemerintah Daerah telah menetapkan target capaian kinerja yang harus tercapai pada akhir tahun anggaran, baik dari sisi program, kegiatan hingga sub kegiatan yang terbagi atas urusan dan SKPD pengampu masing-masing urusan.

Arah Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2022, diantaranya adalah sebagi berikut :

1. Penyesuaian terhadap nomenklatur kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK fisik dan non fisik) dan DBHC HT;
2. Penganggaran belanja yang berasala dari Bantuan Keuangan Provinsi dan silpa DBH CHT;
3. Penganggaran terhadap hutan pihak III dan retensi;
4. Penganggaran Kembali silpa DAK fisik dan non fisik tahun 2021;
5. Penganggaran belanja dana khusus lainnya seperti Sisa Tunjangan Sertifikasi, Sisa Tunjangan non sertifikasi, Sisa Tunjangan khusus guru, Sisa Pajak Rokok, Sisa BLUD RSUD, Sisa BOS;
6. Penganggaran belanja prioritas daerah.

Pada perubahan APBD tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan rasionalisasi dan realokasi anggaran belanja pada semua SKPD. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kembali proyeksi silpa tahun

2021 serta *refocusing* anggaran yang diarahkan untuk pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2022.

2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dianggarkan pada semua OPD yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa (iii) Belanja Subsidi, (iv) Belanja Hibah, (v) Belanja Bantuan Sosial, (vi). Belanja Operasi Tahun 2022 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.841.590.474.996,00, dan setelah perubahan menjadi Rp. 1.951.156.214.049 bertambah sebesar Rp. 109.565.739.053 atau naik 5,95 persen.

Adapun Belanja Operasi, pada perubahan APBD tahun 2022 yang mengalami kenaikan/penurunan terdiri dari :

- Belanja Pegawai mengalami penyesuaian sebesar Rp. 6.031.080.671,00
- belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp. 93.770.151.304,00
- belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.985.904.078,00
- belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp. 221.397.000,00

2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Anggaran Belanja Modal Tahun 2022 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 222.834.436.396,00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 243.651.232.729,00, bertambah sebesar Rp. 20.816.796.333,00 atau naik 9,34 persen.

Perubahan Belanja Modal pada pelaksanaan APBD tahun 2022 terdiri dari :

- Belanja modal tanah mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.967.792.640,00
- Belanja modal peralatan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.208.628.804,00
- Belanja modal Gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp. 3.710.915.112,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.627.444.243,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp. 126.154.242,00.

2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan sebagai pengeluaran atas beban APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 sebelum perubahan ditetakan sebesar Rp. 60.000.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 22.250.000.000 berkurang sebesar Rp. 37.750.000.000,00 atau mengalami penurunan 62,92 persen.

2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja Transfer Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp. 519.822.094.430 dan setelah perubahan menjadi Rp. 535.665.629.430,00 bertambah sebesar Rp. 15.843.535.000,00 atau naik 3,05 persen.

Secara umum belanja pada Perubahan APBD Kabupaten Sumenep tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.2

Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2022

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2022 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2022 Rp.	SELISIH Rp.
5	**BELANJA DAERAH**	**2.644.247.005.822**	**2.752.723.076.208**	**108.626.070.386**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.841.590.474.996**	**1.951.156.214.049**	**109.565.739.053**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.149.082.108.110	1.155.113.188.781	6.031.080.671
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	541.602.346.217	635.372.497.521	93.770.151.304
5.1.05	Belanja Hibah	134.122.253.669	144.108.157.747	9.985.904.078
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.783.767.000	16.562.370.000	(221.397.000)
5.2	**BELANJA MODAL**	**222.834.436.396**	**243.651.232.729**	**20.816.796.333**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	300.000.000	2.267.792.640	1.967.792.640
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.320.834.922	75.529.463.726	13.208.628.804
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.705.219.611	60.994.304.499	(3.710.915.112)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.085.865.139	91.713.309.382	9.627.444.243
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.272.516.724	13.146.362.482	(126.154.242)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**60.000.000.000**	**22.250.000.000**	**(37.750.000.000)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	60.000.000.000	22.250.000.000	(37.750.000.000)

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2022 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2022 Rp.	SELISIH Rp.
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**519.822.094.430**	**535.665.629.430**	**15.843.535.000**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000	3.598.000.000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	516.224.094.430	532.067.629.430	15.843.535.000

Sumber : BPPKAD 2022 (unaudited)

2.3. Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiyaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada Penyesuaian penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021, untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 terdiri dari Pelampauan Penerimaan PAD, Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer, Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Penghematan Belanja. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 320.015.366.461,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 399.997.727.120,00 bertambah sebesar Rp. 79.982.360.659,00 atau naik 24,99 persen.

2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 26.225.000.000,00, penambahan sebesar Rp. 1.225.000.000,00 untuk Pemberian Pinjaman daerah.

Perubahan penjabaran pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 2.3

Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2022 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2022 Rp.	SELISIH Rp.
6	**Pembiayaan**	**295.015.366.461**	**373.772.727.120**	**78.757.360.659**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**320.015.366.461**	**399.997.727.120**	**79.982.360.659**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	320.015.366.461	399.997.727.120	79.982.360.659
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**25.000.000.000,0**	**26.225.000.000**	**1.225.000.000**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman daerah	0	1.225.000.000	1.225.000.000

Sumber : BPPKAD 2022 (unaudited)

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 78.757.360.659, pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, yang terdiri atas Silpa kegiatan tahun 2021, DBHCHT, DAK, Pajak Rokok, BLUD, BOS, BK Provinsi, Hutang pihak ketiga, hutang retensi, serta sisa gaji P3K.

Sedangkan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2022 mengalami penambahan sebesar RP 1.225.000.000,- yang dialokasikan untuk program Upland.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sejalan dengan azas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni; Urusan Pemerintahan Absolut; Urusan Pemerintahan Konkuren; dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren atau Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah agar dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan sesuai kewenangan daerah pada tahun anggaran 2022 dapat digambarkan dalam capaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, kinerja utama perangkat daerah, serta hasil capaian kinerja program dan kegiatan pada seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan dalam mewujudkan Visi dan Misi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan 2) mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah berhasil dicapai atau belum, dan bahan evaluasi untuk menentukan langkah yang tepat dalam mempertahankan atau memperbaiki kinerja instansi pemerintah pada tahun mendatang.

Tabel. 3.1, Capaian Indikator Utama Pemerintah Daerah

NO	Indikator Makro Pembangunan	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	66,93	67,04	67,70	67,87
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,50	2,61	3,60	3,11
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	19,50	20,51	18,70	18,76
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,84	2,31	2,78	1,36
5	Indeks Gini (Poin)	0,235	0,294	0,225	0,266

NO	Indikator Makro Pembangunan	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
6	Indeks Reformasi Birokrasi	61,50	62,30	61,90	62,45
7	Indeks Kesalehan Sosial	80,46	80,46	80,96	82,30
8	Indeks Infrastruktur	72,00	68,23	73,00	72,01

***) Catatan :** Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 merupakan angka C to C Triwulan III-2022 (Januari s/d September 2022 dibandingkan Januari s/d September 2021)

Dari tabel di atas terlihat capaian Indikator Makro Pembangunan Derah Kabupaten Sumenep tahun 2022 jika dibandingkan dengan target tahun 2022 dari 8 (delapan) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini dan indeks infrastruktur, sedangkan 5 (lima) indikator lainya sudah melampaui target yang sudah ditetapkan. Uraian pencapaian dari masing-masing indikator kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Sumenep, seperti tersebut di bawah ini.

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk melihat kualitas penduduk yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya dengan mudah. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent standard of living*). Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan

direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan standar hidup layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel. 3.2, Indeks Pembangunan Manusia

No	Pemerintah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
2	Kabupaten Sumenep	65,25	66,22	66,43	67,04	67,87

Dari tabel di atas diperoleh data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2022 sebesar 67,87 dengan Komponen terdiri atas Angka Harapan Hidup sebesar 71,97; Ratarata Harapan Lama Sekolah sebesar 5,93; Rata-rata Harapan Lama Sekolah sebesar 13,51, dengan Pengeluaran Perkapita sebesar 9.388.000,00. IPM Kabupaten Sumenep meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 67,04 atau naik sebesar 0,83 poin.

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kabupaten Sumenep terus mengalami pertumbuhan positif pasca Pandemi Covid-19, yang sebelumnya mengalami kontraksi atau tumbuh negatif akibat dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dari hasil publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep selama 5 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Selama masa pandemi, perekonomian Kabupaten Sumenep cenderung mengalami penurunan, di tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,80% mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sebesar 5,86%. Penurunan drastis kembali terjadi pada tahun 2020 menjadi -1,13 %. Dan kemudian Pada Tahun 2021 menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep berangsur kembali pulih dengan nilai pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 sebesar 2,61% dan tahun tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,11%.

Tabel. 3.3, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep

No	Pemerintah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Provinsi Jawa Timur	5,50	5,52	-3,75	3,23	5,58
2.	Kabupaten Sumenep	5,38	3,80	-1,13	2,61	3,11

Dari table diatas perkembangan ekonomi pasca pandemic Covid-19 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep dalam dua tahun terakhir trennya tumbuh positif, hal ini tidak terlepas dukungan program pemulihan ekonomi nasinal yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun daerah.

3.1.3. Persentase Peduduk Miskin

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi hal serius yang perlu segera ditangani. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melihat perekembangan data penduduk miskin di daerah setiap tahunnya. Pendataan tersebut terus dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk miskin yang berada diambang kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), namun turunnya penduduk miskin tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Oleh sebab itu perlu memperhatikan pergerakan P1 dan P2 setiap waktu dan juga melakukan analisis apakah penurunan tingkat kemiskinan tersebut dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan penduduk miskin di daerah. Perkembangan presentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berkiut :

Tabel. 3.4, Persentase Penduduk Miskin

No	Pemerintah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Provinsi Jawa Timur	10,98	10,20	11,09	10,59	10,49
2.	Kabupaten Sumenep	20,16	19,48	20,18	20,51	18,76

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumenep menunjukkan cukup fluktuatif selama periode 2018-2022, pada tahun 2022 mengalami trend

yang cenderung menurun sebesar 1,75 persen menjadi 18,76 persen jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 20,51 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 mencapai 206.200 jiwa, berkurang sebesar 18.530 jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 224.730 jiwa. Kalua dilihat dari persentase dan jumlah penduduku miskin tingkat kemiskinan Kabupaten Sumenep masih cukup tinggi ini tentunya menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam program pengentasan kemiskinan.

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah sebuah kondisi dimana Angkatan kerja tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase antara ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka juga dipicu adanya penurunan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan kompetensi pencari kerja. Tingkat Pengengangguran Terbuka Kabupaten Sumenep, adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5, Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Pemerintah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi Jawa Timur	3,99	3,92	5,84	5,74	5,49
2	Kabupaten Sumenep	1,79	2,17	2,84	2,31	1,36

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 mencapai 1, 36 persen turun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,31 persen. Jumlah Angkatan Kerja pada Agustus 2022 sebanyak 674.374 orang, angka tersebut berkurang 1.197 orang dibandingkan Agustus 2021. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 75,12 persen atau turun 0,51 persen jika dibandingkan tahun yang lalu. Angaka TPAK ini terjadi karena banyak peralihan Angkatan kerja

perempuan menjadi bukan Angkatan kerja, penurunan Angkatan kerja masih didominasi lulusan SMA, angkanya mencapai 55,12 persen, lulusan SD 18,91 persen dan lulusan Perguruan Tinggi 14,91 persen, rendahnya TPT Kabupaten Sumenep tidak lepas dari intervensi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

3.1.5. Indeks Gini

Pengukuran yang biasa digunakan untuk menghitung derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah, salah satunya adalah Indeks Gini atau Rasio Gini (Gini Ratio). Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Angka Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Angka Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang lainnya tidak memiliki. Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 yang menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel. 3.6, Indeks Gini

No	Pemerintah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi Jawa Timur	0,379	0,370	0,366	0,374	0,371
2	Kabupaten Sumenep	0,247	0,305	0,256	0,294	0,266

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Gini Kabupatan Sumenep Tahun 2022 sebesar 0,266 poin turun menjadi 0,028 poin dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 0,294 poin, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh masyarakat Kabupaten Sumenep cukup merata.

3.1.6. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal. Reformasi birokrasi merupakan instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat yang dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyongsong tantangan dimasa yang akan datang, Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta menyesuaikan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Tabel. 3.7. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep

No.	Komponen Penilaian	Nilai	
		2021	2022
1.	Komponen Pengungkit	29,40	32,78
2.	Komponen Hasil	32,90	29,67
Indeks Reformasi Birokrasi		**62,30**	**62,45**

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 adalah **62,45** dengan katagori "**B**" meningkat 0,15 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 62,30, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berupaya untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya komponen pengungkit.

3.1.7. Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial adalah bentuk perilaku keagamaan seseorang yang lahir dari sikap keagamaan, sementara sikap keagamaan lahir dari pemahaman seseorang atas nilai-nilai yang difahami (*kognitif*), dirasakan (*afektif*), dan dilakukan (*konatif*). *Aspek Kognitif*, yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. *Aspek Afektif*, yaitu berwujud proses yang menyangkut perasaanperasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. *Aspek Konatif*, yaitu berwujud proses tendensi/kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

Penghitungan Indeks Kesalehan Sosial dilakukan berdasarkan 3 (tiga) dimensi kesalehan sosial yaitu: (1) Nilai stabilitas sosial (ketentraman sosial, dan penanganan konflik), (2) Nilai Solidaritas Sosial (pemberdayaan sosial, kepedulian, dan interaksi sosial), (3) Nilai Gotong royong, (kontribusi dan toleransi). Dari hasil survey dan perhitungan indeks kesalehan sosial Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 dapat dijabrkan pada table berikut :

Tabel. 3.8. Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep

No.	Aspek Nilai Indeks Kesalehan Sosial	Skor Indeks	
		2021	2022
1.	Nilai Stabilitas Sosial	83,60	84,12
2.	Nilai Solidaritas Sosial	70,13	75,97
3.	Nilai Gotong royong	86,27	86,81
Skor Total		**80,46**	**82,30**

Berdasarkan table diatas Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2022 secara total sebesar 82,30, hal ini menunjukkan bahwa indeks kesalehan sosial mengalami peningkatan jika dibandingakan tahun 2021 yang mencapai 80,46 atau meningkat 1,84 poin. Peningkatan tersebut didukung oleh 3 aspek yaitu Nilai Stabilitas Sosial adalah 84,12, Nilai

solidaritas sosial sebesar 75,97 dan aspek nilai Gotong Royong memiliki nilai skor indeks sebesar 86,81. Meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Sumenep sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu modal penting pembangunan di Kabupaten Sumenep.

3.1.8. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pengalokasian anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah pengampu urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang digunakan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pelayanan infrastruktur terhadap peningkatan aktivitas perekonomian, ketimpangan wilayah serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, digunakan tiga strategi pendekatan, yaitu membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) sebagai nahkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah, serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Tabel. 3.9. Indeks Infrastruktur Kabupaten Sumenep.

No.	Aspek Pengukuran Indeks Infrastruktur	Nilai	
		2021	2022
1.	Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan	76,30%	76,79%
2.	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	47,92%	48,63%
3.	Indeks Infrastruktur Air Limbah	43,31%	43,68%
4.	Indeks Infrastruktur Air Minum	4,20%	4,25%
5.	Indeks Infrastruktur Bangunan Gedung	69,95%	71,50%
6.	Indeks Kualitas Pembinaan Jasa Konstruksi	28,00%	52,93%
7.	Indeks Infrastruktur Drainase	67,90%	68,35%
8.	Rasio Dokumen Tata Ruang yang selesai dan yang disusun	22,53%	22,86%
Indeks Infrastruktur		**68,23%**	**72,01%**

Dari hasil perhitungan Indeks infrastruktur sebagaimana tabel tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Infrastruktur Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 mencapai 72,01 persen dan mengalamai peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 68,23%. Pemerintah Kabupaten Sumenep akan terus berupaya meningkatkan nilai indeks infrastruktur setiap tahunnya, karena semakin baik nilai indeks infrastruktur menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan akses bagi masyarakat.

3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian setiap tahunnya, dengan menetapkan beberapa variable sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tersebut, sehingga capaian dari masing-masing tahapan dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian target kinerja yang ditetapkan oleh SKPD.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menjadi dasar dalam penyusunan pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah yang dibagi dalam : 1) Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 2) Pelaksanaan Urususan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Pelaksanaan Urusan Pilihan dan 4) Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan gambaran pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 yang dipilah berdasarkan bidang urusan pemerintah diantaranya : urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Capaian Program Dan Kegiatan Kabupaten Sumenep Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**DINAS PENDIDIKAN**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**91,63 %**	**68,73 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah**	**32 Dokumen**	**23 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	16 dokumen	16 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	16 laporan	16 laporan		-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**27 Laporan**	**21 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**jumlah laporan administrasi barang milik daerah**	**12 Laporan**	**8 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang di penuhi**	**6 Item**	**4 Item**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	3 jenis	3 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	225 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	23 jenis 1100 paket		indikator tidak sama. seharusnya : "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" dengan satuan "Paket"	Mungkin bisa di sesuaikan oleh operator Bappeda	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	6 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	23 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	350 kali	280 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**6 Unit**	**3 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 unit	5 unit	-	-	-
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**2062 Layanan**	**1547 Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	2050 kali	2050 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**89 Unit**	**66 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	4 unit	4 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	80 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	5 unit	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase Lembaga yang berakreditasi A**	**10,20 %**	**7,08 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**APK SD/MI/PAKET A** **APM SD/MI/PAKET A** **Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS** **Persentase Angka Putus Sekolah SD** **Rasio siswa dengan guru** **Rasio siswa dengan rombel**	**103,65 %** **92,70 %** **106 %** **0,38 %** **10:1 Rasio** **15:1 Rasio**	**77,73 %** **69,54 %** **79,5 %** **0,3 %** **10:1 Rasio** **10:1 Rasio** **10:1 Rasio** **15:1 Rasio** **15:1 Rasio**	-	-	-
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	-	-	-
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	6 Ruang	-	-	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	31 Unit	15 Unit	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	55 Unit	55 Unit	-	-	-
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	579 Satuan Pendidikan	579 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	27 Peserta Didik	27 Peserta Didik	-	-	-
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5570 Orang	5570 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	65 Orang	65 Orang	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	579 Satuan Pendidikan	579 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	650 Satuan Pendidikan	556 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	650 Orang	650 Orang	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**APK SMP/MTS/PAKET B** **APM SMP/MTS/PAKET B** **Persentase Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA** **Persentase Angka Putus Sekolah SMP** **Rasio siwa dengan guru** **Rasio siswa dengan rombel**	**105 %** **76,40 %** **94,34 %** **0,38 %** **10:1 Rasio** **23:1 Rasio**	**78,72 %** **57,24 %** **70,74 %** **0,27 %** **10:1 Rasio** **10:1 Rasio** **10:1 Rasio** **23:1 Rasio** **23:1 Rasio** **23:1 Rasio**	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Unit	40 Unit	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	25 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	3 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	2 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	3 Ruang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	4 Ruang	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	46 Paket	-	-	-
				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	45 Peserta Didik	45 Peserta Didik	-	-	-
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1086 Orang	1086 Orang	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	260 Orang	260 Orang	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	201 Satuan Pendidikan	183 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	201 Orang	201 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase Angka partisipasi kasar PAUD Formal** **Persentase Rasio ketersediaan lembaga terhadap anak PAUD usia 5-6 tahun**	**71,90 %** **18,10 %**	**35,45 %** **17 %**	-	-	-
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	20 Unit	-	-	-
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	0 Paket	-	-	-
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	27,042 Peserta Didik	27042 Peserta Didik	-	-	-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	991 Satuan Pendidikan	991 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2468 Orang	2468 Orang	-	-	-
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55 Orang	55 Orang	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	991 Satuan Pendidikan	495 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas** **Jumlah Lembaga PNF berizin**	**845,560 Orang** **72 Lembaga**	**634,2 Orang** **44 Lembaga**	-	-	-
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	13 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6801 Peserta Didik	6801 Peserta Didik	-	-	-
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	-	-	-
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	540 Satuan Pendidikan	170 Satuan Pendidikan	-	-	-
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Ketersediaan PTK di semua jenjang pendidikan secara merata di Kab. Sumenep**	**98,10 %**	**73,59 %**	**-**	**-**	**-**
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase Ketersediaan PTK di Semua Jenjang Pendidikan secara merata di kab. Sumenep** **Persentase pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan peningkatkan kompetensi**	**98,10 %** **40 %**	**73,59 %** **0 %**	**-**	**-**	**-**
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	**Persentase lembaga pendidikan yang memiliki ijin Pendidikan**	**90,15 %**	**67,5 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Persentase lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memenuhi ijin operasional Jenjang SMP** **Persentase lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memenuhi ijin operasional Jenjang PAUD dan PNF (PAUD, PKBM)** **Persentase desa dengan kapasitas PAUD memadai** **Jumlah kecamatan yang memiliki akses pada pendidikan kesetaraan**	**85 %** **85 %** **92 %** **27 Kecamatan**	**70 %** **70 %** **69 %** **81 Kecamatan**	-	-	-
				Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**95 %**	**97 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**10 laporan**	**10 laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD H. MOH. ANWAR)	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	6 laporan	6 laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**7 jenis**	**7 jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	4 jenis	4 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 unit	4 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	27 jenis 4512 paket	27 jenis 4512 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	6 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	24 kali	24 kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah layanan jasa yang disediakan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 rekening	4 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**47 unit**	**47 unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	4 unit	4 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	50 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	-	-	-
				Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD**	**31 faskes**	**31 faskes**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD (30 puskesmas dan 1 RSUD)**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD (30 puskesmas dan 1 RSUD)**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan BLUD (30 puskesmas dan 1 RSUD)**
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batuan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pragaan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Bluto)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kalianget)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Talango)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pandian)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Rubaru)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Legung)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dasuk)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Manding)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Moncek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Lenteng)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batang-Batang)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Saronggi)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pamolokan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Dungkek)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ambunten)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Pasongsongan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Batu Putih)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gapura)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Guluk-Guluk)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Ganding)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Raas)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Giligenting)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Nonggunong)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Gayam)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Arjasa)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Kangayan)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Sapeken)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Masalembu)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 %	100 %	-	-	-
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD H. MOH. ANWAR)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terlaksananya operasional Puskesmas BLUD Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79 % 87 %	174,24 % 176,92 %	-	-	-
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)**	**65 Orang**	**81 Orang**	-	-	-
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tersedianya sarana dan prasaranan di fasilitas kesehatan sesuai standar**	**60 %**	**77 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	-	-	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD H. MOH. ANWAR)	BOR (Bed Occupancy Ratio) Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas yang diadakan Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79 % 1 Paket 1 Paket	55,3 %	-	-	-
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupancy Ratio) Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas yang diadakan Terpenuhinya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Paket	2 Paket	-	-	-
				Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat essensial	81 %	100 %	-	-	-
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan Bahan Habis Pakai Persentase ketersediaan Reagen	95 % 95 %	100 % 100 %	-	-	-
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	12 Paket	-	-	-
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna**	**10 %**	**9,9 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	100 %	93,94 %	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan	100 %	98,66 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase Cakupan Kunjungan Bayi	100 %	98,42 %	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase Pelayanan Balita	100 %	80,03 %	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	96,9 %	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %	85,62 %	Capaian kinerja bukan nilai akumulatif namun hasil akhir pada Triwulan 4	Capaian kinerja pada triwulan 4	Capaian kinerja pada triwulan 4
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	83,48 %	Capaian kinerja bkan hasil akumulatif namun hasil akhir pada Triwulan 4	Capaian kinerja pada triwulan 4	Capaian kinerja pada triwulan 4
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	97,51 %	Capaian kinerja bkan hasil akumulatif namun hasil akhir pada Triwulan 4	Capaian kinerja pada Triwulan 4	Capaian kinerja pada triwulan 4
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	100 %	100 %	Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	91 %	90,5 %	Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4	Capaian kinerja pada triwulan 4	Capaian kinerja pada triwulan 4
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100 Dokumen	100 Dokumen	Dokumen pencatatan penduduk pada kondisi KLB yang pasti diberi pelayanan kesehatan	Semua penduduk pada kondisi KLB pasti diberi pelayaan kesehatan	Semua penduduk pada kondisi KLB pasti diberi pelayaan kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Presentase Balita gizi buruk mendapat Perawatan	100 %	100 %	Setiap ada kasus Gizi buruk, maka akan segera diberikan perawatan, sehingga capaian 100% dalam tiap triwulan	Formulariumnya, Jumlah balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan dibagi jumlah balita yang ditemukan mengalami gizi buruk (semua)	Formulariumnya, Jumlah balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan dibagi jumlah balita yang ditemukan mengalami gizi buruk (semua)
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	51 %	50 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa ODF (Stop BAB Sembarangan)	73,35 %	80,53 %	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Kegiatan dengan kemitraan Promkes	100 %	100 %	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase sarana obat tradisional yang di bina	100 %	90 %	-	-	-
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	100 %	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase terlaksananya deteksi dini Kesehatan Jiwa Persentase terlaksananya penanganan pelayanan NAPZA	100 % 100 %	100 % 100 %	-	-	-
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penanganan Kusta Persentase penanganan penderita diare Persentase penderita malaria mendapatkan tatalaksana sesuai standar Persentase penemuan dan penanganan DBD Persentase penemuan dan penanganan Filariasis	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	-	-	-
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kepersertaan PBID JKN-BPJS Persentase Penduduk miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan	130000 Orang 100 %	152594 Orang 100 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Fasilitasi Penilaian kabupaten sehat oleh Forum Kabupaten Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase terselenggaranya pelayanan rumah sakit yang bermutu	100 %	0 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	30 Puskesmas	30 Puskesmas	Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase terselenggaranya pelayanan labkesda yang bermutu	100 %	100 %	-	-	-
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase puskesmas yang siap akreditasi	27 %	27 %	-	-	-
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase imunasasi dasar lengkap Persentase pelaksanaan BIAS (Bukan Imunisasi Anak Sekolah)	95 % 100 %	103,52 % 103,69 %	Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4	capaian kinerja pada tahun 4	capaian kinerja pada tahun 4
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase CJH yang dilakukan pemeriksaan, Pemantauan,Pemeliharaan dan Pembinaan status kesehatan	100 %	100 %	Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 3	capaian kinerja pada triwulan 3	capaian kinerja pada triwulan 3
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Persentase puskesmas yang melakukan pelaporan SIK**	**75 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Tahunan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan Pelaporan SPODS Aktif (Sistem Pelaporan Online Dinkes Sumenep)	30 Puskesmas	30 Puskesmas	Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah Sakit terakreditasi paripurna**	**4 RS**	**4 RS**	**Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4**	**capaian kinerja pada triwulan 4**	**capaian kinerja pada triwulan 4**
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase kasus rujukan yang ditangani	100 %	100 %	Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4	capaian kinerja pada triwulan 4
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Rasio Tenaga Kesehatan**	**1:690 rasio**	**0 rasio**	**-**	**-**	**-**
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**75 %**	**100 %**	**Capaian kinerja bukan hasil akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4**	**capaian pada triwulan 4**	**capaian pada triwulan 4**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Izin Praktik Tenaga kesehatan	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Presentase pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen Renbut tenaga kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase terpenuhinya 9 tenaga fungsional nakes di setiap wilayah pelayanan kesehatan sesuai standart	77 %	60 %	-	-	-
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diadakan Persentase peningkatan kompetensi SDM Kesehatan	5 Kegiatan 10 %	5 Kegiatan 10 %	-	-	-
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman yang diawasi**	**75 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan**	**10 rekomendasi**	**10 rekomendasi**	**-**	**-**	**-**
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah tangga ber P-IRT yang diawasi	25 Tempat	25 Tempat	-	-	-
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Jumlah Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan**	**10 Rekom**	**10 Rekom**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang dilakukan Pengawasan	10 TPM	10 TPM	-	-	-
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan Stiker Lisensi Laik Higiene**	**30 %**	**30 %**	-	-	-
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pengawasan terhadap Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Desa Siaga PURI**	**4,36 %**	**21,5 %**	-	-	-
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelenggaraan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor**	**4 keg**	**4 keg**	-	-	-
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kader Aktif	100 %	100 %	-	-	-
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Desa dengan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)**	**20 %**	**44 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga dengan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)	20 %	44 %	-	-	-
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**104,53 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	1 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**118,05 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	21 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	18 laporan	18 laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan kebutuhan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi	1 laporan	26,96 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi**	**100 Jenis**	**82 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17 unit	17 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	28 jenis	28 jenis	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 paket	10 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	11 jenis	11 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	299 kali	299 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	12 m'	12 m'	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	1200 kali	1200 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 rekening	4 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	10 unit	10 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah alat besar yang dikelola	22 unit	22 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	5 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	60 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2255 unit	8 unit	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air**	**50,09 %**	**50,09 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Optimalisasi Penyediaan Air Baku dan mengurangi Dampak Negatif Daya Rusak Air**	**50,09 %**	**50,09 %**	**-**	**-**	**-**
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentse Pembanguanan Bangunan Perkuatan Tebing	6,68 %	6,68 %	-	-	-
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase bangunan pengaman pantai yang dibangun	87,78 %	87,78 %	-	-	-
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai dan saluran pembuang utama yang di normalisasi/dipelihara	5,5 m	11,27 m	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	27,08 m	27,08 m	-	-	-
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**	**50,09 %**	**50,09 %**	**-**	**-**	**-**
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Presentase Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	100 %	100 %	-	-	-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentasre jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	61 %	61,3 %	-	-	-
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	PersentasePanjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi	58,08 %	26,01 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara	60,78 %	91,19 %	-	-	-
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	PersentaseJumlah bendung irigasi yang dipelihara	61,25 %	61,25 %	-	-	-
				Operasional Unit Pengelola Irigasi	Presentase Operasional Unit Pengelola Irigasi	57,9 %	57,9 %	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM**	**5,52 %**	**5,52 %**	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM**	**5,52 %**	**5,52 %**	-	-	-
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Terlayani	14539 Unit	455,101 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase jumlah sampah yang tertampung**	**33,12 %**	**33,12 %**	-	-	-
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Jumlah Sampah yang Tertampung (ton/hari)**	**33,12 %**	**22,51 %**	-	-	-
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	volume sampah yang tertampung (ton/hari)	40 ton/hari	40 ton/hari	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**persentase rumah tangga yang terlayani system air limbah domestik**	**71,59 %**	**71,59 %**	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tinggal Memiliki Sistem Air Limbah Domestik**	**71,59 %**	**42,31 %**	-	-	-
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah rumah tinggal memiliki sistem Air Limbah domestik	194898 Unit	78777,237 Unit	-	-	-
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana	194898 Unit	194,398 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**91 %**	**91,87 %**	-	-	-
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik**	**91 %**	**91,87 %**	-	-	-
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase dibangun (m')	1300 m	210,109 m	-	-	-
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rasio Gedung Negara Berkondisi Baik**	**91,83 %**	**91,83 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase Bangunan Gedung Berizin**	**91,83 %**	**91,83 %**	-	-	-
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Negara kondisi baik	1158 Gedung	3 Gedung	-	-	-
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Gedung Negara kondisi baik	1158 Unit	4 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase kawasan khusus yang tertata**	**100 %**	**0 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kawasan Khusus yang Tertata**	**100 %**	**0 %**	-	-	-
				Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten/Kota** **Persentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan Kabupaten/Kota**	**65,99 %** **88,52 %**	**48,73 %** **88,52 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Jalan dan Jembatan Baik yang Ditangani**	**65,99 %**	**65,99 %**	-	-	-
				Pembangunan Jalan	Jalan yang ditingkatkan	28212,42 m	10357,293 m	-	-	-
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan dengan tingkat kerusakan sedang yang dipelihara	3517,75 m	187,084 m	-	-	-
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan dengan tingkat kerusakan ringan yang dipelihara	4499,85 m	4499,85 m	-	-	-
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan dengan tingkat kerusakan ringan yang dipelihara	19,6 m	19,6 m	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang**	**28,57 %**	**28,57 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang**	**28,57 %**	**28,57 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar di kab/kota yang ditangani**	**65 %**	**65 %**	-	-	-
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah luas lahan yang dilakukan Peningkatan Kualitas pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	1,5 Ha	1,5 Ha	-	-	-
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	1,5 Ha	1,5 Ha	-	-	-
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Persentase Rumah Layak Huni**	**81,31 %**	**80 %**	-	-	-
				Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki untuk Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	180 Rumah	174 Rumah	-	-	-
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	180 Rumah	174 Rumah	Masa kontrak Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) kegiatan Perbaikan RTLH selama 8 bulan. Rencana pelaksanaan kontrak TFL dimulai bulan Mei sampai Desember tahun 2022, selain itu banyak pengajuan perubahan daftar calon penerima bantuan oleh anggota DPRD Kab. Sumenep.	Pelaksanaan verifikasi lapangan calon penerima bantuan oleh TFL kegiatan RTLH. Usulan perubahan daftar calon penerima bantuan dapat diusulkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) TA. 2022.	Nihil
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Peningkatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**15,44**	**15**			
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah luasan lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan**	81109,166	81109			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	1			
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1	1			
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**90 %**	**90 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	4 laporan	5 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**8 Jenis**	**8 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	12 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	16 jenis 2 paket	16 jenis 2 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	3 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	3 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa yang disediakan**	**2 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**95 unit**	**44 unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	18 unit	18 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	20 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**90 %**	**90 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**17 dokumen**	**17 dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 kali	10 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan**	**8 jenis**	**8 jenis**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	144 laporan	144 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 jenis**	**1 jenis**	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 orang	2 orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**24 jenis**	**24 jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	156 unit	156 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	72 jenis 36 paket	72 jenis 36 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	6 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	36 jenis	36 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 kali	100 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**6 unit**	**1 unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	6 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**2 jenis**	**2 jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	1000 kali	1000 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	48 rekening	48 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**38 unit**	**38 unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	20 unit	20 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	15 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	-	-	-
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas**	**90 %**	**90 %**	**-**	**-**	**-**
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**7 Kegiatan**	**7 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan patroli Insidentil yang dilaksanakan Jumlah Pengamanan Unjuk Rasa yang dilaksanakan Jumlah pengawalan yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman ,Ketertiban Umum	160 Kali 48 Kali 60 Kali 70 Orang	160 Kali 36 Kali 60 Kali 70 Orang	-	-	-
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pembinaan satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Jumlah penyuluhan terhadap Linmas Desa yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman ,Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	100 Orang 48 Kali 32 Orang	0 Orang 19 Kali 32 Orang	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah pelatihan Satpol polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Penegakan Perda yang ditegakkan**	**90 %**	**90 %**	**-**	**-**	**-**
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman ,Ketertiban Umum	2 Kali 13 Orang	2 Kali 13 Orang	-	-	-
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan yang dilakukan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati	48 Kali	0 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penertiban Media Luar Ruang yang dilaksanakan Jumlah Penertiban PKL yang dilaksanakan Jumlah Penyidikan dan Penyelidikan yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Ketentraman ,Ketertiban Umum	48 Kali 48 Kali 48 Kali 20 Orang	48 Kali 47 Kali 23 Kali 20 Orang	-	-	-
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Indeks Risiko Bencana Kabupaten**	**185 indeks**	**155,93 indeks**	-	-	-
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilaksanakan**	**1 jenis**	**1 jenis**	-	-	-
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah daerah rawan bencana yang diberi informasi dan edukasi	10 Lokasi	14 Lokasi	-	-	-
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan**	**5 jenis**	**5 jenis**	-	-	-
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Pusdalops	192 Orang	192 Orang	-	-	-
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah risiko bencana yang dikelola	128 Bencana	176 Bencana	-	-	-
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Destana yang dibentuk	7 Desa	7 Desa	-	-	-
				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pascabencana yang ditangani	156 Lokasi	143 Lokasi	-	-	-
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TRC Kabupaten	360 Orang	360 Orang	-	-	-
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan**	**2 jenis**	**1 jenis**	-	-	-
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Penanggulangan Kebakaran**	**90 %**	**90 %**	-	-	-
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase upaya pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan dan penangangan kebakaran yang dilakukan**	**80 %**	**80 %**	-	-	-
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman Kebakaran yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	72 Kali 29 Orang	71 Kali 29 Orang	-	-	-
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	20 jenis	20 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	20 jenis 100 orang	68 jenis	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	4 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	10 jenis	15 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5 unit	13 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	4 unit	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase Peningkatan PSKS yang Dibina**	**4 %**	**4 %**	-	-	-
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina**	**70 %**	**70 %**	-	-	-
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina	27 Orang	108 Orang	-	-	-
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga /perintis kemerdekaan yang diberdayakan	50 Orang	39 Orang	-	-	-
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat/LKSA yang dibina	400 Organisasi	445 Organisasi	-	-	-
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PPKS yang mendapat rehabilitasi**	**2 %**	**2 %**	-	-	-
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi**	**1 %**	**1 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas berat / Lansia terlantar yang mendapat permakanan	250 Orang	355 Orang	-	-	-
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1 Kali	2 Kali	-	-	-
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi**	**1 %**	**1 %**	-	-	-
				Penyediaan Permakanan	terjaminnya Kesejahteraan Eks Pasung/PMKS	15 Orang	13 Orang	-	-	-
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelaksanaan sosial / Bimbingan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Mahasiswa Kurang Mampu yang Mendapat Beasiswa	111 Orang	111 Orang	-	-	-
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Operasional RPS	12 Bulan	15 Bulan	-	-	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase masyarakat yang terlindungi dari resiko kerentanan sosial**	**82 %**	**82 %**	-	-	-
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**persentase meningkatnya akurasi ketepatan sasaran (Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**	**85 %**	**80 %**	-	-	-
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	meningkatnya realisasi penerimaan KPM	97 Persentase	97 Persentase	-	-	-
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	meningkatnya realisasi penerimaan KPM BPNT	97 Persentase	97 Persentase	-	-	-
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Terhadap Total Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**100 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Makanan	Tersedianya makanan bagi Korban Bencana	100 Paket	71 Paket	-	-	-
				Penyediaan Sandang	Ketersedian Sandang bagi Korban Bencana	100 Paket	79 Paket	-	-	-
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**persentase peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana**	**30 %**	**30 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Anggota Tagana dan Masyarakat yang dilatih	100 Orang	100 Orang	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Ketersediaan Makam yang Layak bagi Perintis Kemerdekaan dan Veteran**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**persentase pelaksanaan pemeliharaan TMP**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang Dipelihara	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase besaran tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**3,85 %**	**3,08 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah peserta yang dilatih dan mendapatkan sertifikat**	**81 Orang**	**81 Orang**	**-**	**-**	**-**
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta yang dilatih	540 Orang	540 Orang	Terdapat perubahan BNBA dan belum diakomodir dalam sistem	Sudah dilaporkan perubahan BNBA tersebut dan proses input sistem	Tidak ada
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang bersertifikasi**	**80 %**	**80 %**	**-**	**-**	**-**
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	40 Kegiatan	40 Kegiatan	pelaksanaan kegiatan akan di lanjutkan pada semester II	-	-
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**74,91 %**	**33,76 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase partisipasi angkatan kerja**	**40,66 %**	**36,667 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan antar kerja	20 Persen	20 Persen	proses perubahan BNBA penerima manfaat	sudah dilakukan perubahan BNBA dan proses input sistem	-
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	750 Orang	750 Orang	proses perubahan BNBA penerima manfaat	sudah dilakukan proses perubahan melalui sistem dan akan dilaksanakan pada semester II	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Prosentase kualitas Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**80 %**	**80,03 %**	-	-	-
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan peserta job fair	50 Perusahaan	27 Perusahaan	dilakukan pergeseran anggaran terhadap beberapa rekening belanja pada sub kegiatan tersebut	akan dilakukan pergeseran anggaran pada perubahan anggaran murni (PAK)	-
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PMI yang dilayani**	**80 %**	**80 %**	-	-	-
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Memfasilitasi Pra dan Purna PMI	50 Orang	57 Orang	-	-	-
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan**	**100 %**	**60 %**	-	-	-
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah peserta sosialisasi pembuatan PP dan PKB**	**25 Peserta**	**22 Peserta**	-	-	-
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit	20 Perusahaan	15 Perusahaan	-	-	-
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Penyelesaian Perselisihan Perusahaan**	**80 %**	**70 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketenagan bekerja	21 Kegiatan	21 Kegiatan	-	-	-
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender** **Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**1 %** **0,651 %**	**1 %** **0,65 %**	-	-	-
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Lembaga/ OPD yang mendapatkan Pendampingan Pelaksanaan PUG	51 Lembaga	44 Lembaga	-	-	-
				Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Sosialisasi Pelaksanaan PUG	51 Lembaga	51 Lembaga	-	-	-
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum dan Sosial dan Ekonomi	1 Kali	0 Kali	-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan Kebijakan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3 Organisasi	0 Organisasi	-	-	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase rasio kekerasan perempuan termasuk TPPO** **Persentase Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk TPPO**	**5,09 %** **5,09 %**	**5 %** **0 %**	-	-	-
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	4 Kali	9 Kali	-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki satgas perlindungan perempuan	9,58 Prosentase	9 Prosentase	-	-	-
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Layanan	0 Layanan	-	-	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	0 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	0 Orang	-	-	-
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Strata Kabupaten Layak Anak**	**Pratama Strata**	**0 Strata**	-	-	-
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah , Non pemerintah ,Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	4 Lembaga	4 Lembaga	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	-
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas hidup	75 Orang	75 Orang	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak	2 Media	2 Media	-	-	-
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Advokasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	150 Orang	150 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang tertangani	19 Orang	18 Orang	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	4 Layanan	-	-	-
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 Media	4 Media	-	-	-
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dengan lembaga penyedia layanan anak	5 Lembaga	5 Lembaga	-	-	-
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase kecukupan cadangan pangan daerah**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia**	**10 unit**	**10 unit**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya yang disediakan	7 Unit	7 Unit	-	-	-
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang disediakan	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan**	**71 skor**	**71 skor**	-	-	-
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	-	-	-
				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah data informasi harga pangan dan NBM yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jenis budidaya pangan lokal yang difasilitasi	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita pertahun yang dicapai**	**1820 kkal/kapita/ tahun**	**1820 kkal/kapita/ tahun**	-	-	-
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah data konsumsi pangan yang disediakan	1 Data	1 Data	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan	8 Kelompok	8 Kelompok	-	-	-
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase daerah rawan pangan yang tertangani**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	-	-	-
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Data daerah rawan pangan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan**	**85 %**	**85 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lokasi pasar/kios pangan segar yang dimonitoring**	**12 lokasi**	**12 lokasi**	-	-	-
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produsen pangan dan konsumsi yang dibina	40 Orang	40 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diuji	10 Sampel	10 Sampel	-	-	-
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan**	**87 %**	**76 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah masalah ganti rugi yang diselesaikan**	**1 Kasus**	**1 Kasus**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	-	-	-
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**1 laporan**	**2 laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	36 laporan	36 laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun**	**1 laporan**	**4 laporan**	**-**	**-**	**-**
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah laporan pendataan dan pendaftaran objek retribusi	1 laporan	4 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi	1 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi**	**100 jenis**	**100 jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	50 jenis	50 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 unit	100 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	100 paket	0 jenis 100 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100 paket	100 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	10 jenis	40 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 kali	100 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	50 m'	50 m'	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang direncanakan**	**90 %**	**90 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang direncanakan**	**90 %**	**400 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	48 rekening	48 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	20 orang	80 orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan**	**90 %**	**360 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	10 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	-	-	-
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase dokumen informasi lingkungan hidup yang dipenuhi**	**40 %**	**40 %**	-	-	-
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	-	-	-
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Instrumen pendukung RPPLH dan dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan KLHS Kab/kota**	**10 %**	**10 %**	-	-	-
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dalam penyusunan persetujuan Lingkungan	100 Dokumen	21 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Pemenuhan standart Kualitas Air** **Persentase Pemenuhan Standart Kualitas Udara** **Persentase Pemenuhan Standart Kualitas Lahan**	**77,1 %** **88,9 %** **80,7 %**	**68,3 %** **92,3 %** **72,1 %**	-	-	-
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**83,25 %**	**80 %**	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pemantauan sampel media tanah, air, udara dan laut	33 Dokumen	33 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan sampel pada titik penaatan kegiatan industri/usaha	375 Sampel	294 Sampel	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**50 %**	**100 %**	-	-	-
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah media informasi yang terpasang	1 Buah	1 Buah	-	-	-
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**72 %**	**30 %**	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah media air permukaan yang dilakukan restorasi	10 Lokasi	10 Lokasi	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase kehati yang terkelola**	**10 %**	**10 %**	-	-	-
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah Kehati yang masih lestari**	**6 lokasi**	**6 lokasi**	-	-	-
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola	4 Ha	16 Ha	-	-	-
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola	8 Ha	32 Ha	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) yang dikelola**	**16,7 %**	**13,2 %**	-	-	-
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**70 %**	**65,8 %**	-	-	-
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi dalam penyusunan Izin PPLH	50 Rekomendasi	47 Rekomendasi	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peProsentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan**	**20,32 %**	**32,2 %**	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Dilakukan Pengawasan**	**80 %**	**110 %**	-	-	-
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keg/usaha yang dilakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	30 Usaha/Kegiatan	41 Usaha/Kegiatan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri**	**10 jumlah**	**10 jumlah**	-	-	-
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**	**93,98 %**	**84 %**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/kader yang dilakukan peningkatan kapasitas dan peningkatan kompetensi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	45 Lembaga	40 Lembaga	-	-	-
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup**	**57,61 %**	**0 %**	-	-	-
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**60,78 %**	**60 %**	-	-	-
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/Instansi Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura (Titik Pantau)	20 Lembaga	20 Lembaga	-	-	-
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase aduan yang terselesaikan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran/kerusakan lingkungan	5 Laporan	21 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase cakupan pengelolaan persampahan**	**40,74 %**	**62,9 %**	-	-	-
				Pengelolaan Sampah	**Persentase cakupan pelayanan persampahan**	**40,74 %**	**62,9 %**	-	-	-
				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan pelayanan pengelolaan persampahan	11 Lokasi	17 Lokasi	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Prasarana dan Sarana Operasional Pengelolaan Persampahan	5 Unit	48 Unit	-	-	-
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	15 Unit	-	-	-
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerka perangkat daerah**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Kali**	**12 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian daerah**	**100 %**	**20 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 orang	2 orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**7 Jenis**	**7 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	26 jenis 3 paket	26 jenis 3 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	7 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	250 kali	250 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	10 m'		-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15 unit	15 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	2000 kali	1500 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 rekening	4 rekening	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	6 orang	6 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**74 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	50 unit	40 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	12 unit	5 unit	-	-	-
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**77 %**	**77 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang terlayani**	**62000 dokumen**	**61750 dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk	87 Persentase	87 Persentase	-	-	-
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah biodata penduduk yang update	42000 Dokumen	41750 Dokumen	-	-	-
				Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	21000 Dokumen	19000 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pendaftaran penduduk dan peristiwa penting penduduk**	**12 kali**	**12 kali**	**-**	**-**	**-**
				Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Frekuensi Pelayanan Jemput Bola yang dilakukan	48 Kali	48 Kali	-	-	-
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**79 %**	**79 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah panduan pencatatan sipil dan dokumen peÃ±atausahaan peristiwa penting penduduk.**	**2 buah**	**2 buah**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan dokumen akta-akta pencatatan sipil	15450 Dokumen	15000 Dokumen	-	-	-
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penyelesaian pelayanan pencatatan sipil	87 Persentase	87 Persentase	-	-	-
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Frekuensi koordinasi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah terkait pencatatan sipil dan peristiwa penting penduduk**	**12 kali**	**12 kali**	-	-	-
				Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan jemput bola yang dilakukan	48 Kali	48 Kali	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase pemanfaatan data dan informasi kependudukan**	**72 %**	**72 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Frekuensi penyusunan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan**	**1 buah**	**1 buah**	-	-	-
				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah stakeholder yang terfasilitasi	5 stakeholder		-	-	-
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah lembaga pengguna	10 Lembaga	10 Lembaga	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Operator yang dibina**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusunPersentase penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	3 jenis	3 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 unit	15 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	6 jenis 3 paket	6 jenis 3 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 paket		-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	30 kali	25 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	1 kali	1 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	2 rekening	2 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah dan jenis barang milik daerah yang dipelihara**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	54 unit	45 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	34 unit	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Persentase Desa yang melakukan Kerjasama** **Persentase BUMDes Maju**	**41,82 %** **5,45 %**	**105,99 %** **9,39 %**	-	-	-
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Jumlah BUMDes Bersama yang terbentuk** **Jumlah BUMDes berkembang menjadi maju**	**27 BUMDESMA** **18 BUMDes**	**21 BUMDESMA** **31 BUMDes**	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Perdes /Permakades	138 Desa	253 Desa	-	-	-
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi**	**49,19 %**	**49,01 %**	-	-	-
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa**	**330 Desa**	**330 Desa**	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum tentang Desa yang ditetapkan	13 Produk Hukum Desa	7 Produk Hukum Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan Desa	330 Desa	330 Desa	-	-	-
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemdes yang dibina	100 Orang	75 Orang	-	-	-
				Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jangka Waktu Penyediaan BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Desa yang dibina dalam manajemen Pemerintahan Desa	12 Bulan 330 Desa	12 Bulan 330 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang ikut Lomba Desa	27 Desa	27 Desa	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif** **Persentase Lembaga Adat Desa yang terbentuk**	**43,3 %** **4,49 %**	**43,3 %** **4,49 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbentuk berdasarkan Per UU** **Jumlah Lembaga Adat Desa terbentuk berdasarkan Per UU**	**3694 LKM** **15 LAD**	**3694 LKM** **15 LAD**	-	-	-
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus LKD dan LAD terlatih Jumlah Peraturan Bupati tentang LKD/K dan LAD	112 Orang 1 Perbup	112 Orang 0 Perbup	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Organisasi Wanita Aktif Jumlah DWP Aktif	6 Organisasi 15 DWP	6 Organisasi 15 DWP	-	-	-
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LAD Penerima bantuan Jumlah LKD Penerima bantuan Jumlah LKD Penerima bantuan Jumlah LKD Penerima bantuan	10 LAD 20 Posyandu 50 Karang Taruna 50 RT	2 LAD 10 RT	-	-	-
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Desa terpencil/kepulauan yang difasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan Listrik 24 Jam Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat didesa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna	25 Desa 10 Desa 10 Lembaga Ekonomi	25 Desa 10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	85 TP PKK	85 TP PKK	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Kampung KB Mandiri**	**5 %**	**0 %**	-	-	-
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah kebijakan yang disusun**	**2 kebijakan**	**0 kebijakan**	-	-	-
				Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kecamatan yang tersedia Profil KKBPK**	**6 kecamatan**	**6 kecamatan**	-	-	-
				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6 Unit	6 Unit	-	-	-
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase Kesertaan KB Aktif (CPR)**	**70,09 %**	**72,6 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana**	**40 %**	**40 %**	-	-	-
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	10 Organisasi	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jenis media promosi dan KIE yang digunakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	26 Balai Penyuluhan	26 Balai Penyuluhan	-	-	-
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase Tenaga PKB/ PLKB dan Kader IMP yang aktif**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang dibina	668 Orang	668 Orang	-	-	-
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Faskes (Fasilitas Kesehatan) teregester yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes teregester yang difasilitasi	65 Faskes	64 Faskes	Capaian kinerja bukan akumulatif namun hasil akhir pada triwulan 4	Capaian diambil pada triwulan 4	Capaian diambil pada triwulan 4
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB MKJP yang dilayani	250 Orang	637 Orang	-	-	-
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan	10 Paket	10 Paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah peserta sosialisasi promosi dan konseling	150 Orang	180 Orang	-	-	-
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan berKB**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase pembentukan pokja Kampung KB dan Rumah Dataku di Kampung KB	100 %	100 %	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase Partisipasi Keluarga terhadap Pembangunan Keluarga**	**75 %**	**65,02 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Kegiatan Aktif**	**100 %**	**100 %**	**Capaian kinerja bukan hasil akumulatif tiap triwulan, namun adalah hasil akhir pada triwulan 4**	**Capaian kinerja menggunakan yang triwulan 4**	**Capaian kinerja menggunakan yang triwulan 4**
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang dibeli	20 Paket	20 Paket	-	-	-
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader kelompok kegiatan yang dilatih	50 Orang	50 Orang	-	-	-
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2514 Orang	2514 Orang	-	-	-
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase Kelompok Kegiatan Aktif dalam Pembangunan Keluarga**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader kelompok kegiatan yang dilatih	50 Orang	50 Orang	-	-	-
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100**	**100**	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**13**	**13**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	*3*	*3*	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	*1*	*1*	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	*2*	*2*	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	*1*	*1*	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	*2*	*2*	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	*3*	*3*	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	*3*	*3*	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**13**	**13**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	*110*	*110*	-	-	-
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	*4*	*4*	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	*4*	*4*	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah**	**2**	**2**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	*2*	*2*	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	*0*	*0*	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**6**	**6**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	*10*	*10*	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	*11*	*11*	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	*2*	*2*	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*10*	*10*	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	*3*	*3*	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	*12*	*12*	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**	**10**	**10**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang disediakan	*1*	*1*	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan**	*8*	*8*	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*1*	*1*	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	2	2	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	*48*	*48*	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*1*	*1*	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	62	61	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*20*	*20*			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*40*	*40*			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	*2*	*1*	Rehabilitasi Monumen Pesawat tidak terealisasi karena belum ada kesepakatan terkait lokasi dan fondasi monumen pesawat dengan pihak LANUD Abdul Rachman Saleh Malang	Berkoordinasi kembali dengan pihak LANUD Abdul Rachman Saleh Malang	nihil
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Rata-rata Load Factor Angkutan Jalan Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan Persentase Prasarana Perhubungan Darat yang dapat berfungsi**	**55 % 25 km/jam 75 %**	**55 % 25 km/jam 61,5 % 0 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah pemenuhan Perlengkapan Jalan**	**6 Item**	**6 Item**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang diadakan	4 Item	4 Item	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Item	4 Item	-	-	-
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah pelaksanaan pengelolaan Terminal Type C**		**0 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		0 Paket	adanya refocusing anggaran sehingga hanya sampai pada tahap perencanaan	tahap pembangunan/pengembangan terminal akan dianggarkan kembali tahun berikutnya	nihil
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Kendaraan yang diuji berkala**	**81,88 %**	**80 %**	**-**	**-**	**-**
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	2000 Unit	4353 Unit	terjadi kesalahan dalam penginputan target kinerja	lebih teliti dan cermat dalam penginputan target kinerja	nihil
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	2000 Set	2000 Set	-	-	-
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	-	-	-
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**	**30 Kali**	**30 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	30 Kali	30 Kali 96 Orang	-	-	-
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	30 Unit	30 Unit	-	-	-
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Persetujuan Andalalin**	**1 Rekom**	**1 Rekom**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Orang	adanya refocusing anggaran	akan dianggarkan kembali tahun berikutnya	nihil
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Kali	5 Kali	-	-	-
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Angkutan Umum yang beroperasi**	**245 Unit**	**245 Unit**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Rata-rata Load Factor Angkutan Penyeberangan**	**60**	**60**	**-**	**-**	**-**
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Prasarana Pelayaran yang dapat Berfungsi**	**75**	**55**	**-**	**-**	**-**
				Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Dan/ Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan	1	1	Rencana awal untuk subsidi penumpang dan barang lalu perbup yang disahkan hanya barang setelah disahkan kapal tidak beroperasi	Sisa anggaran akan dikembalikan ke kas daerah	nihil
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dan/ atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota**	*1*	*1*	**-**	**-**	**-**
				Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan	1	1			
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*12*	*12*	-	-	-
				Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Proporsional	4	3			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	*5*	*3*	1 Paket perencanaan Dermaga Talango belum terealisasi karena masih menentukan lokasi yang strategis baik dari sisi daratan maupun sisi laut Kekurangan Pembayaran Pengawasan Revitalisasi Revitalisasi PembangunanGiliyang (Konsultan Pengawas) tidak akan terealisasi, karena sudah terbayarkan pada tahun 2021 Pembangunan Dermaga Talango masih dalam proses perencanaan Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Giliiyang (Lanjutan) proses seleksi tender di SPSE	Segera ditentukan lokasi strategis sesuai dengan kondisi anggaran. Anggaran akan dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur segera menyelesaikan proses perencaan agar pekerjaan pembangunan fisik dapat segera dikerjakan Menyesuaikan jadwal di SPSE	Nihil NIHIL NIHIL NIHIL
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	*1*	*1*			
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	*12*	*12*			
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	9 laporan	6 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	9 bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	90 stel	90 stel	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	35 jenis 3 paket	35 jenis 6 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	20 jenis	15 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	150 kali	146 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	3 rekening	9 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperoleh melalui jasa sewa	2 unit	1 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	29 unit	29 unit	-	-	-
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Layanan Publik Berbasis Elektronik**	**75 %**	**70 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah konten yang dikelolah oleh perangkat daerah** **Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik** **Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik** **Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik** **Jumlah Layanan Hubungan Media** **Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah** **Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan**	**45 dokumen** **30 dokumen** **30 dokumen** **75 dokumen** **10 media** **75 dokumen** **30 dokumen**	**35 dokumen** **30 dokumen** **25 dokumen** **65 dokumen** **8 media** **65 dokumen** **25 dokumen**	-	-	-
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik dari media massa, media sosial, dan pendapat umum Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	35 Dokumen 100 %	35 Dokumen 80 %	-	-	-
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi yang diproduksi	150 Konten	150 Konten	-	-	-
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media informasi dan komunikasi yang dikelola	65 Media	45 Media	-	-	-
				Pelayanan Informasi Publik	Prosentase permintaan informasi yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	-	-	-
				Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama publikasi dengan media	25 Media	310 Media	-	-	-
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Prosentase sengketa informasi yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota** **Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah** **Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**77 instansi** **35 instansi** **50 instansi**	**154 instansi** **105 instansi** **150 instansi**	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat Daerah yang sudah terhubung jaringan internet Kabupaten	67 Perangkat Daerah	201 Perangkat Daerah	-	-	-
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**77 %**	**60 %**	-	-	-
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah** **Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola** **Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City** **Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)** **Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah** **Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah** **Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government**	**45 instansi** **45 data** **15 dokumen** **20 dokumen** **20 dokumen** **35 instansi** **20 dokumen**	**135 instansi** **135 data** **45 dokumen** **60 dokumen** **60 dokumen** **105 instansi** **60 dokumen**	-	-	-
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat daerah yang sudah mempunyai admin dalam melaksanakan one data Kabupaten	100 %	80 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terhubung layanan pemerintah berbasis elektronik	100 %	75 %	-	-	-
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang sudah terhubung layanan pemerintah berbasis elektronik	100 %	80 %	-	-	-
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evakuasi perangkat daerah**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**12 Jenis**	**12 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	100 Stel	100 Stel	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	4 ASN	4 ASN	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**60 Jenis**	**60 Jenis**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	30 Buah	30 Buah	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	350 Unit	350 Unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	30 Item 24 Paket	30 Item 24 Paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	10 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	250 Kali	250 Kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	170 M/Lari	170 M/Lari	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**30 unit**		**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 Unit	10 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah layanan jasa yang disediakan**	**6 layanan jasa**	**6 layanan jasa**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 Rekening	4 Rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**46 unit**	**46 unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	25 Unit/Orang	25 Unit/Orang	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang Telah Diawasi dan Diperiksa**	**11 %**	**11 %**	-	-	-
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi**	**100 Koperasi**	**100 Koperasi**	-	-	-
				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diperiksa	100 Koperasi	100 Koperasi	-	-	-
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Peserta yang Lulus Dengan Predikat Baik**	**75 %**	**75 %**	-	-	-
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengurus/Pengawas yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**200 orang**		-	-	-
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/Pengawas yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	200 Orang	200 Orang	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelarihan SDM Usaha Mikro**	**420 Orang**	**420 Orang**	-	-	-
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro	420 orang	420 orang	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi**	**5,5 %**	**5,5 %**	-	-	-
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi yang mendapat perlindungan**	**100 Koperasi**	**100 Koperasi**	-	-	-
				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas	100 Koperasi	100 Koperasi	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase UMKM Yang Dikembangkan Usahanya**	**4,5 %**	**4,5 %**	-	-	-
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil**	**100 UM**	**100 UM**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pengembagan produksi dan pengelolaan, pemasaran. Sdm, serta desain dan teknologi	100 Usaha Mikro	100 Usaha Mikro	-	-	-
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**64,92 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD Tepat Waktu**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Keuangan Tepat Waktu**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	32 ASN	32 ASN	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Administrasi Kepegawaian SKPD**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Besrta Atributnya yang disediakan	54 Stel	54 Stel	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	5 Orang	4 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**100 %**	**98 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik yang disediakan	7 Item	7 Item	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Unit	13 Unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item/jenis ATK yang disediakan	19 Item	17 Item	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	5 Item	5 Item	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang disediakan	736 Exemplar	736 Exemplar	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	37 Laporan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah meter lari arsip yang dikelola	6 Meter	6 Meter	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diadakan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Jasa Penunjang Urusan SKPD**	**100 %**	**100,01 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Diadministrasikan	2187 Surat	2617 Surat	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi/SDA dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non ASN Yang Disediakan	10 Orang	30 Orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Peningkatan Masa Umur Pemakaian Barang Milik Daerah**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan berizin	16 Unit	16 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan bangunan gedung yang dipeliharan/direhab	1666,6 M2	1666,66136 M2	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		**20 %**	**17,71 %**	**-**	**-**	**-**
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**5 Pelaku Usaha**	**5 Pelaku Usaha**	**-**	**-**	**-**
				Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 PERKADA	1 PERKADA	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		**3 Potensi dan Peluang Usaha**	**3 Potensi dan Peluang Usaha**	-	-	-
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**3,55 %**	**2,94 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**5 Media**	**5 Media**	-	-	-
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		**3,55 %** **82,81 Indeks**	**2,67 %** **256,01 Indeks**	-	-	-
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**5958 NIB**	**6440 NIB**	-	-	-
				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		5958 NIB	6440 NIB	-	-	-
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		22 Pelaku Usaha	6440 Pelaku Usaha	-	-	-
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		10 Pengaduan	8 Pengaduan	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**5958 Unit**	**5908 Unit**	-	-	-
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**5958 Pelaku Usaha**	**6440 Pelaku Usaha**	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		216 Pelaku Usaha	220 Pelaku Usaha	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		20 Dokumen	18 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**85 %**	**79,7 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		4 Data	4 Data	-	-	-
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**	**10 %**	**10 %**	-	-	-
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah pemuda pelopor/wirausaha muda pemula/pemuda kader yang dibina**	**700 Orang**	**700 Orang**	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda Kreatif Yang di Berdayakan	700 Orang	700 Orang	-	-	-
				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	75 Orang	75 Orang	-	-	-
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah organisasi kepemudaan yang diberdayakan/dibina**	**20 Organisasi**	**7 Organisasi**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang di Bina	1 OKP	1 OKP	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase Peningkatan Prestasi Olah Raga**	**25 %**	**25 %**	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah olahraga pendidikan yang dibina/dikembangkan**	**1 Buah**	**1 Buah**	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	4 Unit	11 Unit	-	-	-
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**jumlah kejuaraan cabang olahraga prestasi yang diselenggarakan**	**1 kali**	**1 kali**	-	-	-
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	50 Orang	50 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah kejuaraan cabang olahraga tingkat propinsi yang diikuti**	**10 kejuaraan**	**10 kejuaraan**	-	-	-
				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	1 Pelatda	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah cabang olagraga prestasi yang dibina/dikembangkan**	**10 cabor**	**10 cabor**	-	-	-
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	jumlah induk cabor yang terfasilitasi	22 Cabor	22 Cabor	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina/dikembangkan**	**3 cabor**	**2 cabor**	-	-	-
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event olahraga rekreasi	2 Kali	2 Kali	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase Lembaga Kepramukaan Yang Terakreditasi**	**5 %**	**5 %**	-	-	-
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah Gudep Organisasi Kepramukaan**	**27 perkemahan**	**1 perkemahan**	-	-	-
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pemuda Kreatif Yang di Berdayakan	1 Orang	1 Orang	-	-	-
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Persediaan Data sektoral Terpadu**	**75 %**	**50 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**	**110 dokumen**	**90 dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Pengamanan Informasi Daerah Yang Terselenggara Dengan Baik**	**75 %**	**50 %**	-	-	-
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	66 Perangkat Daerah	132 Perangkat Daerah	-	-	-
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**80 %**	**80 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Orang	7 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Item	1 Item	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Item	1 Item	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**2 Unit**	**8 Unit**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Jasa Surat Menyurat	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**4 Unit**	**4 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 Persentase	100 Persentase	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan**	**40 %**	**40 %**	-	-	-
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	-	-	-
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Penampilan dan Festival yang Dilaksanakan	10 Kali	10 Kali	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase Pembinaan Sejarah**	**60 %**	**60 %**	-	-	-
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pembinaan sejarah lokal**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	-	-	-
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan SDM	2 Kali	2 Kali	-	-	-
				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Pelaksanaan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	2 Kali	2 Kali	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Permuseuman**	**60 %**	**60 %**	-	-	-
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah museum yang dikelola di kabupaten**	**3 obyek**	**3 obyek**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3 Unit	3 Unit	-	-	-
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum	3 Kali	3 Kali	-	-	-
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**95 %**	**135,28 %**	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	10 bulan	Perhitungan Penyediaan Gaji dan tunjangan penyediaan Dana Anggaran per triwulan di DPK dalam pelaksanaannya mengalami kekurangan	Menghitung kembali penyediaan anggaran per triwulan dalam Penyusunan Renja pada Tahun Berjalan maupun tahun yang akan datang	Tepat Waktu dalam Pelaksanaan Anggaran Kegiatan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi**	**74 %**	**125,68 %**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	72 jenis	67 jenis	Dalam penatausahaan Belanja semua diatur oleh sistem elektronik yang memungkinkan setiap penyedia belum siap melakukannya dikarenakan butuh proses	Melakukan Koordinasi pada setiap Unit usaha dan penyedia dalam melakukan transaksi yang berbasis elektronik dan konsultasi pada Badan atau dinas yang mengampuhnya	Setiap Anggaran Belanja program dan Kegiatan dapatnya dilakukan realisasi anggaran sesuai dengan prosedur ketentuan Perundangan yang berlaku
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	19 unit	15 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	65 jenis 2 paket	29 jenis 2 paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	20 jenis	22 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	82 kali	29 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola			-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan jasa Penunjang kegiatan urusan pemerintah daerah selama 1 tahun**	**86 %**	**129,39 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	7 rekening	7 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Sarana dan prasana perlengkapan serta peralatan dan Mesin yang dipelihara dalma 1 tahun**	**77 %**	**72,77 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	15 unit	14 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	36 unit	pada setiap pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan	merealisisikan kegiatan maupun setiap sub kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat	Merealisasikan sesuai target
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 unit	3 unit	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Lembaga Perpustakaan yang dibina**	**95 %**	**46,53 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan**	**86 lembaga**	**86 lembaga**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan berbasis informasi Teknologi	86 Lembaga	2 Lembaga	Pada tahun berjalan Sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik tidak dapat dilaksanakan dikarenakan minimnya anggaran Dinas perpustakaan dan Kearsipan	Mengajukan Anggaran pada Tahun berikutnya agar dapatnya terealisasi Sub kegiatan tersebut	-
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Lembaga yang dibina dan dikembangkan	86 Lembaga	65 Lembaga	Dengan adanya kebijakan dilakukannya Pengurangan Anggaran di tahun berjalan pada sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan Perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan evaluasi kembali target kinerja dalam pelaksanaannya	Merealisasikan Anggaran sesuai Target Kinerja dan Anggaran program dan kegiatan
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Lembaga Pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan perpustakaan	86 Lembaga	86 Lembaga	-	-	-
				Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang di kelola dan dikembangkan	1000 explar	1817 explar	Pelaksanaan Kegiatan terkendala pada penyedia atau penerbit	Membuat Mou kerjasama setiap pengadaan bahan pustaka ditunjuk penerbit yang telah terdaftar pada LPSE	Realisasikan sesuai anggaran belanja dan Anggaran Kas
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan yang dikembangkan dan diolah	1000 explar	1700 explar	-	-	-
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan disusun	100 Lembaga	86 Lembaga	-	-	-
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan**	**10000 pengunjung**	**2985 pengunjung**	**-**	**-**	**-**
				Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar serta masyarakat	90 Lembaga	90 Lembaga	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase OPD yang memiliki Sarana Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**80 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan arsipnya**	**25 Pencipta Arsip**	**79 Pencipta Arsip**	-	-	-
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung yang diselamatkan arsipnya	10 Arsip	10 Arsip	-	-	-
				Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	**Jumlah Arsip Statis Kabupaten yang dicari**	**10 series**	**40 series**	-	-	-
				Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	10 Arsip	3 Arsip	pencipta arsip pada setiap belum sadar akan pentingnya Arsip dan tidak tertib	tertib Arsip pada setiap pencipta arsip di semua OPD	tiadak ada
				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Persentase Izin penggunaan arsip yang ditindaklanjuti**	**80 %**	**5 %**	-	-	-
				Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Jumlah Peraturan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang ditetapkan dan diterbitkan**	**4 peraturan**		-	-	-
				Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan	2 SOP	1 SOP	setiap OPD masih belum punya Arsip Statis	OPD hendaknya tertib dalam pelaksanaan arsip statis	tidak ada
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**DINAS PERIKANAN**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerka perangkat daerah**	**11 dokumen**	**11 dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**4 laporan**	**4 laporan**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	30 Kegiatan	30 Kegiatan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**5 keg**	**5 keg**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	20 Rekening	20 Rekening	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	3 Kegiatan 3 Kegiatan	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	40 Kegiatan	34 Kegiatan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 jasa**	**4 jasa**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	3 Rekening	3 Rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah obyek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 obyek**	**3 obyek**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	7 Unit	5 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap**	**1 %**	**1,03 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Produksi Perikanan tangkap**	**43690 ton**	**43703,18 ton**	-	-	-
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data dan informasi perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima Prasarana penangkapan ikan	50 Kelompok	28 Kelompok	-	-	-
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima sarana penangkapan ikan	30 Kelompok	30 Kelompok	-	-	-
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelompok nelayan yang dibina**	**55 kel**	**37 kel**	-	-	-
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan yang dibina/dilatih	40 Orang	22 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah asuransi dan pembiayaan nelayan lainnya yang disalurkan	150 Orang	150 Orang	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Jumlah TPI yang dikelola**	**1 lokasi**	**0 lokasi**	-	-	-
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sarana TPI yang terpelihara	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya**	**20 %**	**28,9 %**	-	-	-
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah produksi budidaya ikan**	**5400 ton**	**7802,78 ton**	-	-	-
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi budidaya ikan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang tersalurkan kepada kelompok budidaya	31 Unit	42 Unit	-	-	-
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana yang tersalurkan kepada kelompok budidaya	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembibitan dan penanganan kesehatan ikan	2 Lokasi	2 Lokasi	-	-	-
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah fasilitasi kelompok program SEHATKAN dan program perlindungan lainnya	5 Kelompok	21 Kelompok	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku**	**1,5 %**	**0,86 %**	-	-	-
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaku Usaha perikanan Yang dibina**	**250 Pelaku Usaha**	**144 Pelaku Usaha**	-	-	-
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku utama usaha perikanan tangkap yang dibina dan taat hukum	150 Unit Usaha	200 Unit Usaha	-	-	-
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku utama usaha perikanan budidaya yang dibina dan taat hukum	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	-	-	-
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase pertumbuhan produksi olahan perikanan**	**1 %**	**1,16 %**	-	-	-
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Kelompok Pemasaran yang dibina**	**4 kel**	**4 kel**	-	-	-
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Pemasaran yang dibina Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan ikan	4 Kelompok 4 Dokumen	4 Kelompok 4 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah kelompok pengolahan yang dibina**	**35 kel**	**35 kel**	-	-	-
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku utama usaha pengolahan dan pemasaran yang dibina dan taat hukum	50 Unit Usaha	35 Unit Usaha	-	-	-
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mendapatkan bantuan**	**15 kel**	**15 kel**	-	-	-
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pengolahan yang dibina	15 Kelompok	15 Kelompok	-	-	-
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang disalurkan kepada kelompok	15 Unit	15 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**	**5 %**	**5 %**	-	-	-
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah obyek wisata yang dikelola**	**3 Buah**	**3 Buah**	-	-	-
				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah obyek wisata yang dikembangkan**	**3 Buah**	**3 Buah**	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah peningkatan TDUP**	**5 Buah**	**2 Buah**	-	-	-
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Perijinan	5 Rekom	2 Rekom	-	-	-
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Terselenggaranya Pemasaran Pariwisata di Dalam Negeri dan Luar Negeri**	**75 %**	**75 %**	-	-	-
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah kunjungan wisatawan**	**210000 orang**	**713748 orang**	-	-	-
				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah perluasan produk unggulan pasar pariwisata	3 Buah	3 Buah	-	-	-
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah kerjasama dan investasi yang dilakukan	1 Kerjasama	1 Kerjasama	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Persentase Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**5 %**	**5 %**	-	-	-
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang diberdayakan**	**1 Kali**	**1 Kali**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	25 Dokumen	25 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**5 %**	**5 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**jumlah pembinaan unsur pariwisata**	**3 kali**	**3 kali**	-	-	-
				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah SDM Pariwisata	50 Orang	50 Orang	-	-	-
				Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Bidang Pariwisata yang kompeten	40 Orang	40 Orang	-	-	-
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**7 dokumen**	**7 dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**2 laporan**	**2 laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	3066 Orang	3066 Orang	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**			-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 Orang	0 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**6 unit**	**6 unit**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	7 Item	7 Item	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 Item	13 Item	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan Jumlah makan dan minum yang disediakan	28 Item 30 Paket	28 Item 30 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Item	6 Item	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	78 Kali	78 Kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	5 Meter lari	5 Meter lari	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**4 jenis**	**4 jenis**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	22 Tagihan/rekening	22 Tagihan/rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	71 Orang	71 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**13 unit**	**13 unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	3 Item	3 Item	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Item	4 Item	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan**			-	-	-
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian**	**199 Klp**	**199 Klp**	-	-	-
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sarana (benih, pupuk ,dll) untuk pembibitan Tembakau unggul yang dibudidayakan	749 Ha	749 Ha	-	-	-
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian yang disediakan	128 Unit	128 Unit	-	-	-
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**SDG pertanian dan peternakan yang terkelola**	**627 ha**	**627 ha**	-	-	-
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah luas tanam tanaman pertanian hortikultura yang dilaksanakan untuk menjamin kemurnian SDG	2 Ha	2 Ha	-	-	-
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah luas tanam tanaman pertanian yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDG tanaman/ternak	5 Ha	5 Ha	-	-	-
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah luas tanam tanaman pangan yang dilaksanakan	620 Ha	620 Ha	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1. Persentase peningkatan populasi ternak besar** **2. Persentase peningkatan populasi ternak kecil** **3. Persentase peningkatan populasi ternak unggas**	**0,5 %** **0,5 %** **0,25 %**	**-1,004 %** **0,58 %** **0,28 %**	-	-	-
				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah populasi ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi ternak unggas	386300 Ekor 196258 Ekor 1792552 Ekor	386447 Ekor 197241 Ekor 1839658 Ekor	-	-	-
				Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Akseptor Pelayanan Inseminasi Buatan	49000 Aksep	42222 Aksep	-	-	-
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik**	**76 %**	**76 %**	-	-	-
				Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah prasarana yang diperbaiki**	**32 Unit**	**32 Unit**	-	-	-
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	32 Laporan	-	-	-
				Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah prasarana yang dibangun**	**73 unit**	**73 unit**	-	-	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan usaha tani tani yang dibangun/direhab	21 Unit	21 Unit	-	-	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun/direhab			-	-	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	11 Unit	11 Unit	-	-	-
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP dan sarana pendukungnya yang dibangun/direhab			-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun/direhab	41 Unit	41 Unit	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Prosentase penanganan kasus penyakit hewan**	**25 %**	**25 %**	**-**	**-**	**-**
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan**	**20 lokasi**	**20 lokasi**	**-**	**-**	**-**
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah penanganan terhadap penyakit hewan	3000 Ekor	4983 Ekor	-	-	-
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah ternak yang teridentifikasi penyakit pada ternak yang keluar-masuk kabupaten**	**125 ekor**	**127 ekor**	**-**	**-**	**-**
				Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jenis penyakit ternak yang teridentifikasi pada ternak yang keluar-masuk kabupaten	4 Jenis	4 Jenis	-	-	-
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan medik veteriner**	**100 sampel**	**3400 sampel**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan medik dan paramedik	10075 Ekor	10121 Ekor	-	-	-
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Jumlah bencana pertanian yang dikendalikan**	**10 ha**	**10 ha**	**-**	**-**	**-**
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan terkena OPT yang bisa dikendalikan	10 Ha	10 Ha	-	-	-
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Prosentase usaha pertanian yang difasilitasi**	**2 %**	**2 %**	**-**	**-**	**-**
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelompok yang dibina usahanya**	**1 Klp**	**3 Klp**	**-**	**-**	**-**
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina izin usahanya	1 Kelompok	3 Kelompok	-	-	-
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase peningkatan klas kelompok tani lanjut**	**1 %**	**1 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah kelompok tani yang naik kelas**	**81 Klp**	**81 Klp**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah terbentuknya pos penyuluhan tingkat desa	25 Posluhdes	25 Posluhdes	-	-	-
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah poktan yang difasilitasi mengembangkan kapasitas dari hulu ke hilir	81 Poktan	81 Poktan	-	-	-
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dilatih dalam olahan hasil- hasil peternakan Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	1 Kelompok 15 Paket	1 Kelompok 15 Paket	-	-	-
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan Volume Perdagangan di Pasar**	**15 %**	**15 %**	**-**	**-**	**-**
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah Pertambahan Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan yang Disediakan dan Dikelola**	**49 Unit**	**46 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan/ perbaikan sarana perdagangan di pasar	4 Pasar	4 Pasar	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola	45 Pasar	45 Pasar	-	-	-
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase Alat-Alat Ukur , Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku**	**12 %**	**12 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal**	**12 %**	**11 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP	1120 UTTP	2300 UTTP	-	-	-
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase Peningkatan Penjualan Produk Dalam Negeri**	**30 %**	**30 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**2 Kali**	**2 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	2 Kali	2 Kali	-	-	-
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Peningkatan Pembangunan Industri**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Pembangunan Industri yang terlaksana**	**4 Dok**	**4 Dok**	-	-	-
				Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra	2 Sentra	9 Sentra	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan dan unit KIHT yang dibangun	50 peserta dan 1 unit KIHT	1 peserta dan 1 unit KIHT	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana	100 fasilitasi	100 fasilitasi	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM / Pokmas yang menerima bantuan	40 IKM	40 IKM	-	-	-
30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**		**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya**	**80 %**	**80 %**	-	-	-
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kunjungan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Memfasilitasi Identifikasi Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi	15 KK	15 KK	-	-	-
31	**SEKRETARIAT DAERAH**	**SEKRETARIAT DAERAH**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan** **% OPD yang menindaklanj uti Monev. peningkatan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja** **% Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi** **% OPD yang dibina untuk memenuhi standar pelayanan publik dan tata laksana** **% Layanan Keprotokolan yang terpenuhi**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**100 %** **110 %** **100 %** **100 %** **100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100 %**	**100 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Yang Disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah kali pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 kali	4 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi Keuangan Setda yang dipenuhi**	**100 %**	**99,92 %**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	210 orang	203 orang	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Transaksi Keuangan yang terverifikasi	3000 transaksi	5097 transaksi	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kali Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Sinkronisasi dengan BPKAD Jumlah pelaksanaan Sinkronisasi dengan Bagian dan BPKAD	12 kali 12 Bulan	12 kali 12 Bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase Penyelesaian Administrasi Tanggapan Pemeriksaan	75 %	75 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi BMD setda yang dipenuhi**	**100 %**	**100 %**	**1. Lokasi dan item barang yang dikelola Sekretariat Daerah sangat besar sehingga rawan menimbulkan permasalahan administrasi penatausahaan barang**	**1. membuat labelisasi berbarcode (lengkap dengan berita acara serah terima dan lokasi); penataan gudang dengan menggunakan aplikasi**	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data Kebutuhan BMD Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	-	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	3 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan pengadministrasian Data kepegawaian di LingkunganSetda yang dilaksanakan	8 Jenis	8 Jenis	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	5 Lokasi	5 Lokasi	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan/ Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang disediakan Jumlah Jenis Mamin Yang disediakan	10 Jenis 3 jenis	10 Jenis 3 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan yang disediakan Jumlah Penggandaan yang disediakan	4 Jenis 268046 lembar	4 Jenis 240046 lembar	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lokasi dipenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	5 Lokasi	5 Lokasi	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu terpenuhinya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam danLuar Daerah serta Luar Negeri	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	20 meter lari	20 meter lari	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan BMD Penunjang Setda yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	27 unit	27 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemda yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan yang terpenuhi	4 jenis	4 jenis	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis tenaga outsourhing yang dipenuhi	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang urusan Pemda yang dipelihara**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan (roda 4) yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 4) yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 2) yang dipelihara	31 Unit 3 Unit	31 Unit 3 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Lokasi Gedung dan Bangunan yang terpelihara	5 Lokasi	5 Lokasi	-	-	-
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**37,5 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan atribut KDH/WKDH	54 Stel	54 Stel	-	-	-
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan medical checkup untuk KDH/WKDH	12 Bulan	0 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Kerumahtanggaan Setda yang difasilitasi**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtanggaan KDH	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtanggan WKDH	12 Bulan	9 Bulan	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tanggan Setda	12 Bulan	9 Bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penataan Organisasi	**Persentase penataan organisasi (OPD) yang dilaksanakan** **Persentase OPD yang difasilitasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi** **Persentase OPD yang dibina yang mengikuti KIPP** **Persentase OPD yang dimonev kepatuhan terhadap SPP**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**1. Kegiatan pendampingan penyusunan SPP dan SOP telah dilakukan. Namun, respon OPD masih perlu ditingkatkan; 2. Monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan kepada semua Perangkat Daerah karena keterbatasan SDM dan anggaran; 3. hasil evaluasi penerapan SAKIP masih belum sesuai rencana**	**1.Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan respon OPD termasuk memberikan surat teguran. Ke depan akan dilakukan pembinaan khusus kepada OPD; 2. telah dilakukan semaksimal mungkin dan akan didesain monitoring dan evaluasi dengan lebih efektif untuk monitoring ke depan; 3. pendampingan kepada OPD, dan membuat aplikasi e-SAKIP**	-
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang disusun kebutuhan pegawai, formasi jabatan, kompetensi jabatan, kelas nilai jabatan Jumlah OPD yang akan disusun untuk di Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	51 OPD 51 OPD	51 OPD 51 OPD	-	-	-
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Pedoman Penyusunan kebijakan tentang pelayanana publik dana tata laksana Jumlah OPD yang menerapkan sistem kebijakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur Jumlah inovasi OPD yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	4 Dokumen 54 Dokumen 10 inovasi	4 Dokumen 30 Dokumen 11 inovasi	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kepala OPD yang difasilitasi penyusunan perjanjian kinerja dengan bupati (sesuai OPD) Jumlah kali Perjanjian kinerja Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dibukukan Jumlah Penyusunan dokumen bahan evaluasi SAKIP Kabupaten (sesuai ketentuan Menpan) Jumlah OPD yang didasilitasi pelaksanaan peningkatan budaya kerja (sesuai jumah OPD) Jumlah Roadmap RB dibukukan (Sesuai Jumlah OPD) Jumlah OPD menerima reward pelaksanaan SAKIP Jumlah OPD menerima reward pelaksanaan RB Jumlah OPD menerima reward peningkatan budaya kerja	100 % 2 kali 100 % 100 % 100 % 3 OPD 3 OPD 3 OPD	100 % 2 kali 100 % 100 % 100 % 3 OPD 0 OPD 0 OPD	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang dilakukan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20 OPD	20 OPD	-	-	-
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kali Kegiatan Pimpinan Daerah yang difasilitasi Keprotokolan	720 Kali	902 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah jenis Fasilitasi Kegiatan Komunikasi Pimpinan Daerah yang dilakukan	3 Bulan	3 Bulan	-	-	-
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Pemerintahan dan Pembangunan Jumlah Layanan Iklan dan Advetorial Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	3 Kali	3 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan** **% indikator EKPPD sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan** **% Kerjasama Daerah yang difasilitasi** **% Harmonisasi Produk Hukum Daerah** **% Layanan Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi**	**96 %** **96 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**96 %** **96 %** **100 %** **100 %** **100 %**	-	-	-
				Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Laporan PPD Kabupaten tepat waktu**	**100 %**	**100 %**	**Evaluasi LPPD belum rilis dari 4 tahun lalu; manajemen Collecting data dan kualitas data dari OPD masih perlu terus ditingkatkan**	**Koordinasi dengan instansi terkait dan tetap menyusun LPPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; desk dengan petugas di Bagian Pemerintahan dan penggunaan aplikasi e-LPPD; Untuk kualitas data dilakukan rapat terbatas dengan Sekretaris Daerah terutama untuk pencapaian IKK**	-
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penataan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan	3 fasilitasi	3 fasilitasi	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Kecamatan yang dibina Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pendampingan pengelolaan anggaran Jumlah Patok Batas yang akan dibangun Jumlah Kecamatan yang dibina optimalisasi pelaksanaan PATEN Jumlah Tugu Batas Kecamatan dipelihara Jumlah Pembakuan Rupa Bumi Jumlah Pembuatan Papan Nama Jalan	27 kecamatan 4 kelurahan 80 patok 27 kecamatan 31 tugu 2 kecamatan 30 buah	27 kecamatan 4 kelurahan 0 patok 27 kecamatan 31 tugu 2 kecamatan 12 buah	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 fasilitasi	4 fasilitasi	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan keagamaan, Pendidikan, dan Kepemudaan, Kesehatan dan Kemasyarakatan**	**100 %**	**100 %**	**Jumlah pemutahiran data lembaga/ penerima bantuan secara periodik memang harus dilakukan survey ulang karena data tersebut adalah jenis data bergerak (ada perubahan baik perubahan Lembaga/ orang penerima bantuan)**	**secara periodik dilakukan survey ulang atas data awal untuk usulan penerima tahun yang akan datang. Hal ini telah difasilitasi dengan adanya aplikasi dan database sehingga diharapkan lebih mudah dalam update data ke depan**	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Penerima Bantuan Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Peserta DIklat Keagamaan Jumlah Penerima hibah uang (beasiswa santri)	11 Kegiatan 14 lembaga 1713 orang 40 Peserta 50 orang	11 Kegiatan 36 lembaga 2808 orang 0 Peserta 54 orang	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase pendampingan Hukum dan Penyusunan Produk Hukum yang terselesaikan**	**100 %**	**100 %**	**Kegiatan tidak ditemui permasalahan berarti hanya mayoritas OPD meminta output cepat selesai, karena waktu penyampaikan usulan menjelang kegiatan dilaksanakan.**	**Aplikasi permintaan penerbitan produk hukum secara online sehingga diharapkan rekam jejak pengajuan produk hukum dapat mudah dievaluasi, diharapkan lebih efisien waktu dan lebih tertib administrasi**	-
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi Produk Hukum Daerah	677 produk	623 produk	-	-	-
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Koordiansi hukum yang dilakukan Jumlah Perkara yang ditangani	8 kali 5 Perkara	9 kali 6 Perkara	-	-	-
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Referensi Hukum	4 Refererensi	3 Refererensi	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi**	**21 kerja sama**	**23 kerja sama**	**Sebagian Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh OPD tidak melalui TKKSD**	**Di akhir tahun Bagian Pemerintahan meminta data kepada OPD atas seluruh kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga. Ke depan akan dilakukan sosialisasi pelaksanaan kerja sama daerah sehingga pemahaman tentang fasililitasi kerja sama ini dapat ditingkatkan.**	-
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	21 Kerjasama	23 Kerjasama	-	-	-
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**% Fasilitasi pembinaan danpengendalian perekonomian daerah** **% Fasilitasi pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah** **% Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam** **% perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan** **Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **92,001 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	**1. Jumlah pembinaan UMKM yang sasarannya sangat banyak dan cakupan materinya luas; 2. Reguasi tentang Dana Bagi Hasil (Pajak Rokok maupun DBHCHT) sangat dinamis**	**1. Mendesain jadwal pelaksanaan kegiatan agar efektif waktu juga sasaran kegiatan; dilakukan sosialisasi terkait pembiayaan KUR dan pendataan UKM pada aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program); 2. Penyesuaian anggaran di PAK**	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina Jumlah laporan keuangan dan rencana kerja perusahaan	5 BUMD 10 Laporan	5 BUMD 10 Laporan	-	-	-
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan OPD Pengguna Dana Pajak Rokok Persentase Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok Jumlah Laporan OPD Pengguna DBHCHT Jumlah Laporan TPID Jumlah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal	2 Laporan 75 % 2 Laporan 10 Laporan 2 kali	2 Laporan 75 % 0 Laporan 10 Laporan 0 kali	2 indikator pindah ke OPD lain yaitu Jumlah Laporan OPD Pengguna DBHCHT (BAPPEDA) dan Jumlah operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal (POL PP)	di perubahan anggaran akan disesuaikan target sub kegiatan di DPPA	-
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Monev pada Pelaku Ekonomi Mikro (Pembinaan UMKM)	50 Kali	50 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan**	**100 %**	**108 %**	**1. Collecting data dari OPD membutuhkan waktu lebih lama dan Penyusunan standar membutuhkan analisis yang tepat; 2. DI dalam evaluasi TEPRA, Penyerapan OPD yang rendah atau tidak sesuai dengan rencana anggaran kas**	**1. Bagian pembangunan melakukan klarifikasi ke OPD yang bersangkutan dan dibahas bersama Tim penyusun Standar. 2.Penyusunan kebijakan "Sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran (Peraturan Bupati Nomer 84 Tahun 2020 tentang Sanksi keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Pemerintah Kabupaten Sumenep). Pada tahun 2022 telah dilakukan sanksi pemotongan tunjangan kinerja ASN pada OPD yang realisasi anggaran tidak memenuhi**	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan yang disusun	5 pedoman	4 pedoman	3 target pedoman yang tersusun tidak akan dapat dilaksanakan (pedoman APBD, SBU, Standar Barang dan Harga Satuan Barang) karena berpindah ke BPPKAD	di PAK kan disesuaikan target kinerja di DPPA	-
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah jenis Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan dan evaluasi Penyerapan Anggaran OPD (TEPRA)	12 Laporan	9 Laporan	-	-	-
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik**	**100 %**	**102 %**	**1. Pejabat Pembuat Komitmen di perangkat Daerah belum menyelesaikan proses pengadaan melalui aplikasi sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Dengan demikian, berpengaruh pada capaian Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa; 2. Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ belum memenuhi target serta Komponen Tingkat Kematangan UKPBJ juga belum terpenuhi.**	**1. Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang untuk sosialisasi dan pendampingan untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya kepada Pejabat pembuat Komitmen; 2. Penambahan SDM fungsional dan peningkatan kualitas SDM**	-
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket OPD melalui SPSE Persentase paket e-tendering dan e-purchasing terfasilitasi melalui SPSE dan Penayangan RUP oleh OPD	75 Paket 85 %	168 Paket 100 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi di LPSE Persentase Paket e-tendering dan e-purchasing yang terfasilitasi	50 OPD 90 %	57 OPD 100 %	1. Pejabat Pembuat Komitmen di perangkat Daerah belum menyelesaikan proses pengadaan melalui aplikasi sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Dengan demikian, berpengaruh pada capaian Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa; 2. Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ belum memenuhi target serta Komponen Tingkat Kematangan UKPBJ juga belum terpenuhi.	1. Langkah-langkah perbaikan akan dilakukan pada tahun mendatang untuk sosialisasi dan pendampingan untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan khususnya kepada Pejabat pembuat Komitmen; 2. Penambahan SDM fungsional dan peningkatan kualitas SDM	-
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penanganan Permasalahan pengadaan barang dan jasa Jumlah Penyusunan Kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasaa Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi Pendampingan Pengadaan Barang Jumlah Waktu Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dan Sanggah Jumlah waktu Pelayanan Konsultasi PBJ	1 Laporan 1 Pedoman 50 OPD 12 Bulan 12 Bulan	1 Laporan 1 Pedoman 51 OPD 12 Bulan 12 Bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam**	**100 %**	**100 %**	**1. Rawan terhadap permasalahan (gejolak di masyarakat); 2. Regulasi yang dinamis**	**1. Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan daerah merupakan hal yang terus ditingkatkan. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat akan dilakukan sesuai porsinya; 2. Sosialisasi regulasi terkait kepada masyarakat (penambang dan penerima manfaat SDA lainnya) serta evaluasi dan minitoring penyalur BBM, Gas dan energi terbarukan**	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah jenis pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan Pengelolaan sumber daya	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis pelaksnaan pembinaan usaha pertambangan umum	2 jenis	2 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah jenis penyalur yang dimonitoring Kuota BBM, Gas, dan Energi Baru Terbarukan	5 jenis	5 jenis	1. Rawan terhadap permasalahan (gejolak di masyarakat); 2. Regulasi yang dinamis	1. Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan daerah merupakan hal yang terus ditingkatkan. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat akan dilakukan sesuai porsinya; 2. Sosialisasi regulasi terkait kepada masyarakat (penambang dan penerima manfaat SDA lainnya) serta evaluasi dan minitoring penyalur BBM, Gas dan energi terbarukan	-
32	**SEKRETARIAT DPRD**	**SEKRETARIAT DPRD**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**98,54 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah**	**18 Dokumen**	**18 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja-RKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja-SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**82 Laporan**	**82 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Org/Bln	38 Org/Bln	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	44 Laporan	44 Laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi kepegawaian daerah**	**13 Laporan**	**13 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	85 stel	85 stel	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum perangkat daerah**	**314 Laporan**	**262 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16 Paket	16 Paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	4 Paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	267 Dokumen	214 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	28 Laporan	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**18 Unit**	**18 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	18 Unit	18 Unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg disediakan**	**42 %**	**42 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	18 Laporan	18 Laporan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**115 %**	**110 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	69 Unit	65 Unit	-	-	-
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan**	**102 %**	**82 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 Org/bln	50 Org/bln	-	-	-
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	3 paket	3 paket	-	-	-
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	29 Orang	-	-	-
				Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD yang disediakan**	**100 %**	**59,5 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	21 Laporan	20 Laporan	-	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi**	**100 %**	**89,57 %**	**-**	**-**	**-**
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi**	**100 %**	**8,5 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	100 Dokumen	100 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi**	**100 %**	**48 %**	**-**	**-**	**-**
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi**	**100 %**	**65,65 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	16 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16 Laporan	5 Laporan	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Kapasitas DPRD**	**100 %**	**83,62 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	250 Dokumen	227 Dokumen	-	-	-
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	-	-	-
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	18 Dokumen	14 Dokumen	-	-	-
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi**	**100 %**	**99,99 %**	-	-	-
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	50 Dokumen	50 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persentase dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi**	**100 %**	**94,44 %**	-	-	-
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun	48 Dokumen	46 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terfasilitasi**	**100 %**	**107,5 %**	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-
33	**PERENCANAAN**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA, dan LO) yang Disusun**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS	54 PNS	216 PNS	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteren disusun tepat waktu	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN mengikuti pelatihan**	**10 ASN**	**10 ASN**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	80 stel	80 stel	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	10 PNS	10 PNS	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	4 item	4 item	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	4 item	4 item	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor disediakan	22 item	22 item	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah buku Penggandaan yang dicetak	77 buku	77 buku	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	15 examplar	15 examplar	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	120 kali	120 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang ditata	180 meter lari	180 meter lari	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jenis Pengadaan yang dibeli**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel yang dibeli	1 item	1 item	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yang dibeli	34 item	34 item	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang yang disediakan**	**3 Unit**	**3 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	4 item	4 item	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan barang milik daerah yang disusun**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	34 jenis	34 jenis	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	46 jenis	46 jenis	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai regulasi** **Persentase Target Program Prioritas PD yang tercapai**	**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan disusun tepat waktu**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi Selaras dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah	51 SKPD	51 SKPD	-	-	-
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang menyampaikan usulan kegiatan	27 kecamatan	27 kecamatan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD dan RPJMD disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terpenuhi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	-	-	-
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan	51 SKPD	51 SKPD	-	-	-
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	-	-	-
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen relisasi hibah dan bansos yang disusun Jumlah laporan realisasi DAK	1 dokumen 4 laporan	1 dokumen 4 laporan	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun tepat waktu	1 laporan	1 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** **Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA** **Persentase Keselarasan Renja PD terhadap Renstra PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100 %** **100 %** **100 %**	**100 %** **100 %** **100 %**	-	-	-
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
34	**KEUANGAN**	**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**85 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang terverifikasi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan**	**4 Jenis**	**8 Jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	200 stel	200 stel	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 orang	5 orang	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	junmlah peserta bimbingan teknis	20 orang	20 orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**15 jenis**	**15 jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	10 jenis	10 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 unit	20 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	10 jenis 2 paket	10 jenis 2 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	100 m'	100 m'	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa yang disediakan**	**4 Jenis**	**12 Jenis**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 rekening	12 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**15 Unit**	**15 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	40 unit	40 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	20 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah**	**91 %**	**85 %**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Rencana anggaran yg disusun**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang di susun	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang di susun	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan APBD	51 Dokumen	51 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA yang selaras dengan Perubahan APBD	51 Dokumen	51 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Perda APBD yang disusun	1 Perbup 1 Perda	1 Perbup 1 Perda	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun	1 Perbup 1 Perda	1 Perbup 1 Perda	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perbup tentang Penganggaran	2 Perbup	2 Perbup	-	-	-
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggraan Pendapatan sesuai dengan Regulasi yang berlaku	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek	51 OPD	51 OPD	-	-	-
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola**	**95 %**	**95 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan pengelolaan kas daerah	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	183 Dokumen	183 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan realisasi pengeluaran dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Jumlah SP2D yang diterbitkan berdasarkan pengajuan	95 Persentase	95 Persentase	-	-	-
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan	51 OPD	51 OPD	-	-	-
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	8 Dokumen	16 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Rancangan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	51 OPD	102 OPD	-	-	-
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dikelola**	**95 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase Penyaluran Bantuan Keuangan desa sesuai dengan usulan	95 Persentase	95 Persentase	-	-	-
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Dana Darurat sesuai dengan usulan	95 Persentase	85 Persentase	-	-	-
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Dana Bagi Hasil sesuai dengan usulan	95 Persentase	35 Persentase	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**91 %**	**91 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**91 %**	**91 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Data OPD penyusun perencanaan kebutuhan barang milik Daerah	51 Dokumen	51 Dokumen	-	-	-
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen daftar aktiva tetap se kabupaten sumenep	1 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan data pengamanan aset/barang milik daerah sekabupaten sumenep	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah Dokumen data perubahan status Barang Milik	1 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah**	**2,5 %**	**2,625 %**	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**2,5 %**	**2,625 %**	-	-	-
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Penyusunan dan Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah	1 Regulasi	1 Regulasi	-	-	-
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 Kali	18 Kali	-	-	-
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak daerah Lainnya/PDL yang terupdate	7 Data Objek Pajak	8 Data Objek Pajak	-	-	-
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	jumlah Data Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang terupdate	2 Data Objek Pajak	2 Data Objek Pajak	-	-	-
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	2 Pajak Daerah	6 Pajak Daerah	-	-	-
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Jenis	10 Jenis	-	-	-
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Data Pelaporan Jenis Wajib Pajak self Assigment yang terverifikas	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Daerah yang dilakukan penagihan	10 Jenis	10 Jenis	-	-	-
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9 Kali	8 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan Wajib Pajak Daerah	24 Kegiatan	24 Kegiatan	-	-	-
35	**KEPEGAWAIAN**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**31 Jenis**	**31 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	17 jenis	17 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	75 unit	75 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	38 jenis 75 paket	38 jenis 75 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	17 jenis	17 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	113 kali	113 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jasa**	**3 Jasa**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	264 kali	264 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	7 rekening	7 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	22 orang	22 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**255 unit**	**255 unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	13 unit	13 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian**	**45 %**	**65,63 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Prosentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**90 %**	**90 %**	**Berubahnya Regulasi dari Permenpan RB**	**Menyesuaikan dengan regulasi yang ada**	**menyetujui**
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kebutuhan Formasi (CPNS dan PPPK) yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pengadaaan ASN	350 Orang	350 Orang	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diurus administrasi pemberhentiannya	350 ASN	616 ASN	Regulasi yang berubah	Menyesuaikan dengan regulasi	Menyetujui
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	40 ASN	55 ASN	-	-	-
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang di update	3 Aplikasi	3 Aplikasi	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN Yang Tersedia Datanya Update dan Valid	4500 ASN	4500 ASN	-	-	-
				Mutasi dan Promosi ASN	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**1000 ASN**	**1672 ASN**	**-**	**-**	**-**
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi	500 ASN	876 ASN	Tidak sesuai dengan target	Menyesuaikan dengan perintah Bupati Sumenep	Lanjutkan
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang terealisasi dan tepat waktu	1200 SK	764 SK	-	-	-
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karir	40 ASN	32 ASN	-	-	-
				Pengembangan Kompetensi ASN	**Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**160 ASN**	**160 ASN**	**-**	**-**	**-**
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar Yang diterbitkan	125 Dokumen	157 Dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	40 Orang	61 Orang	Banyaknya Peserta Diklat	Mengikutsertakan peserta diklat semua	Lanjutkan
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Prosentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**90 %**	**90 %**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi	8656 ASN	7820 ASN	-	-	-
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil evaluasi disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	660 ASN	579 ASN	-	-	-
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Pemberian Tanda Jasa bagi Pegawai	150 Orang		-	-	-
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN diberikan Pembinaan Disiplin	8756 ASN	8756 ASN	-	-	-
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30 Kasus	25 Kasus	-	-	-
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	30 Kasus	18 Kasus	-	-	-
				Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dilalukan Evaluasi Disiplin	39 ASN	39 ASN	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
36	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal**	**40 %**	**37,79 %**	-	-	-
				Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Data Analisa Kebutuhan Diklat dan Pengembangan Kompetensi OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Pengawas yang mengikuti Manajemen Talent	72 Orang	72 Orang	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan dan Latsar	58 ASN	58 ASN	-	-	-
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi bagi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
37	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah Laporan Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan yang di selesaikan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan**	**5 Kajian**	**5 Kajian**	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan**	**4 Kajian**	**4 Kajian**	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	-	-	-
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Kegiatan Inovasi dan Penerapan Teknologi yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Penyusunan Jurnal Penelitian Hasil Kelitbangan yang disusun	1 laporan	1 laporan	-	-	-
38	**INSPEKTORAT DAERAH**	**INSPEKTORAT**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**93 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasikinreja perangkat daerah yang tepat waktu**	**95 %**	**97 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 kali	12 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel**	**100 %**	**93 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang mempunyai keterampilan dan keahlian**	**100 %**	**52 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	72 stel	72 stel	-	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72 Dokumen	89 Dokumen	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	35 orang	46 orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**95 %**	**86 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	15 jenis	15 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 unit	20 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	15 jenis 2 paket	15 jenis 2 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20 paket	20 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	15 jenis	15 jenis	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	45 kali	45 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi**	**98 %**	**96 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase jasa penunjang yang laik fungsi**	**95 %**	**92 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	3200 kali	3199 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	4 rekening	4 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	9 orang 1 layanan	9 orang 1 layanan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase sarana dan prasarana yang laik fungsi**	**95 %**	**95 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	8 unit	8 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	65 unit	65 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan**	**100 %**	**86 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Prosentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP >= BB**	**60 %**	**51 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan Kinerja	80 Laporan	80 Laporan	-	-	-
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan Pemda	145 Laporan	145 Laporan	-	-	-
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan reviu kinerja	50 Laporan	214 Laporan	-	-	-
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu LK	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	60 Laporan	60 Laporan	-	-	-
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan telaah sejawat	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Junlah laporan monev TLHP BPK RI dan APIP	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah dan PDTT**	**77 %**	**70 %**	**-**	**-**	**-**
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah	10 Laporan	10 Laporan	-	-	-
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan PDTT	15 Laporan	15 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi**	**100 %**	**90 %**	**-**	**-**	**-**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah rumusan kebijakan teknis yang dihasilkan**	**22 laporan**	**17 laporan**	**-**	**-**	**-**
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10 Dokumen	10 Dokumen	-	-	-
				Pendampingan dan Asistensi	**Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas**	**80 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	-	-	-
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	15 Laporan	15 Laporan	-	-	-
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Laporan	20 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24 Laporan	24 Laporan	-	-	-
39	**KECAMATAN**	**KECAMATAN KOTA SUMENEP**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**73 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**85 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	48 dokumen	48 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**85 %**	**90 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**85 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	5 stel	5 stel	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	6 stel	0 stel	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	14 stel	0 stel	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	28 stel	28 stel	Salah Penempatan ARKAS pada Triwulan I sedangkan Pengesahan UP pada bulan Pebruari tidak memungkinkan dari waktu untuk direalisasikan	Akan direalisasikan pada Triwulan II	Tidak ada
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**85 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	10 jenis	8 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis	5 jenis	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 unit	10 unit	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	400 unit	400 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	16 jenis 3 paket	11 jenis 6 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	25 jenis 12 paket	24 jenis 9 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	28 jenis 3 paket	22 jenis 3 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	25 jenis 12 paket	23 jenis 9 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	3338 paket	3338 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24 paket	21 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	3 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	8 paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24 paket	20 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10001 paket	10001 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	4 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	7 kali	0 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang di adakan**	**85 %**	**79 %**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Mebel (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah mebel yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah mebel yang diadakan	5 unit	5 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah mebel yang diadakan	2 unit	0 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah mebel yang diadakan	120 unit	120 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	69 unit	0 unit	Salah Penempatan ARKAS pada Triwulan I sedangkan Pengesahan UP pada bulan Pebruari tidak memungkinkan dari waktu untuk direalisasikan	Akan direalisasikan pada Triwulan berikutnya	Tidak ada
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	8 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 unit	12 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	6 unit	6 unit	Keterlambatan Pengesahan UP	Akan di realisasikan pada Triwulan berikutnya	Tidak ada
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**85 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	2 rekening	3 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN KEPANJIN)	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	2 rekening	6 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN BANGSELOK)	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	3 rekening	9 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KELURAHAN KARANGDUAK)	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	2 rekening	6 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	2 rekening	8 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperoleh melalui jasa sewa	2 unit	6 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperoleh melalui jasa sewa	2 unit	8 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan	6 orang	24 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**85 %**	**62 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	1 unit	4 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	3 unit	0 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	8 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	9 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	6 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	16 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN PAJAGALAN)	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN BANGSELOK)	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	3 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KELURAHAN KEPANJIN)	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	3 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KELURAHAN KARANGDUAK)	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	3 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**68,36 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pemenuhan administrasi Pegawai Perangkat Daerah**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	30 stel	30 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**30 Jenis**	**30 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	50 jenis	50 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	90 unit	90 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	1881 paket	1881 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4000 paket	3666 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	13 jenis	13 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	156 kali	166 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan barang yang dibeli**	**5 Unit**	**5 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit	5 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor**	**5 Kali**	**5 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	12 kali	12 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	36 rekening	36 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Aset yang dipelihara**	**68 Unit**	**68 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	36 unit	36 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**99,94 %**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	Tidak ada masalah	Tidak ada	Tidak ada
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**Tidak ada masalah**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	19 stel	19 stel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**Tidak ada**	**Tidak ada**	**Tidak ada**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	21 jenis	21 jenis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	4 jenis 5 paket	4 jenis 5 paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	121 kali	121 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**10 Unit**	**10 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	4 unit	4 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 unit	5 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah layanan jasa yang disediakan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**30 Unit**	**31 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	14 unit	14 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	16 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**94,73 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**36 Dokumen**	**36 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun**	**20 Dokumen**	**20 Dokumen**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	14 laporan	14 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pemenuhan administrasi Pegawai Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	35 stel	35 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	16 jenis	16 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 unit	12 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	24 jenis 12 paket	24 jenis 12 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22200 paket	22200 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	246 kali	246 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jamlah Pengadaan barang yang dibeli**	**8 Unit**	**8 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	3 unit	3 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit	7 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor**	**12 Bulan**	**6 Bulan**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	36 rekening	27 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Aset yang dipelihara**	**256 M2**	**128 M2**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	6 unit	5 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	2 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	623 unit	623 unit	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerka perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi	50 orang	50 orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	9 jenis	9 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	18 unit	18 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	25 jenis 2 paket	25 jenis 2 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	135 kali	130 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan**	**6 unit**	**6 unit**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	6 unit	6 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah pemenuhan penyediaan barang milik daerah yang dipelihara**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24 rekening	24 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	8 orang	8 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah pemenuhan penyediaan barang milik daerah yang dipelihara**	**3 Unit**	**3 Unit**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**83 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan Dan Kinerja Yang Disusun**	**100 %**	**75 %**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali		-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun**	**100 %**	**76 %**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	9 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	15 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Jenis Layanan Kepegawaian Yang Dipenuhi**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	20 stel	20 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**	**100 persentase**	**70 persentase**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	140 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	122 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	786 jenis 4800 paket	593 jenis 4400 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22800 paket	16100 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis		-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	278 kali	209 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan**	**100 Persentase**	**90 Persentase**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 unit	6 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Langganan Jasa Sumber Daya Air, Llistrik Dan Komunikasi Yang Dipenuhi**	**100 Persentase**	**87 Persentase**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	16 rekening	12 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100 Persentase**	**80 Persentase**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	20 unit	15 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	4 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	195 unit	195 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN BATANG-BATANG		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**73,68 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**6 Dokumen**	**2 Dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen		-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen		-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 kali	2 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**9 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	9 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	14 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	21 stel	21 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	143 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	124 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	12 jenis 12 paket	9 jenis 9 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22800 paket	17099 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	318 kali	175 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**7 Unit**	**7 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**5 Layanan**	**4 Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	9 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**15 Unit**	**13 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5 unit	4 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	42 unit	30 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	1,7 unit	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	**100 %**	**91,48 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	6 dokumen	6 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun	**20 Dokumen**	**20 Dokumen**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	22 stel	22 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	**1 Tahun**	**12 Tahun**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	12 jenis 24 paket	12 jenis 24 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 exemplar	0 exemplar	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 kali	100 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	**3 Unit**	**3 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Buah	12 Buah	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	48 orang 12 layanan	48 orang 12 layanan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset yang dipelihara	**200 M2**	**200 M2**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	8 unit	8 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	15 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**71 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**9 dokumen**	**4 dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	9 dokumen	9 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN**	**14 bulan**	**10 bulan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**jumlah pengadaan pakaian dinas ASN**	**26 stel**	**0 stel**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	26 stel	26 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**5 Paket**	**4 Paket**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 unit	12 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	12 jenis 12 paket	12 jenis 12 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 kali	9 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**2 unit**	**2 unit**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	50 unit	50 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah layanan jasa yang disediakan**	**2 unit**	**1 unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**3 unit**	**1 unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	6 unit	6 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 unit	13 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	1 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	20 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	27 stel	27 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**21882 Jenis**	**21882 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	192 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	152 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	786 jenis 6480 paket	786 jenis 6480 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20500 paket	20500 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	240 kali	240 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**4 Unit**	**4 Unit**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	Kebutuhan mendesak	PAK Penggeseran antar Kegiatan	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**36 Layanan**	**36 Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	36 rekening	36 rekening	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**53 Unit**	**53 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	17 unit	17 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	35 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**75 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusunjumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**98 %**	**78 %**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**98 %**	**65 %**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	12 laporan	12 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**98 %**	**0 %**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	20 stel	20 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**98 %**	**62 %**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	15 jenis	15 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	10 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	12 jenis 12 paket	12 jenis 12 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	0 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	120 kali	85 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**98 %**	**0 %**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah layanan jasa yang disediakan**	**98 %**	**70 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	12 kali	12 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**98 %**	**76 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	7 unit	7 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	3 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	1 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	20 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	20 stel	20 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	192 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	152 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	786 jenis 12 paket	786 jenis 12 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20000 paket	20000 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	240 kali	240 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**1 Unit**	**1 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**2 Layanan**	**2 Layanan**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24 rekening	24 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**10 Unit**	**10 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5 unit	5 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 unit	33 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	1 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	20 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	29 stel	29 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**23660 Jenis**	**23660 Jenis**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	144 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	152 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	786 jenis 6720 paket	786 jenis 6720 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22200 paket	22200 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	318 kali	318 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**7 Unit**	**6 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	6 unit	6 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**48 Layanan**	**48 Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	48 rekening	48 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**53 Unit**	**53 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	18 unit	18 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 unit	34 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN BLUTO		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	7 dokumen	7 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun**	**20 Dokumen**	**20 Dokumen**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	15 laporan	15 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pemenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	32 stel	32 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	24 jenis	24 jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	12 jenis 24 paket	12 jenis 24 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang yang dibeli**	**6 Unit**	**6 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 unit	8 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	12 kali	12 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24 rekening	24 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan	36 orang	36 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Aset yang dipelihara**	**109 M2**	**109 M2**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	7 unit	7 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 kali	4 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	19 laporan	19 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	34 stel	34 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	192 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	152 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	762 jenis 24 paket	762 jenis 24 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2280 paket	2280 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	318 kali	318 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**7 Unit**	**7 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	4 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	36 rekening	36 rekening	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**15 Unit**	**15 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5 unit	5 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	35 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	3 laporan	3 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	25 stel	25 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	90 jenis	90 jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	12 paket	12 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	132 kali	132 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	156 m'	78 m'	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	6 unit	6 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah layanan jasa yang disediakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	248 kali	248 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	12 rekening	12 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperoleh melalui jasa sewa	71 unit	71 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	3 orang 12 layanan	12 layanan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	12 unit	12 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 unit	24 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	510 unit	510 unit	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	1 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	20 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	20 stel	20 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**24260 Jenis**	**24260 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	192 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	152 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	786 jenis 4800 paket	786 jenis 4800 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22800 paket	22800 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	256 kali	256 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**4 Unit**	**4 Unit**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	Kebutuhan mendesak	PAK Penggeseran antar Kegiatan	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	3 rekening	3 rekening	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**42 Unit**	**42 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5 unit	5 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	35 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**47,03 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**5 dok**	**3 dok**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	0 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**2 laporan**	**2 laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	24 laporan	24 laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**2 jenis**	**0 jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	17 stel	17 stel	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3 orang	3 orang	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang Dipenuhi**	**6 jenis**	**4 jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	9 jenis	10 jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	228 paket	177 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	276 kali	276 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	9 m'	9 m'	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**6 unit**	**0 unit**	-	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	3 unit	0 unit	akan dialihkan pada belanja jasa non pns	akan dilakukan pergeseran anggaran pada PAK murni	tidak ada
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	0 unit	Dalam proses mencari perbandingan harga pada penyedia	akan dilakukan realisasi pada awal semester II	tidak ada
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan**	**4 jenis**	**2 jenis**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	1000 kali	754 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	3 rekening	3 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperoleh melalui jasa sewa	25 unit	19 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	3 orang	3 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**47 unit**	**28 unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	8 unit	6 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	10 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**93,91 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**6 Dokuman**	**6 Dokuman**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**20 Jenis Laporan**	**20 Jenis Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		24 laporan	24 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**13 Jenis**	**13 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		23 stel	23 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		**6 Jenis**	**6 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		303 jenis	303 jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7968 jenis	7968 jenis	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		14998 paket	14998 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		133 kali	133 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		158 m'	158 m'	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**9 Unit**	**9 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**7 Jenis Layanan**	**7 Jenis Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		514 kali	514 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60 rekening	60 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 orang 1115 layanan	0 orang 1115 layanan	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**22 Unit**	**22 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12 unit	12 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28 unit	28 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		425 unit	425 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN PRAGAAN		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	1 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	20 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	13 stel	13 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**24260 Jenis**	**24260 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	192 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	152 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	786 jenis 5184 paket	786 jenis	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22800 paket	22800 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	318 kali	318 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**3 Unit**	**3 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	3 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**2 Layanan**	**2 Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	5 rekening	5 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**44 Unit**	**44 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	5 unit	5 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	35 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**99,83 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	28 stel	28 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	114 jenis	114 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	184 unit	184 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	686 jenis 12 paket	686 jenis 12 paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	4 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	196 kali	181 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**8 Unit**	**8 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 unit	7 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	60 rekening	60 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	7 orang	7 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**25 Unit**	**25 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	2 unit	2 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 unit	21 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Tepat Waktu**	**90 %**	**95 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun Tepat Waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun Tepat Waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun Tepat Waktu	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya ASN	12 orang	12 orang	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang Dibeli	20 stel	20 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**138 unit**	**128 unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	9 jenis	9 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang Disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 kali	90 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	7 m'	7 m'	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan**	**21 Unit**	**21 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang dibeli	13 unit	13 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	8 unit	8 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan	5 orang	5 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara**	**23 Unit**	**23 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	6 unit	6 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	14 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan Kepegawaian yang disediakan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	23 stel	23 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang dipenuhi**	**4 Unit**	**4 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	12 jenis	8 jenis	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	19 unit	19 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	1 jenis	1 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	21 kali	21 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik Daerah yang yang diadakan**			**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	1 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Layanan Jasa yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	1 rekening	1 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang Pelihara**	**4 Unit**	**3 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 unit	14 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 kali	1 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	20 laporan	20 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	20 stel	20 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**24265 Jenis**	**24265 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	192 jenis	192 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	152 unit	152 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	786 jenis 4320 paket	786 jenis 4320 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	22800 paket	22800 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	323 kali	323 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**12 Unit**	**12 Unit**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	Kebutuhan mendesak	PAK Penggeseran antar Kegiatan	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	11 unit	11 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah layanan jasa yang disediakan**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	3 rekening	3 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang dipelihara**	**50 Unit**	**50 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	18 unit	18 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit	31 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun**	**36 Dokumen**	**36 Dokumen**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	8 dokumen	8 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 kali	12 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	15 laporan	15 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pemenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	18 stel	18 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah penyediaan jasa penunjang kebutuhan kantor**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	4 jenis	4 jenis	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	17 jenis 5 paket	17 jenis 5 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	40 kali	40 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan**	**2 Unit**	**2 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli	1 unit	1 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	12 kali	12 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24 rekening	24 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan BBM Kendaraan Dinas Operasional**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	5 unit	5 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**95,32 %**	**-**	**-**	**-**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	**-**	**-**	**-**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**28 bulan**	**28 bulan**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi yang dipenuhi**	**27 persentase**	**27 persentase**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	27 stel	27 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yangdipenuhi**	**9 unit**	**9 unit**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	9 jenis	9 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 unit	20 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	27 jenis 27 paket	27 jenis 27 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	36 jenis	36 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	140 kali	140 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan**	**2 unit**	**2 unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit	2 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase layanan jasa yang disediakan**	**2 persentase**	**2 persentase**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	1200 kali	1200 kali	-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24 rekening	24 rekening	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase barang milik daerah yang dipelihara**	**4 persentase**	**4 persentase**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	4 unit	4 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	5 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit	3 unit	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**82,34 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**36 Dokumen**	**27 Dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	20 dokumen	20 dokumen	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perangkat Daerah yang disusun**	**20 Dokumen**	**15 Dokumen**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	6 laporan	6 laporan	-	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pemenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	20 stel	20 stel	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	6 jenis	6 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 unit	12 unit	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	12 jenis 1 paket	12 jenis 1 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	24 paket	24 paket	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	204 kali	204 kali	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang yang dibeli**	**6 Unit**	**6 Unit**	**-**	**-**	**-**
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibeli			-	-	-
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	2 unit	2 unit	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	4 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan Kantor**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	24 rekening	24 rekening	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Aset yang dipelihara**	**128 M2**	**128 M2**	**-**	**-**	**-**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	6 unit	6 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**60 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	12 Bulan	9 Bulan	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**100 %**	**75 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**94,2 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**12 Kali**	**12 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah kegiatan yang dilaksakan**	**13 Kali**	**13 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100 %**	**93,26 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan			-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	-	-	-
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**89,92 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**3 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	3 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**60 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**85 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 kali**	**3 kali**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	3 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 dokumen**	**50 dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	400 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**99,15 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**99 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah kegiatan yang dilaksakan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	17 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**600 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**60 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**6 Kali**	**6 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**60 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**87,63 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**500 Dokumen**	**500 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN SARONGGI		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**160 dokumen**	**160 dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	160 dokumen	160 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**60 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**50 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi dan Pembinaan yang dilakukan**	**36 kali**	**18 kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	36 Kali	26 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen Rekomendasi PATEN**	**350 dok**	**121 dok**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	350 dokumen	279 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**99,99 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**60 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	80 dokumen	80 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**60 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN AMBUNTEN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**300 Dokumen**	**300 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	300 dokumen	300 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**90 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan**	**500 Dokumen**	**500 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	-	-	-
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**60 Dokumen**	**60 Dokumen**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	500 dokumen	500 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah dokumen yang dikeluarkan**	**450 Dokumen**	**450 Dokumen**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	450 dokumen	450 dokumen	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan**	**100 %**	**99,82 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**4 Kali**	**4 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi perencanaan yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**20 Desa**	**20 Desa**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	20 Desa	20 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**10 Lembaga**	**10 Lembaga**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**14 Kali**	**14 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	14 Desa	14 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**15 Lembaga**	**15 Lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**20 kali**	**20 kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	20 Desa	20 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	24 Kali	24 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**1 Kali**	**1 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**9 Lembaga**	**9 Lembaga**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	12 Kali	12 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi		0 Kelompok/Lembaga	Kebutuhan mendesak	PAK Penggeseran antar Kegiatan	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**56,64 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pendampingan dan fasiltasi perencanaan pembangunan desa**	**12 kali**	**12 kali**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	12 Desa	12 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga kemasyarakatan**	**12 kali**	**6 kali**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	12 Kali	9 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	7 Kelompok/Lembaga	6 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**14 Kali**	**14 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	14 Desa	14 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**15 Lembaga**	**15 Lembaga**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**1 Kali**	**1 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		14 Desa	14 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**29 Lembaga**	**29 Lembaga**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		6 Kali	6 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		14 Kelompok/Lembaga	14 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Pelaksanaan Pemberdaryaan Desa yang Dilaksanakan**	**13 Kali**	**13 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	15 Desa	15 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**90 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan**	**80 %**	**100 %**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	20 Kelompok	20 Kelompok	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**85 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**15 Desa**	**15 Desa**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	15 Desa	15 Desa	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi/bintek kegiatan pemberdayaan masyarakat	60 Orang	60 Orang	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	15 Kali	15 Kali	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**1 Kali**	**1 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	4 Desa	4 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**13 Lembaga**	**13 Lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	4 Kelompok/Lembaga	4 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**11 Desa**	**11 Desa**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang duberdayakan**	**9 Lembaga**	**9 Lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	11 Kali	11 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	11 Kelompok/Lembaga	11 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**99,94 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan**	**1 Laporan**		-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	9 Desa	9 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**9 Desa**	**9 Desa**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	1 Kelompok/Lembaga	1 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan**	**100 %**	**94,26 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	1 Desa	1 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Prosentase rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**7 persentase**	**7 persentase**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	7 Kali	7 Kali	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**65 %**	**-**	**-**	**-**
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan**	**100 %**	**65 %**	**-**	**-**	**-**
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN PAJAGALAN)	tanaman yang dibutuhkan Jumlah bahan bangunan kampung berhias yang disediakan Jumlah modal tanaman Jumlah ongkos tukang Jumlah pembangunan jalan umum (PJU) Jumlah pembangunan pemakaman/kuburan yang dibangun Jumlah pembangunan & perbaikan jalan paving stone yang dibangun Jumlah pembuatan plat beton yang dibangun Jumlah pembuatan sumur resapan yang dibangun Jumlah pemeliharaan/pembangunan saluran air/selokan	1 Item 6 Item 1 Item 6 Item 2 Lokasi 5 Lokasi	1 Item 12 Item 1 Item 8 Item 0 Lokasi 2 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 5 Lokasi	-	-	-
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEPANJIN)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	65 %	-	-	-
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANGDUAK)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100 %	58 %	-	-	-
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BANGSELOK)	Peningkatan Sarana Prasarana di Kelurahan	12 Bulan	10 Bulan	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEPANJIN)	Persentase Pemenuhan pemberdayaan Masyarakat	100 %	92 %	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANGDUAK)	Persentase Pemenuhan pemberdayaan Masyarakat	100 %	63 %	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN PAJAGALAN)	Jumlah Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BANGSELOK)	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan	10 Bulan	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**7 Kali**	**7 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	7 Desa	7 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	7 Kelompok/Lembaga	7 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**99,98 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**8 Kali**	**8 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**100 %**	**99,98 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pendampingan dan fasiltasi perencanaan pembangunan desa	**11 Desa**	**11 Desa**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	16 Kali	16 Kali	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**12 kali**	**12 kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi/bintek kegiatan pemberdayaan masyarakat	11 Orang	8 Orang	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah laporan pelaksanaan lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**3 kali**	**3 kali**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	3 Kali	3 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	3 Kelompok/Lembaga	3 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**70 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**15 kali**	**15 kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	15 Desa	15 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**16 lembaga**	**12 lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	6 Kali	5 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	15 Kelompok/Lembaga		-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**68,97 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**16 Kali**	**0 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	16 Desa	0 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**17 Lembaga**	**14 Lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	6 Kali	5 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	16 Kelompok/Lembaga	16 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**99,84 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**14 Desa**	**14 Desa**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	14 Desa	14 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**99 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	17 Desa	17 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	17 Kelompok/Lembaga	17 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**1 Kali**	**1 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**13 Lembaga**	**13 Lembaga**	**-**	**-**	**-**
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	10 Kelompok/Lembaga	10 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**98 %**	**80 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**98 %**	**63 %**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi/bintek kegiatan pemberdayaan masyarakat	50 Orang	50 Orang	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**98 %**	**98 %**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**9 Kali**	**9 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	9 Desa	9 Desa	-	-	-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**9 Lembaga**	**9 Lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi	9 Kelompok/Lembaga	9 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**1 Kali**	**1 Kali**	-	-	-
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	19 Desa	19 Desa	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan**	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	-	-	-
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi		0 Kelompok/Lembaga	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**0 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**12 Laporan**		-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**13 Kali**	**13 Kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**14 kali**	**14 kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**13 Kali**	**13 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**51,25 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah kegiatan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	9 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan	12 Bulan	9 Bulan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan	1 Bulan	3 Bulan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN KALIANGET		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**86,47 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**13 Kali**	**13 Kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	**100 %**	**90,7 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi ketentraman dan ketertiban umum	**2 Kali**	**2 Kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0 Laporan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN RUBARU		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**12 kali**	**12 kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**82 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**13 kali**	**7 kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	6 Kali	4 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**86,09 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**16 Kali**	**12 Kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	6 Kali	5 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN GANDING		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**99,99 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**13 Kali**	**13 Kali**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**83,53 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan**	**100 %**	**76 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah pelaksanaan pemberdaryaan desa yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**1 kegiatan**	-	-	-
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa	4 Kali	4 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kelompok usaha yang difasilitasi**	**7 Kali**	**7 Kali**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**99,98 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**13 Kali**	**13 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**8 Kali**	**8 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	7 Kali	7 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**90 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**3 Kali**	**3 Kali**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**15 Kali**	**11 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**15 Kali**	**15 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**3 Kali**	**3 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**99,92 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**99,99 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Dokumen Perencanaan Dan Kinerja Yang Disusun**	**98 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**7 Kali**	**7 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**13 Kali**	**9 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rakor forkopimcam yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**76,4 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**13 Kali**	**13 Kali**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**3 Kali**	**3 Kali**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Kali	12 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN MANDING		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	**100 %**	**75 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	**1 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	16 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**0 %**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM di hapus dikarenakan program tidak terlaksana sehingga anggaran di PAK ke kegiatan Lain**	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**100 %**	**0 %**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di hapus dikarenakan program tidak terlaksana sehingga anggaran di PAK ke kegiatan Lain** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di hapus dikarenakan program tidak terlaksana sehingga anggaran di PAK ke kegiatan Lain**	- -	- -

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dihapus karena tidak terlaksana akibat terjadinya perubahan kebijakan	-	-
		KECAMATAN DASUK		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100 %**	**80 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**8 kali**	**6 kali**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Kali	9 Kali	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**45,62 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**8 Kali**	**6 Kali**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	8 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	10 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**50 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**14 Kali**	**14 Kali**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	**-**
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kebutuhan mendesak	PAK Penggeseran antar Kegiatan	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**17 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**98 %**	**17 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi	2 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**45,05 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**8 Kali**	**8 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**46,29 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**14 Kali**	**10 Kali**	**-**	**-**	**-**
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN BLUTO		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**8 Kali**	**8 Kali**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**		-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**3 kali**		-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	3 Kegiatan		-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**13 Kali**	**13 Kali**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**25,42 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**3 kegiatan**	**1 kegiatan**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	9 Kali	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**0 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**8 Kali**	**0 Kali**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**14 Kali**	**14 Kali**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**		-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**1 Kegiatan**		-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi	45 Orang		-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**90 %**	**100 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**80 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**2 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	-	-	-
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**14 Kali**	**14 Kali**	**Kebutuhan mendesak**	**PAK Penggeseran antar Kegiatan**	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kebutuhan mendesak	PAK Penggeseran antar Kegiatan	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**66,67 %**	**Capaian tidak sesuai targer karena terjadi PAK**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**3 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan		0 Kegiatan	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi	20 Orang	20 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	-	-	-
		KECAMATAN BATUAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi	60 Orang	60 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**100 %**	**99,97 %**	-	-	-
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**	**3 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	-	-	-
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi	27 Orang	27 Orang	-	-	-
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor Forkopimcam yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	-	-	-
		KECAMATAN KOTA SUMENEP		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah ASN yang melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	9 ASN	36 ASN	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbangcam	16 Kelurahan/ desa	32 Kelurahan/desa	-	-	-
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pendampingan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
		KECAMATAN KALIANGET		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Desa	7 Desa	-	-	-
		KECAMATAN TALANGO		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**90,93 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**90,93 %**	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	8 desa	8 desa	-	-	-
		KECAMATAN MANDING		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**42,14 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**11 Desa**	**6 Desa**	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	11 Desa	0 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	11 desa	6 desa	-	-	-
		KECAMATAN RUBARU		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**5 Orang**	**5 Orang**	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnya	11 Desa	11 Desa	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah ASN yang melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	4 ASN	4 ASN	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 kali/buah	1 kali/buah	-	-	-
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
		KECAMATAN DASUK		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**75 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**70 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	15 Desa	15 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	15 kali/buah		-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	15 desa	8 desa	-	-	-
		KECAMATAN BATANG-BATANG		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**67,34 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	16 Desa	16 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	16 kali/buah	0 kali/buah	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	16 desa	12 desa	-	-	-
		KECAMATAN BATUPUTIH		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100,01 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**4 Kali**	**3 Kali**	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Desa	14 Desa	-	-	-
		KECAMATAN GAPURA		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**140 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada BPD	1 kali	1 kali	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	17 Desa	17 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	34 desa	34 desa	-	-	-
		KECAMATAN GAYAM		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	10 kali/buah	10 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	10 desa	10 desa	-	-	-
		KECAMATAN NONGGUNONG		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**64 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**98 %**	**64 %**	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnya	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah ASN yang melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	3 ASN	3 ASN	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	8 Orang	8 Orang	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi tugas, fungsi dan kewajibannya	10 Lembaga	10 Lembaga	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	8 desa	8 desa	-	-	-
		KECAMATAN RAAS		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**85,13 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	9 Desa	9 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	9 kali/buah	9 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	9 desa	9 desa	-	-	-
		KECAMATAN ARJASA		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**78,64 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	19 Desa	19 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	19 kali/buah	19 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	19 desa	19 desa	-	-	-
		KECAMATAN BLUTO		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**10,34 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**20 Desa**	**20 Desa**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnya	20 Desa	20 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Desa	20 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-
		KECAMATAN SARONGGI		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	14 Desa	14 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	14 kali/buah	14 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	14 desa	14 desa	-	-	-
		KECAMATAN LENTENG		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Desa	20 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	60 Orang	60 Orang	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	20 Desa	20 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	20 kali/buah	20 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	20 desa	20 desa	-	-	-
		KECAMATAN GILIGENTING		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	8 Desa	8 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	8 kali/buah	8 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	8 desa	8 desa	-	-	-
		KECAMATAN GULUK-GULUK		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**35,77 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Kegiatan Pendampingan, Monev dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8 kegiatan**	**4 kegiatan**	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Desa	9 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	12 Orang	12 Orang	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	12 Desa	12 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 kali/buah	0 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	12 desa	9 desa	-	-	-
		KECAMATAN GANDING		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**102,42 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Desa	1 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	14 Orang	14 Orang	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	1 Desa	14 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	8 kali/buah	8 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	14 desa	14 desa	-	-	-
		KECAMATAN PRAGAAN		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**-**	**-**	**-**
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	14 Desa	14 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	14 kali/buah	14 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	14 desa	14 desa	-	-	-
		KECAMATAN AMBUNTEN		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	15 Desa	-	-	-
		KECAMATAN PASONGSONGAN		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**90 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan**	**90 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnya	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi	10 Desa	10 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	10 Bumdes	10 Bumdes	-	-	-
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	10 Desa	-	-	-
		KECAMATAN DUNGKEK		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**100 %**	**65 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnya	15 Desa	15 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah ASN yang melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	2 ASN	2 ASN	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Desa	15 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	15 desa	15 desa	-	-	-
		KECAMATAN MASALEMBU		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	4 Desa	4 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	4 kali/buah	4 kali/buah	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	4 desa	4 desa	-	-	-
		KECAMATAN SAPEKEN		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**11 Desa**	**11 Desa**	-	-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Desa	11 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	22 Orang	22 Orang	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	11 desa	11 desa	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
		KECAMATAN BATUAN		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**100 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**4 Prosentase**	**4 Prosentase**	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnya	7 Desa	7 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah ASN yang melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	12 ASN	12 ASN	-	-	-
		KECAMATAN KANGAYAN		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan**	**100 %**	**99,93 %**	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan**	**9 Desa**	**6 Desa**	-	-	-
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang Diberikan Fasilitasi	27 Orang	27 Orang	-	-	-
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbangcam	9 Desa	9 Desa	-	-	-
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	9 desa	9 desa	-	-	-
40	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**91,79 %**	-	-	-
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang di susun**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen**	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	3 laporan	3 laporan	-	-	-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 kali	3 kali	-	-	-
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan (Neraca, LRA dan LO) yang di susun**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 unit	2 unit	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan jumlah makan dan minum yang disediakan	20 jenis 1 paket	20 jenis 1 paket	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	40 paket	40 paket	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	38 kali	38 kali	-	-	-
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip yang dikelola	40 m'		-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Peggadaan yang di beli**	**5 Unit**	**5 Unit**	-	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	6 unit	6 unit	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang yang di sediakan**	**4 Orang**	**4 Orang**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pengantar surat	2000 kali		-	-	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	2 rekening	2 rekening	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga outsorching yang disediakan jumlah pelayanan adminduk	13 orang	13 orang	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**20 Unit**	**20 Unit**	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	13 unit	13 unit	-	-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	4 unit	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	-	-	-
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**93,25 %**	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan peraturan yang berlaku**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Forpimda yang Disusun	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdaftar**	**100 %**	**94,82 %**	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik sesuai peraturan yang berlaku**	**1 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan	10 Partai Politik	10 Partai Politik	-	-	-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Organisasi Masyarakat yang di Berdayakan**	**100 %**	**94,38 %**	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai peraturan yang berlaku**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan	120 Ormas	120 Ormas	-	-	-
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan	10 Partai Politik	10 Partai Politik	-	-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase Forum Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Terfasilitasi**	**100 %**	**95,73 %**	-	-	-

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan yang berlaku**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	-	-	-
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah pelaksanaan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 FKUB	1 FKUB	-	-	-
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	1 Rehabilitasi Narkoba	1 Rehabilitasi Narkoba	-	-	-
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Penanganan Konflik Sosial**	**100 %**	**93,18 %**	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah laporan Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	-	-	-
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Forpimda	12 Kegiatan	12 Kegiatan	-	-	-

3.3. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan Strategis yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10,
Kebijakan Strategis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penerapan Pelayanan Kepegawaian berbasis Elektronik	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan cara melakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			teknologi informasi yang berbasis komputer
	Peningkatan Kompetensi Pegawai ASN melalui kegiatan Assesment, Ujian Dinas, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI), Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pola Karier Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
	Pemberlakuan Sistem Remunerasi **(Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)**	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.	Sebagai dasar Pemberian Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
2	Penyusunan, Pembahasan, Harmonisasi Perda Baru Perlindungan dan Pemberdayaan Petani **(Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)**	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau	Meminimalisir permasalahan yang setiap tahun selalu menjadi polemik bagi masyarakat /petani terutama masalah Tembakau di Sumenep
3	Mengembangkan fasilitas pelayanan yang berorientasi pada kemudahan akses layanan melalui aplikasi	1. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep 3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumenep	Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap kepuasan konsumen serta Meningkatkan pelayanan melalui pelayanan OSS
	Mewujudkan perluasan jejaring informasi lowongan kerja di berbagai media	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2022	Kurangnya informasi pengetahuan lowongan kerja yang tersebar di masyarakat yang menyebabkan kurang masksimalnya terserapnya angkatan kerja di masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	
	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, capat, mudah dan terukur agar tercapai kepuasan masyarakat / pengguna layanan	Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/445/KEP/435.013/2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Sumenep	Standar Pelayanan Publik Per Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Sumenep
	Mewujudkan pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan potensi investasi daerah **(Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja)**	Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	1. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunikasi digitalisasi 2. Mengembangkan Potensi Investasi Daerah
4	Penyusunan rencana pembangunan tahunan **daerah (Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang)**	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
5	Penguatan UMKM, Pertanian dan Industri Olahan Perikanan sebagai Daya Tarik Investasi Daerah untuk Mengakselerasi Pertumbuhan **(Dinas Perikanan)**	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026	Arah kebijakan Dinas Perikanan memprioritaskan pemberdayaan dan perlindungan pelaku usahan dan kelompok perikanan serta meningkatkan produksi perikanan dalam rangka pemenuhan bahan baku dan konsumsi ikan masyarakat. Disamping itu meningkatkan pengawasan, evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan daya saing produk perikanan
6	Mengembangkan pemasaran potensi pariwisata daerah dan Mempromosikan potensi	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan	semakin banyaknya destinasi wisata yang mulai dikelola secara baik oleh masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	wisata daerah **(Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)**	Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025	dan meningkatnya jumlah wisatawan
7	Kebijakan Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD **(Sekreatriat DPRD)**	PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak-hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD	Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat terhadap DPRD diperlukan guna menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti penyampaian saran dan pendapat yang disampaikan kepada DPRD Sumenep dalam hal ini Sekretariat DPRD memfasilitasi pertemuan dan dialog antara elemen masyarakat dengan Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Sumenep
8	Peraturan Bupati Nomor: 81 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara	Permendagri No 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Memberikan pedoman tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
	Penyusunan Standar Satuan Harga Upah Tenaga Kerja dan Bahan; Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022 (Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Bupati Sumenep Nomor 10 Tahun 2022)	PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden No. 33 tahun 2022 tentang Standar harga Regional; Permendagri No. 64 tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 21	Untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dengan demikian, OPD memiliki standar yang sama
	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 79 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Sumenep	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026	Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai tujuan organisasi

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik; Permenpan dan RB Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah Pemerintah	Memberikan acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Hari dan Jam Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep **(Sekretariat Daerah)**	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor: 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Memberikan standar/ acuan jam kerja dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
9	Mengembangkan Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan, Perbup Sumenep Nomor 188/361/KEP/435.103/2020 tentang Lokasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Wilayah Perkotaan	Pengelolaan dan pengembangan fasilitas Perumahan dan permukiman kumuh
	Mengembangkan Upaya Peningkatan Pembangunan Rumah Layak Huni	Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan	Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau
	Mengembangkan upaya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Perda Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penataan Perumahan	Pemenuhan kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
	Mengembangkan upaya Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Perda Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kota Sumenep Tahun 2014-2034	Penyelesaian kasus sengketa status tanah pemerintah dan masyarakat atas kepastian status hokum
	Mewujudkan Pembangunan Sarana	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49	Pemenuhan kelengkapan fasilitas

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Lalu Lintas dan Angkutan	Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan	jalan dan penyediaan angkutan umum yang memadai
	Mengembangkan Fungsi dan Efektifitas Sarana serta Sistem Konektivitas dan Mode Transportasi **(Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan)**	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan	Pemenuhan Kebutuhan aksesibilitas jaringan transportasi antara kepulauan dan daratan
10	Meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana **(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)**	Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep	Rendahnya tingkat kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana
11	Melakukan Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2	Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 dalam Rangka Penangan Piutang Pajak Daerah Dan Dampak ekonomi Akibat Wabah Corona Virus di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022	Menyelesaikan Piutang pada Pajak Daerah PBB-P2
	Melakukan pemutakhiran data dan pengkajian berkenaan potensi penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah	Memutakhirkan Data Desa Kabupaten Sumenep yang belum BerSISMIOP
	Melakukan inovasi dalam rangka optimalisasi terhadap potensi penerimaan pendapatan daerah **(Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)**	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah	Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Rangka Pembayaran Online System dengan beberapa penyedia diantaranya PT.POS Indonesia, Tokopedia, OVO, Indomaret, Alfamart sehingga Wajib Pajak

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			dimudahkan dalam melakukan Pembayaran
12	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta Gizi Masyarakat serta peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular **(Dinas Kesehatan)**	Peraturan Bupati Sumenep No 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
13	Meningkatkan pelayanan dasar PMKS bagi masyarakat kurang mampu	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Meningkatkan kualitas program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS **(Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak)**	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Menjamin kebutuhan hidup dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak produktif seperti Penyandang DIsabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar
14	Pembangunan Portal Parkir Otomatis di Pasar Anom Baru	Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha	Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan: a. Menertibkan pengelolaan parkir di pasar rakyat; b. Memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar; c. Meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan retribusi parkir pasar; d. Mendorong pengelolaan pasar rakyat yang lebih professional dan berdaya saing.
	Pembangunan KIHT di Kecamatan Guluk-guluk **(Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)**	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 dan 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan DBHCHT	Kebijakan ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut : a. Mengurangi peredaran rokok illegal di Kabupaten Sumenep

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			b. Melakukan pembinaan terhadap Industri Hasil Tembakau Ilegal yang ada agar mau untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah c. Memudahkan pemerintah dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap IHT d. Meningkatkan perekonomian daerah dengan dibentuknya kawasan industri baru
15	Penegakan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	a. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum b. Peraturan Bupati Sumenep No. 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep	Untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran peraturan Daerah
	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan informasi Barang Kena Cukai Ilegal meliputi hasil tembakau	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Melakukan pengumpulan informasi terkait dengan cukai ilegal (rokok) di warung-warung di kab. Sumenep serta melaporkan hasil tersebut kepada pihak bea cukai
	Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan cukai illegal **(Satuan Polisi Pamong Praja)**	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Pemahaman kepada masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai

3.4. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumenep merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati

Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2021, yang secara resmi disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi yaitu pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. LKPJ berisi tentang laporan atas implementasi Kebijakan Pembangunan dan Keuangan yang sudah ditetapkan, maupun disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD yang dituangkan dalam dokumen RKPD, KUA PPAS dan APBD Tahun 2021.

LKPJ disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep selama satu tahun anggaran yaitu 2021. Dengan disusunya LKPJ, masyarakat diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan, berikut dengan hasil-hasil yang dicapai dan didukung dengan data-data yang riil, Update dan layak dipercaya.

Adapun beberapa catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep yang harus tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap hasil rekomendasi yang diberikan pada tahun anggaran 2021 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3.11

Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2021

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Merekomendasikan kepada seluruh pihak yang berwenang untuk segera menutup aktifitas industry tambak udang yang tidak memenuhi syarat **(Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja)**	Ditindak lanjuti dengan menetapkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/176/KEP/435.013/2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Perizinan Kabupaten Sumenep	Untuk menyeimbangkan ekosistem dan stabilitas kelangsungan investasi
2	Penghentian seluruh penambangan Phospat di Kabupaten Sumenep	Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033	Penambangan Mineral Phosfat yang berizin, sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan kawasan Karst
	Kepada seluruh pihak yang berwenang untuk	• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin	Kepada pelaku usaha / kegiatan tambak udang pada

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	segera menutup aktifitas industri tambak udang **(Dinas Lingkungan Hidup)**	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.757.400,-	saat memulai usahanya agar membuat dokumen lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di tempat usahanya
3	Sajian data untuk jembatan di kepulauan yang dalam kondisi baik sebagaimana yang tertuang dalam Nota Bupati perlu untuk ditinjau ulang serta dilakukan survey lebih detail yang dapat dipertanggung jawabkan secara tehnis. Fakta dilapangan mayoritas sudah melebihi umur dari umur tehnis bangunan dan secara konstruksi sudah tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang melewati jembatan yang ada. Untuk itu pansus melalui dinas terkait merekomendasikan dilakukan penganggaran perbaikan jembatan yang sudah udzur. Sehingga yang tertuang dan menjadi visi misi Bupati bias terwujud dengan baik dan dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan tidak hanya sekedar lips service.	Dinas PUTR mengapresiasi positif atas rekomendasi DPRD dan tindaklanjutnya adalah dengan melaksanakan survey kondisi Jembatan secara berkala dan berkelanjutan. Sehingga dapat diketahui lebih awal kebutuhan anggaran dan lokasi yang diperlu diprioritaskan pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun berikutnya Pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan dapat dilaksanakan lebih awal karena Perencanaan Teknisnya sudah tuntas. Sehingga hasil pekerjaan akan selesai sebelum akhir tahun anggaran	Percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan upaya untuk meminimalkan disparitas pembangunan infrstruktur di daratan dan kepulauan.
	Permasalahan banjir di tahun 2021 semakin menjadi-jadi	Untuk permasalahan bajir Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang telah melakukan evaluasi pada	Penambahan Anggaran melalui sumber dana

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	dan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang menyeluruh untuk segera dilakukan perbaikan sistem hidrolik saluran pembuang air di daerah perkotaan **(Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang)**	sistem pengelolaan drainase yang ada dan kami telah menganggarkan kegiatan pengembangan,pengelolaan dan pembangunan sistem drainase perkotaan yang nantinya diharapkan bisa memperbaiki sistem drainase di daerah perkotaan.	alternatif untuk mepercepat pembangunan infrastruktur
4	Segera dibuatkan peraturan daerah tentang keris	Pada tahun anggaran 2023 sudah diagendakan untuk disusun peraturan daerah tentang keris	Semakin menguatkan branding Kab. Sumenep sebagai kota keris
	Kepala dinas hendaknya harus punya program yang jelas dan terukur dalam mengembangkan dan memberdayakan kesenian/ kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Priwisata Kab. Sumenep pada tahun 2023 akan melakukan Revisi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Sumenep (RIPKD) yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan kesenian/kebudayaan	Adanya kesatuan visi dan komitmen dari para stake holder terhadap pengembangan dan pemberdayaan kesenian / kebudayaan lokal di sumenep
	Dinas Budaya pariwisata harus mendasarkan penyusunan programnya berdasarkan kajian yang komprehensif **(Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata)**	Setiap penyusunan program dan kegiatan, Dinas selalu berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RPJMD, Rencana Strategis dan rencana Kerja	Keselarasan program dan kegiatan yang disusun dengan visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahunan
5	Banyak keluhan tentang PJU yang sudah mati, namun penanganan pemeliharaannya begitu lambat, bahkan tidak ada. Masyarakat berkali-kali menyampaikan aduan langsung terutama di daerah-daerah rawan kejahatan, namun yang ada hanya janji-janji untuk segera ditangani tapi tidak segera ditangani. Kepala Dinas Perkimhub menjelaskan bahwa hal ini meminimalkan biaya tagihan listrik.	- Pada tahun 2021 sudah ditindaklanjuti dengan melakukan studi banding ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan PJU namun disana hanya melakukan pengelolaan PJU di perkotaan - Pihak ketiga yang mau menangani pengelolaan PJU sudah melakukan presentasi kontrak namun setelah pihak ketiga melakukan survey lapangan hasilnya tidak sesuai dengan kontrak yang ditawarkan - Pada tahun 2022 kembali melaksanakan koordinasi dan studi ke Pemerintah Kabupaten Madiun terkait pelaksanaan pemeliharaan PJU yang di pihakketigakan. Namun, tidak	Pemeliharaan PJU selesai tepat waktu di tahun 2022

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Hal ini menimbulkan banyak penafsiran untuk apa pengadaan PJU jika kemudian pada akhirnya juga harus tetap gelap. Pansus menginginkan segera dilakukan sebuah langkah konkret dalam pemeliharaan PJU yang sudah ada ini. Maka, pada kesempatan kali ini Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pemeliharaan PJU di Kabupaten Sumenep pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. **(Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan)**	menutup kemungkinan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun berikutnya akan melaksanakan hal serupa karena terkait regulasinya yang masih dikaji. - Pemeliharaan PJU yang tidak selesai di tahun 2021 dilanjutkan kembali di tahun 2022 pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran Rp. 1.492.272.380	
6	Permasalahan fasilitas sekolah yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, namun hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi focus utama Pemerintah	Program Pengelolaan Pendidikan/ Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; dan Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Tahun 2022 telah diserahkan hibah barang TIK kepada 145 lembaga SDN dan 115 paket TIK kepada SMPN
	Perlu adanya koreksi atau perbaikan dalam prasyarat calon penerima beasiswa dengan mengedepankan bantuan untuk siswa tidak mampu	Dinas Pendidikan tidak ada program beasiswa, yang ada Program Indonesia Pintar (PIP)	Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program Kemedikbud berupa uang tunai untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. PIP disalurkan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar)
	Seleksi DPKS Tahun 2021 perlu dipertimbangkan untuk keterwakilan perempuan	Menjadi bahan pertimbangan untuk rekrutmen DPKS yang akan datang	Keterwakilan Perempuan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Untuk mengoptimalkan kinerja guru pengajar diperlukan pemetaan dan penataan penempatan guru mengajar yang harus disesuaikan antara jarak domisili dengan lokasi sekolah tanpa mengabaikan regulasi yang ada. Untuk itu Pansus juga merekomendasikan kepada guru pengajar yang sering bolos untuk dilakukan pembinaan dan pemberian **sanksi berupa pemecatan**	Pemetaan guru didasarkan atas pemenuhan jam mengajar yaitu jumlah kelas bagi guru kelas dan jumlah jam (24 jam) bagi guru Mapel. Domisili/alamat tempat tinggal guru banyak berasal dari kecamatan Kota Kalianget, dan Saronggi. Sementara kebutuhan guru pada Kecamatan tersebut sudah terpenuhi atas dasar jarak tempat tinggal. Pemerataan guru pada lokasi pinggiran/kepulauan disebabkan sedikitnya jumlah guru yang berdomisili pada Kecamatan tersebut. Alternatif : Perlu regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbub) untuk mengatasi pemenuhan guru pada daerah terpencil atau kepulauan. Guru yang melalukan pelanggaran indisipliner atau pelanggaran kode etik sudah diproses sesuai mekanisme yang ada, hukuman disiplin sudah sesuai dengan tingkat pelanggaran, dasar hukum sesuai dengan PP 94 tahun 2021	Pemerataan pendidik khususnya daerah terpencil atau kepulauan Pelanggaran indisipliner atau pelanggaran kode etik
	Masih ditemukan adanya sekolah yang jumlah muridnya tidak mencapai jumlah yang dipersyaratkan dan ini tidak ada langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk dilakukan **regrouping**	Dinas Pendidikan tetap memonitoring dan mengevaluasi keberlangsungan Lembaga sekolah baik Negeri maupun Swasta. Terdapat 32 SD yang ditutup dan 12 SD yang digabung	Untuk mencapai jumlah murid yang dipersyaratkan, penutupan SD berdasarkan SK Bupati Sumenep tentang Penutupan SD Nomor 188/411/KEP/435.013/2022 tanggal 15 November 2022 Dan SK Bupati Sumenep tentang Penggabungan SD, Nomor 188/421/KEP/435.013/2022 tanggal 17 November 2022
	Meminta kepada Dinas untuk bekerja keras dalam memahami karakter, etos kerja, dan kultur dunia Pendidikan. Hal tersebut didasarkan pada pentingnya dunia Pendidikan terhadap pembentukan karakter peserta didik	Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan : a. Meningkatkan fungsi Sekolah Penggerak (PSP) b. Memotivasi guru untuk mengikuti Pendidikan Guru Penggerak (PGP) c. Meningkatkan Fungsi IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) d. Memotivasi memantau guru dalam optimaliasasi akun belajar.id dalam pemanfaatan PMM (Paltform Merdeka Mengajar) Semua program diatas mengarah pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan amanah Undang-Undang Pendidikan.	Pembentukan karakter peserta didik

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Mendorong dinas Pendidikan untuk mewajibkan muatan local dengan pemahaman yang lebih luas di satuan Pendidikan (SD, SMP) guna membekali peserta didik dengan kearifan lokal	Program Pengembangan Kurikulum/ Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/ Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tahun 2023 sudah dianggarkan dan akan dilaksanakan Muatan Lokal
	Merekomendasi untuk mereview Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Pendidikan sudah mengajukan Review Perda No. 7 Tahun 2013 pada tahun 2022 melalui usulan Propemperda, namun saat rapat koordinasi Propemperda di Pemda, Dinas Pendidikan harus menyiapkan naskah akademik dan draft Perda perubahan tsb. Namun dokumen tsb belum ada, dikarenakan proses tsb membutuhkan biaya.	Review Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
	Mendorong dan mendukung Bupati untuk menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya	Yang akan dilakukan antara lain : a. Penempatan tenaga sesuai dengan kompetensi di bidang Pendidikan dilakukan dengan cara menugaskan Guru Penggerak pada satuan Pendidikan yang di prediksi dapat terjadi pengimbasan bagi sekolah terdekat b. Memotivasi dan pembinaaan terhadap guru untuk melakukan peningkatan kemampuan melalui PMM, komunitas belajar dan PGP c. Meningkatkan fungsi komunitas belajar sebagai sarana komunikasi dan publikasi, inovasi, literasi dan pengembangan profesi di bidang pendidikan Melakukan study komparatif tentang kebijakan baru program pendidikan baru dan arah kebijakan pendidikan baik dengan pemangku kepoentingan maupun organisasi vertikal	Profesionalisme pegawai khususnya Pendidik
	Mendorong Dinas Pendidikan untuk bekerja sama secara intensif dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam menciptakan generasi muda sadar lingkungan. Dalam hal ini bagaimana mengakselerasi	Sudah dilaksanakan koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan status sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten untuk diikutkan dalam kompetisi sekolah adiwiyata tingkat Provinsi; ada 19 sekolah (SD dan SMP) yang didaftarkan untuk diikutkan dalam sekolah adiwiyata tingkat Provinsi	Peningkatan status sekolah Adiwiyata dalam penyertaan Lembaga SD dan SMP dalam Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	sekolah adiwiyata, sehingga diharapkan peserta didik yang memiliki kesadaran lingkungan menjadi satu generasi yang dapat mengantisipasi bahaya banjir, lingkungan kumuh, dan lain sebagainya **(Dinas Pendidikan)**		
7	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Menjadi Mandiri dalam Ekonomi dan Mengurangi Ketergantungan Terhadap Pemerintah Pusat **(Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)**	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep telah Melakukan beberapa Inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep , diantaranya : A. Melakukan Kerjasama Pembayaran Pajak PBB-P2 melalui online system menggunakan Merchant (Tokopedia, Ovo, PT. POS Indonesia, Indomaret & Alfamarat). B. Melakukan Kerjasama dengan Topdam V Brawijaya Malang untuk membuat Peta Desa Kabupaten Sumenep C. Melakukan Pendataan ulang Terhadap Wajib Pajak D. Melakukan Kerjasama dengan APH di Kabupaten Sumenep dalam Rangka Ketaatan Pembayaran Pajak. E. Melakukan Kerjasama dengan Universitas Mengenai Pembaruan Perda tentang Pajak di Kabupaten Sumenep.	➢ Dapat Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Sektor Pajak PBB-P2 ➢ Dapat Meningkatkan Jumlah Desa yang BerSISMIOP sehingga Data Desa Menjadi semakin Akurat ➢ Dapat Menyelesaikan Piutang Pajak ➢ Dapat Menertibkan Proses Pembayaran Pajak Daerah
8	Keramahan adalah obat non resep yang menjadi salah satu indikator kesembuhan Pasien, hal ini kerap diabaikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis khususnya di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang hingga saat ini masih menjadi masalah serius dari tahun ke tahun, atas dasar hal – hal tersebut di atas, maka Pansus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep	Kita sudah berupaya melayani masyarakat sesuai dengan motto RSUD dr. H. Moh Anwar yaitu “Salam Sapa Senyum kami untuk kesembuhan anda”, dan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2022 sebesar 87,28 % sudah lebih dari target (79%). Komitmen RSUD dr. H. Moh Anwar kedepan akan lebih meningkatkan pelayanan melalui pelatihan-pelatihan	➢ Peningkatan dan Perbaikan kualitas Pelayanan Kesehatan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait permasalahan – permasalahan di RSUD, agar masalah kesehatan di Kabupaten Sumenep bisa teratasi		
	Hal lain yang wajib menjadi perhatian juga adalah tingkat kebersihan lingkungan dan perbaikan saluran air di RSUD dr. H. Moh. Anwar yang diniai masih kurang baik **(RSUD dr. H. Moh. Anwar – Dinas Kesehatan)**	Struktur lahan RSUD lebih rendah dari wilayah sekelilingnya, sehingga setiap musim hujan selalu terjadi genangan air, ini menjadi masalah yang perlu dipecahkan bersama. Komitmen RSUD : Sudah merenovasi bangunan yang rendah (doorloop) rencana kedepan akan mengalokasikan mesin penyedot air. Berkoordinasi dengan Dinas terkait (PUPR)	➢ Peningkatan dan Perbaikan kualitas Pelayanan Kesehatan
9	Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Guluk – Guluk Kec. Guluk – Guluk ini tentunya membawa angin segar dan harapan baru bagi para pelaku IKM Rokok di Kabupaten Sumenep, serta dapat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan membantu program pemulihan ekonomi nasional. Namun perlu adanya peninjauan kembali karna belum dilakukannya validasi data terhadap IKM Rokok yang ada.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Validasi data yang dimaksud telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep pada tahun 2021, dengan hasil terdapat 14 Pelaku Usaha Industri Hasil Tembakau illegal yang berkenan dilakukan pendataan serta mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Sumenep. Data Pelaku Usaha Industri Hasil Tembakau pada Tahun 2021 menurut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura yang berstatus Aktif terdapat 23 Perusahaan, 7 Perusahaan berstatus Beku. Sumber Dana Kegiatan pembangunan KIHT tersebut berasal dari DBH CHT. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 dan 215/PMK.07/2021 bahwa 25% dari total alokasi DBHCHT digunakan untuk alokasi bidang penegakan hukum pada program pembinaan industri meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			industri tertentu hasil tembakau. Alokasi bidang penegakan hukum dalam rangka menurunkan tingkat peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di daerah.
	Diperlukan tindakan yang tepat dalam sistem pengelolaan parkir pada Pasar untuk meminimalisir kemacetan jalan **(Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan)**	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan / Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pada tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sudah dilakukan pembenahan area parkir pada beberapa pasar (pasar Lenteng, pasar Ganding dan Pasar Anom) yaitu dengan cara menertibkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya dengan penyediaan tempat di dalam lingkungan pasar selain itu penyediaan tempat parkir kendaraan menjadi perhatian untuk mengurangi kemacetan. Akan tetapi ada kondisi dimana beberapa pasar luasnya tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat berjualan dan parkir dan untuk pasar Anom telah diberlakukan parkir elektronik/otomatis

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Di antara pranata dan asas negara kesatuan Republik Indonesia yang diabadikan dalam UUD 1945, asas pemerintahan sendiri dan asas pemerintahan bersama mempunyai arti tersendiri. Di antaranya, hakikat otonomi daerah adalah hak masyarakat untuk mengatur keluarganya sendiri secara bebas. Kebebasan pengaturan merupakan bagian dari sistem distribusi kekuasaan, yang dilaksanakan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Sebagai cara pemerintah mengalihkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah, desentralisasi kekuasaan selalu ditekankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tugas Pembantuan adalah bahwa pemerintah yang lebih tinggi mempercayakan kepada unit pemerintah yang lebih rendah untuk menangani urusan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi, dan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang di tingkat yang sama.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian

tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Berdsarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan, dan ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/Lembaga melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101).

4.1.1. Indentifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat diatasnya

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Sumenep menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 10.777.003.500,00, dengan capaian realisasi keuangan 90,82%. Anggaran Tugas Pembantuan tersebut dikelola oleh 2 Perangkat Daerah, adapun rincian dan capaian pelaksanaannya sebagai berikut :

1. ***Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan,*** Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 menerima pelimpahan dalam bentuk tugas pembantuan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk Program Pengelolaan Ruang Laut dengan alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 3.222.550.000,00 *(Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan produksi garam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Madura, khususnya Kabupaten Sumenep, sebagai salah satu penghasil garam nasional.

Alokasi anggaran serta realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Alokasi dan Realisasi anggaran Pelaksanaan Program urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perikanan	Pengelolaan Ruang Laut	3.222.550.000	2.644.138.060	82,05	SP DIPA Nomor : SP DIPA-032.07.4.059496/2022
Total			**3.222.550.000**	**2.644.138.060**	**82,05**	

2. ***Urusan Bidang Pertanian***, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep untuk pelaksanaan program : 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkelanjutan, 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp. 7.554.453.500,00 *(Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).*

   Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur pertanian seperti RJIT (Rehab Jaringan Irigasi Tersier), embung dan irigasi serta pembangunan bangsal dalam rangka memfasilitasi prasarana pasca panen hortikultura untuk mewujudkan penumbuhan/pengembangan UMKM pada pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Disamping itu, untuk kegiatan fasilitasi penyebaran pupuk dan pestisida yang diberikan kepada masyarakat.

   Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Alokasi dan Realisasi anggaran Pelaksanaan Program Urusan Pertanian
Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkelanjutan	6.773.953.500	6.370.534.950	94,04	SP DIPA-018.08.4.059 185/2022
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	780.500.000	772.500.000	98,98	SP DIPA-018.04.4.059 1/2022
Total			**7.554.453.500**	**7.143.034.950**	**94,55**	

4.1.2. Indentifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintahan desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta

penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya

Transfer Dana Desa yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk 330 desa yang tersebar di 27 Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebesar Rp. 332.807.461.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 332.807.461.000,00.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 20219 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691).
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425).
c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
d. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumenep.
e. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/570/KEP/435.013/2021 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Alokasi anggaran serta realisasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep
Tahun 2022

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Kota Sumenep			
1. Kolor	984.104.000	984.104.000	100%
2. Pabian	903.072.000	903.072.000	100%
3. Marengan Daya	965.948.000	965.948.000	100%
4. Kacongan	1.017.507.000	1.017.507.000	100%
5. Paberasan	817.246.000	817.246.000	100%
6. Parsanga	907.629.000	907.629.000	100%
7. Bangkal	724.190.000	724.190.000	100%
8. Kebunan	826.771.000	826.771.000	100%
9. Pamolokan	954.248.000	954.248.000	100%
10. Pangarangan	863.387.000	863.387.000	100%
11. Pandian	810.858.000	810.858.000	100%
12. Kebunagung	949.713.000	949.713.000	100%
Kecamatan Kalianget			
1. Pinggirpapas	984.672.000	984.672.000	100%
2. Karanganyar	846.310.000	846.310.000	100%
3. Marengan Laok	1.209.078.000	1.209.078.000	100%
4. Kertasada	1.074.509.000	1.074.509.000	100%
5. Kalimook	972384000	972384000	100%
6. Kalianget Barat	1.166.259.000	1.166.259.000	100%
7. Kalianget Timur	1.134.832.000	1.134.832.000	100%
Kecamatan Manding			
1. Kasengan	1.054.709.000	1.054.709.000	100%
2. Lalangon	755.822.000	755.822.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Tenonan	883.376.000	883.376.000	100%
4. Lanjuk	869.925.000	869.925.000	100%
5. Gadding	1.088.079.000	1.088.079.000	100%
6. Giring	887.432.000	887.432.000	100%
7. Gunung Kembar	777.873.000	777.873.000	100%
8. Jaba'an	739.643.000	739.643.000	100%
9. Manding Laok	801.093.000	801.093.000	100%
10. Manding Timur	977.346.000	977.346.000	100%
11. Manding Daya	819.983.000	819.983.000	100%
Kecamatan Talango			
1. Talango	1.323.410.000	1.323.410.000	100%
2. Padike	1.009.058.000	1.009.058.000	100%
3. Cabbiya	942.398.000	942.398.000	100%
4. Essang	953.797.000	953.797.000	100%
5. Kombang	1.336.458.000	1.336.458.000	100%
6. Poteran	1.126.360.000	1.126.360.000	100%
7. Palasa	1.101.008.000	1.101.008.000	100%
8. Gapurana	1.143.153.000	1.143.153.000	100%
Kecamatan Bluto			
1. Guluk Manjung	920.986.000	920.986.000	100%
2. Kapedi	1.957.605.000	1.957.605.000	100%
3. Pakandangan Barat	1.122.377.000	1.122.377.000	100%
4. Pakandangan Tengah	906.652.000	906.652.000	100%
5. Pakandangan Sangra	1.105.628.000	1.105.628.000	100%
6. Aeng Dake	1.086.093.000	1.086.093.000	100%
7. Aeng Baja Kenek	1.221.394.000	1.221.394.000	100%
8. Bluto	755.969.000	755.969.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
9. Lobuk	1.239.284.000	1.239.284.000	100%
10. Bumbungan	951.263.000	951.263.000	100%
11. Masaran	925.084.000	925.084.000	100%
12. Palongan	946.774.000	946.774.000	100%
13. Aeng Baja Raja	727.406.000	727.406.000	100%
14. Karang Campaka	757.248.000	757.248.000	100%
15. Sera Barat	1.145.407.000	1.145.407.000	100%
16. Sera Tengah	712.889.000	712.889.000	100%
17. Sera Timur	809.879.000	809.879.000	100%
18. Gingging	921.946.000	921.946.000	100%
19. Errabu	730.732.000	730.732.000	100%
20. Gilang	723.389.000	723.389.000	100%
Kecamatan Saronggi			
1. Pagar Batu	1.126.094.000	1.126.094.000	100%
2. Tanjung	1.092.875.000	1.092.875.000	100%
3. Kebundadap Timur	971.571.000	971.571.000	100%
4. Langsar	891.331.000	891.331.000	100%
5. Kebundadap Barat	759.796.000	759.796.000	100%
6. Saroka	738.273.000	738.273.000	100%
7. Tanamerah	1.300.962.000	1.300.962.000	100%
8. Nambakor	859.100.000	859.100.000	100%
9. Saronggi	1.088.126.000	1.088.126.000	100%
10. Moangan	744.679.000	744.679.000	100%
11. Juluk	933.133.000	933.133.000	100%
12. Aengtongtong	826.558.000	826.558.000	100%
13. Talang	1.270.341.000	1.270.341.000	100%
14. Kambingan Timur	728.619.000	728.619.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Lenteng			
1. Moncek Barat	815.926.000	815.926.000	100%
2. Moncek Tengah	915.995.000	915.995.000	100%
3. Moncek Timur	993.603.000	993.603.000	100%
4. Banaresep Timur	1.238.733.000	1.238.733.000	100%
5. Tarogan	701.029.000	701.029.000	100%
6. Kambingan Barat	785.831.000	785.831.000	100%
7. Poreh	1.186.719.000	1.186.719.000	100%
8. Lenteng Timur	1.215.168.000	1.215.168.000	100%
9. Lembung Timur	1.043.037.000	1.043.037.000	100%
10. Lenteng Barat	1.449.336.000	1.449.336.000	100%
11. Banaresep Barat	798.683.000	798.683.000	100%
12. Billapora Rebba	1.226.529.000	1.226.529.000	100%
13. Lembung Barat	894.397.000	894.397.000	100%
14. Ellak Laok	816.432.000	816.432.000	100%
15. Ellak Daya	901.258.000	901.258.000	100%
16. Daramista	763.612.000	763.612.000	100%
17. Jambu	671.217.000	671.217.000	100%
18. Cangkreng	844.695.000	844.695.000	100%
19. Meddelan	938.543.000	938.543.000	100%
20. Sendir	672.975.000	672.975.000	100%
Kecamatan Giligenting			
1. Galis	1.189.448.000	1.189.448.000	100%
2. Gedugan	1.103.277.000	1.103.277.000	100%
3. Bringsang	787.515.000	787.515.000	100%
4. Aenganyar	933.297.000	933.297.000	100%
5. Lombang	1.133.224.000	1.133.224.000	100%
6. Jate	1.164.100.000	1.164.100.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
7. Banbaru	841.656.000	841.656.000	100%
8. Banmaleng	916.552.000	916.552.000	100%
Kecamatan Guluk-Guluk			
1. Bakeong	1.502.135.000	1.502.135.000	100%
2. Payudan Dundang	1.290.930.000	1.290.930.000	100%
3. Pordapor	1.107.495.000	1.107.495.000	100%
4. Guluk-Guluk	2.251.834.000	2.251.834.000	100%
5. Ketawang Laok	982.278.000	982.278.000	100%
6. Pananggungan	969.890.000	969.890.000	100%
7. Bragung	1.731.088.000	1.731.088.000	100%
8. Tambuko	1.039.638.000	1.039.638.000	100%
9. Payudan Nangger	1.018.665.000	1.018.665.000	100%
10. Payudan Daleman	1.270.862.000	1.270.862.000	100%
11. Payudan Karangsokon	1.137.303.000	1.137.303.000	100%
12. Batuampar	1.710.643.000	1.710.643.000	100%
Kecamatan Ganding			
1. Bataal Barat	791.420.000	791.420.000	100%
2. Bataal Timur	677.705.000	677.705.000	100%
3. Rombiya Barat	837.023.000	837.023.000	100%
4. Rombiya Timur	1.137.451.000	1.137.451.000	100%
5. Talaga	937.054.000	937.054.000	100%
6. Billapora Barat	1.009.719.000	1.009.719.000	100%
7. Billapora Timur	857.460.000	857.460.000	100%
8. Ganding	1.210.403.000	1.210.403.000	100%
9. Gadu Timur	1.011.152.000	1.011.152.000	100%
10. Gadu Barat	1.170.394.000	1.170.394.000	100%
11. Ketawang Larangan	960.429.000	960.429.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
12. Ketawang Parebaan	768.141.000	768.141.000	100%
13. Ketawang Daleman	967.475.000	967.475.000	100%
14. Ketawang Karay	984.044.000	984.044.000	100%
Kecamatan Pragaan			
1. Kaduara Timur	1.005.850.000	1.005.850.000	100%
2. Sendang	743.516.000	743.516.000	100%
3. Rombasan	684.981.000	684.981.000	100%
4. Sentol Laok	733.273.000	733.273.000	100%
5. Larangan Perreng	1.070.894.000	1.070.894.000	100%
6. Sentol Daya	1.360.100.000	1.360.100.000	100%
7. Pakamban Daya	1.166.761.000	1.166.761.000	100%
8. Pakamban Laok	881.204.000	881.204.000	100%
9. Jaddung	1.548.366.000	1.548.366.000	100%
10. Pragaan Laok	1.317.132.000	1.317.132.000	100%
11. Pragaan Daya	1.686.334.000	1.686.334.000	100%
12. Prenduan	1.238.922.000	1.238.922.000	100%
13. Aeng Panas	1.030.539.000	1.030.539.000	100%
14. Karduluk	1.803.955.000	1.803.955.000	100%
Kecamatan Ambunten			
1. Ambunten Barat	1.022.257.000	1.022.257.000	100%
2. Ambunten Tengah	1.464.081.000	1.464.081.000	100%
3. Ambunten Timur	1.237.160.000	1.237.160.000	100%
4. Tambaagung Barat	938.205.000	938.205.000	100%
5. Tambaagung Tengah	1.227.848.000	1.227.848.000	100%
6. Tambaagung Ares	1.130.653.000	1.130.653.000	100%
7. Sogian	872.223.000	872.223.000	100%
8. Tambaagung Timur	907.472.000	907.472.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
9. Bukabu	792.646.000	792.646.000	100%
10. Campor Barat	774.243.000	774.243.000	100%
11. Keles	909.193.000	909.193.000	100%
12. Campor Timur	678.614.000	678.614.000	100%
13. Belluk Ares	780.467.000	780.467.000	100%
14. Belluk Kenek	904.069.000	904.069.000	100%
15. Belluk Raja	936.748.000	936.748.000	100%
Kecamatan Pasongsongan			
1. Montorna	1.602.738.000	1.602.738.000	100%
2. Prancak	1.626.036.000	1.626.036.000	100%
3. Campaka	1.643.307.000	1.643.307.000	100%
4. Rajun	1.010.324.000	1.010.324.000	100%
5. Lebeng Timur	1.155.912.000	1.155.912.000	100%
6. Lebeng Barat	1.123.994.000	1.123.994.000	100%
7. Soddara	1.286.188.000	1.286.188.000	100%
8. Pasongsongan	1.343.400.000	1.343.400.000	100%
9. Padangdangan	913.966.000	913.966.000	100%
10. Panaongan	953.746.000	953.746.000	100%
Kecamatan Dasuk			
1. Slopeng	740.010.000	740.010.000	100%
2. Semaan	797.508.000	797.508.000	100%
3. Batubellah Barat	947.894.000	947.894.000	100%
4. Batubellah Timur	747.337.000	747.337.000	100%
5. Kecer	922.862.000	922.862.000	100%
6. Bates	765.056.000	765.056.000	100%
7. Bringin	1.019.972.000	1.019.972.000	100%
8. Jelbudan	1.030.064.000	1.030.064.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
9. Kerta Barat	674.868.000	674.868.000	100%
10. Kerta Timur	719.098.000	719.098.000	100%
11. Nyapar	845.994.000	845.994.000	100%
12. Dasuk Barat	710.267.000	710.267.000	100%
13. Dasuk Timur	678.558.000	678.558.000	100%
14. Dasuk Laok	877.897.000	877.897.000	100%
15. Mantajun	923.603.000	923.603.000	100%
Kecamatan Rubaru			
1. Mandala	1.433.850.000	1.433.850.000	100%
2. Pakondang	1.244.204.000	1.244.204.000	100%
3. Matanair	1.226.359.000	1.226.359.000	100%
4. Tambaksari	1.008.675.000	1.008.675.000	100%
5. Banasare	1.203.771.000	1.203.771.000	100%
6. Bunbarat	957.100.000	957.100.000	100%
7. Karang Nangka	1.233.198.000	1.233.198.000	100%
8. Basoka	1.269.433.000	1.269.433.000	100%
9. Duko	891.394.000	891.394.000	100%
10. Rubaru	1.186.430.000	1.186.430.000	100%
11. Kalebengan	1.003.874.000	1.003.874.000	100%
Kecamatan Batang-Batang			
1. Kolpo	1.109.694.000	1.109.694.000	100%
2. Tamidung	1.209.749.000	1.209.749.000	100%
3. Batang-Batang Laok	1.248.676.000	1.248.676.000	100%
4. Batang-Batang Daya	1.643.154.000	1.643.154.000	100%
5. Totosan	879.550.000	879.550.000	100%
6. Banuaju Barat	911.258.000	911.258.000	100%
7. Banuaju Timur	810.520.000	810.520.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
8. Jenangger	952.466.000	952.466.000	100%
9. Nyabakan Timur	1.288.908.00	1.288.908.00	100%
10. Nyabakan Barat	1.371.021.000	1.371.021.000	100%
11. Jangkong	806.352.000	806.352.000	100%
12. Legung Barat	1.163.073.000	1.163.073.000	100%
13. Legung Timur	1.022.618.000	1.022.618.000	100%
14. Dapenda	1.121.758.000	1.121.758.000	100%
15. Bilangan	953.937.000	953.937.000	100%
16. Lombang	989.858.000	989.858.000	100%
Kecamatan Batuputih			
1. Aengmerah	1.162.013.000	1.162.013.000	100%
2. Tengedan	804.856.000	804.856.000	100%
3. Juruan Laok	1.087.332.000	1.087.332.000	100%
4. Juruan Daya	1.050.097.000	1.050.097.000	100%
5. Badur	857.412.000	857.412.000	100%
6. Gedang-Gedang	1.013.277.000	1.013.277.000	100%
7. Batuputih Kenek	847.897.000	847.897.000	100%
8. Batuputih Laok	924.858.000	924.858.000	100%
9. Batuputih Daya	939.404.000	939.404.000	100%
10. Bantelan	919.799.000	919.799.000	100%
11. Larangan Barma	1.275.130.000	1.275.130.000	100%
12. Larangan Kerta	1.052.059.000	1.052.059.000	100%
13. Bulla'an	1.214.132.000	1.214.132.000	100%
14. Sergang	923.982.000	923.982.000	100%
Kecamatan Dungkek			
1. Candi	798.577.000	798.577.000	100%
2. Jadung	884.350.000	884.350.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Romben Barat	1.058.561.000	1.058.561.000	100%
4. Romben Rana	668.811.000	668.811.000	100%
5. Romben Guna	928.784.000	928.784.000	100%
6. Taman Sare	790.369.000	790.369.000	100%
7. Bicabbi	1.021.803.000	1.021.803.000	100%
8. Dungkek	1.107.874.000	1.107.874.000	100%
9. Bunpenang	769.097.000	769.097.000	100%
10. Bungin-Bungin	633.458.000	633.458.000	100%
11. Lapa Taman	845.610.000	845.610.000	100%
12. Lapa Laok	796.685.000	796.685.000	100%
13. Lapa Daya	684.273.000	684.273.000	100%
14. Bancamara	835.379.000	835.379.000	100%
15. Banra'as	858.291.000	858.291.000	100%
Kecamatan Gapura			
1. Grujugan	886.008.000	886.008.000	100%
2. Longos	1.018.137.000	1.018.137.000	100%
3. Andulang	1.110.428.000	1.110.428.000	100%
4. Gapura Timur	1.041.756.000	1.041.756.000	100%
5. Mandala	655.287.000	655.287.000	100%
6. Gersik Putih	719.312.000	719.312.000	100%
7. Gapura Tengah	781.509.000	781.509.000	100%
8. Gapura Barat	872.510.000	872.510.000	100%
9. Panagan	693.995.000	693.995.000	100%
10. Palo'lo'an	838.539.000	838.539.000	100%
11. Banjar Timur	667.697.000	667.697.000	100%
12. Banjar Barat	877.135.000	877.135.000	100%
13. Batudinding	782.410.000	782.410.000	100%
14. Baban	737.364.000	737.364.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
15. Karangbudi	855.864.000	855.864.000	100%
16. Braji	758.935.000	758.935.000	100%
17. Poja	748.764.000	748.764.000	100%
Kecamatan Gayam			
1. Pancor	1.336.662.000	1.336.662.000	100%
2. Prambanan	1.097.195.000	1.097.195.000	100%
3. Gendang Timur	934.665.000	934.665.000	100%
4. Karang Tengah	861.543.000	861.543.000	100%
5. Jambuir	943.513.000	943.513.000	100%
6. Gayam	1.105.988.000	1.105.988.000	100%
7. Kalowang	1.281.174.000	1.281.174.000	100%
8. Nyamplong	987.511.000	987.511.000	100%
9. Gendang Barat	1.103.665.000	1.103.665.000	100%
10. Tarebung	937.129.000	937.129.000	100%
Kecamatan Nonggunong			
1. Nonggunong	785.719.000	785.719.000	100%
2. Somber	730.801.000	730.801.000	100%
3. Tanah Merah	753.428.000	753.428.000	100%
4. Sokaramme Timur	891.852.000	891.852.000	100%
5. Sokaramme Paseser	1.048.845.000	1.048.845.000	100%
6. Talaga	1.038.772.000	1.038.772.000	100%
7. Rosong	732.975.000	732.975.000	100%
8. Sonok	895.177.000	895.177.000	100%
Kecamatan Ra'as			
1. Ketupat	1.154.406.000	1.154.406.000	100%
2. Jungkat	1.066.721.000	1.066.721.000	100%
3. Kropoh	1.247.701.000	1.247.701.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
4. Karangnangka	1.084.623.000	1.084.623.000	100%
5. Alas Malang	1.243.117.000	1.243.117.000	100%
6. Poteran	1.107.115.000	1.107.115.000	100%
7. Brakas	1.047.413.000	1.047.413.000	100%
8. Tonduk	1.649.939.000	1.649.939.000	100%
9. Guwa-Guwa	943.437.000	943.437.000	100%
Kecamatan Masalembu			
1. Sukajeruk	1.185.815.000	1.185.815.000	100%
2. Masalima	1.331.614.000	1.331.614.000	100%
3. Masakambing	763.423.000	763.423.000	100%
4. Kramian	918.670.000	918.670.000	100%
Kecamatan Arjasa			
1. Pajanangger	1.144.448.000	1.144.448.000	100%
2. Sawah Sumur	1.289.104.000	1.289.104.000	100%
3. Paseraman	1.179.041.000	1.179.041.000	100%
4. Gelaman	1.284.198.000	1.284.198.000	100%
5. Buddi	1.219.242.000	1.219.242.000	100%
6. Kolo-Kolo	1.181.328.000	1.181.328.000	100%
7. Angkatan	1.081.111.000	1.081.111.000	100%
8. Kalisangka	915.948.000	915.948.000	100%
9. Bilis-Bilis	1.014.673.000	1.014.673.000	100%
10. Laok Jang-Jang	924.620.000	924.620.000	100%
11. Sumbernangka	755.627.000	755.627.000	100%
12. Duko	1.006.429.000	1.006.429.000	100%
13. Kalikatak	906.642.000	906.642.000	100%
14. Arjasa	1.185.997.000	1.185.997.000	100%
15. Kalinganyar	825.140.000	825.140.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
16. Angon-Angon	968.750.000	968.750.000	100%
17. Sambakati	928.143.000	928.143.000	100%
18. Pandeman	1.077.996.000	1.077.996.000	100%
19. Pabean	698.822.000	698.822.000	100%
Kecamatan Sapeken			
1. Sepanjang	1.328.667.000	1.328.667.000	100%
2. Tanjung Kiaok	1.024.758.000	1.024.758.000	100%
3. Sakala	1.050.949.000	1.050.949.000	100%
4. Pagerungan Besar	1.294.062.000	1.294.062.000	100%
5. Pagerungan Kecil	1.307.821.000	1.307.821.000	100%
6. Saseel	1.298.477.000	1.298.477.000	100%
7. Sapeken	1.799.597.000	1.799.597.000	100%
8. Sabunten	1.185.697.000	1.185.697.000	100%
9. Paliat	1.076.762.000	1.076.762.000	100%
10. Sadulang	1.084.032.000	1.084.032.000	100%
11. Saur Saebus	1.403.259.000	1.403.259.000	100%
Kecamatan Batuan			
1. Patean	651.561.000	651.561.000	100%
2. Babbalan	759.115.000	759.115.000	100%
3. Gedungan	703.047.000	703.047.000	100%
4. Gunggung	739.123.000	739.123.000	100%
5. Batuan	874.200.000	874.200.000	100%
6. Torbang	715.494.000	715.494.000	100%
7. Galugur	668.905.000	668.905.000	100%
Kecamatan Kangayan			
1. Saobi	1.062.264.000	1.062.264.000	100%
2. Kangayan	1.219.158.000	1.219.158.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Torjek	1.101.138.000	1.101.138.000	100%
4. Cangkramaan	1.013.903.000	1.013.903.000	100%
5. Tembayangan	728.603.000	728.603.000	100%
6. Batuputih	1.032.775.000	1.032.775.000	100%
7. Daandung	970.996.000	970.996.000	100%
8. Timur Jang-Jang	1.219.216.000	1.219.216.000	100%
9. Jukong-Jukong	874.489.000	874.489.000	100%
Jumlah	**332.807.461.000**	**332.807.461.000**	**100%**

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD. Pada tahun 2022 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di 330 Pemerintah Desa yang tersebar di 27 Kecamatan wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke (Rekening Kas Desa), adalah sebesar Rp. 131.683.768.430,00 dan terealisasi sebesar Rp. 131.683.768.430,00.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961.

b. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/570/KEP/435.013/2021 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Alokasi anggaran serta realisasi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2022

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
Kecamatan Kota Sumenep			
1. Kolor	415.191.000	415.191.000	100%
2. Pabian	390.484.000	390.484.000	100%
3. Marengan Daya	375.098.000	375.098.000	100%
4. Kacongan	375.848.000	375.848.000	100%
5. Paberasan	390.141.000	390.141.000	100%
6. Parsanga	365.766.000	365.766.000	100%
7. Bangkal	350.512.000	350.512.000	100%
8. Kebunan	365.455.000	365.455.000	100%
9. Pamolokan	390.847.000	390.847.000	100%
10. Pangarangan	365.158.000	365.158.000	100%
11. Pandian	365.267.000	365.267.000	100%
12. Kebunagung	350.549.000	350.549.000	100%
Kecamatan Kalianget			
1. Pinggirpapas	366.987.000	366.987.000	100%
2. Karanganyar	390.488.000	390.488.000	100%
3. Marengan Laok	391.630.000	391.630.000	100%
4. Kertasada	390.035.000	390.035.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
5. Kalimook	367.118.000	367.118.000	100%
6. Kalianget Barat	393.007.000	393.007.000	100%
7. Kalianget Timur	392.200.000	392.200.000	100%
Kecamatan Manding			
1. Kasengan	366.249.000	366.249.000	100%
2. Lalangon	336.659.000	336.659.000	100%
3. Tenonan	391.824.000	391.824.000	100%
4. Lanjuk	377.117.000	377.117.000	100%
5. Gadding	467.683.000	467.683.000	100%
6. Giring	440.612.000	440.612.000	100%
7. Gunung Kembar	376.152.000	376.152.000	100%
8. Jaba'an	425.004.000	425.004.000	100%
9. Manding Laok	390.609.000	390.609.000	100%
10. Manding Timur	402.861.000	402.861.000	100%
11. Manding Daya	337.058.000	337.058.000	100%
Kecamatan Talango			
1. Talango	441.319.000	441.319.000	100%
2. Padike	465.312.000	465.312.000	100%
3. Cabbiya	426.909.000	426.909.000	100%
4. Essang	465.463.000	465.463.000	100%
5. Kombang	442.440.000	442.440.000	100%
6. Poteran	491.902.000	491.902.000	100%
7. Palasa	491.717.000	491.717.000	100%
8. Gapurana	639.153.000	639.153.000	100%
Kecamatan Bluto			
1. Guluk Manjung	327.815.000	327.815.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
2. Kapedi	448.377.000	448.377.000	100%
3. Pakandangan Barat	417.776.000	417.776.000	100%
4. Pakandangan Tengah	337.982.000	337.982.000	100%
5. Pakandangan Sangra	354.442.000	354.442.000	100%
6. Aeng Dake	392.841.000	392.841.000	100%
7. Aeng Baja Kenek	369.512.000	369.512.000	100%
8. Bluto	351.017.000	351.017.000	100%
9. Lobuk	392.129.000	392.129.000	100%
10. Bumbungan	353.147.000	353.147.000	100%
11. Masaran	313.595.000	313.595.000	100%
12. Palongan	328.328.000	328.328.000	100%
13. Aeng Baja Raja	312.380.000	312.380.000	100%
14. Karang Campaka	312.584.000	312.584.000	100%
15. Sera Barat	362.670.000	362.670.000	100%
16. Sera Tengah	312.095.000	312.095.000	100%
17. Sera Timur	337.114.000	337.114.000	100%
18. Gingging	338.242.000	338.242.000	100%
19. Errabu	312.271.000	312.271.000	100%
20. Gilang	312.274.000	312.274.000	100%
Kecamatan Saronggi			
1. Pagar Batu	393.412.000	393.412.000	100%
2. Tanjung	393.017.000	393.017.000	100%
3. Kebundadap Timur	391.905.000	391.905.000	100%
4. Langsar	489.781.000	489.781.000	100%
5. Kebundadap Barat	311.731.000	311.731.000	100%
6. Saroka	375.254.000	375.254.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
7. Tanamerah	417.243.000	417.243.000	100%
8. Nambakor	338.588.000	338.588.000	100%
9. Saronggi	376.524.000	376.524.000	100%
10. Moangan	312.733.000	312.733.000	100%
11. Juluk	352.113.000	352.113.000	100%
12. Aengtongtong	337.838.000	337.838.000	100%
13. Talang	443.603.000	443.603.000	100%
14. Kambingan Timur	312.310.000	312.310.000	100%
Kecamatan Lenteng			
1. Moncek Barat	313.280.000	313.280.000	100%
2. Moncek Tengah	352.613.000	352.613.000	100%
3. Moncek Timur	353.603.000	353.603.000	100%
4. Banaresep Timur	443.683.000	443.683.000	100%
5. Tarogan	311.963.000	311.963.000	100%
6. Kambingan Barat	312.953.000	312.953.000	100%
7. Poreh	391.361.000	391.361.000	100%
8. Lenteng Timur	440.380.000	440.380.000	100%
9. Lembung Timur	392.478.000	392.478.000	100%
10. Lenteng Barat	543.537.000	543.537.000	100%
11. Banaresep Barat	312.998.000	312.998.000	100%
12. Billapora Rebba	418.801.000	418.801.000	100%
13. Lembung Barat	327.765.000	327.765.000	100%
14. Ellak Laok	440.327.000	440.327.000	100%
15. Ellak Daya	415.988.000	415.988.000	100%
16. Daramista	375.854.000	375.854.000	100%
17. Jambu	336.394.000	336.394.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
18. Cangkreng	351.878.000	351.878.000	100%
19. Meddelan	377.451.000	377.451.000	100%
20. Sendir	336.512.000	336.512.000	100%
Kecamatan Giligenting			
1. Galis	443.996.000	443.996.000	100%
2. Gedugan	466.947.000	466.947.000	100%
3. Bringsang	362.290.000	362.290.000	100%
4. Aenganyar	441.146.000	441.146.000	100%
5. Lombang	442.662.000	442.662.000	100%
6. Jate	377.386.000	377.386.000	100%
7. Banbaru	351.900.000	351.900.000	100%
8. Banmaleng	391.048.000	391.048.000	100%
Kecamatan Guluk-Guluk			
1. Bakeong	495.501.000	495.501.000	100%
2. Payudan Dundang	380.483.000	380.483.000	100%
3. Pordapor	378.964.000	378.964.000	100%
4. Guluk-Guluk	647.812.000	647.812.000	100%
5. Ketawang Laok	402.535.000	402.535.000	100%
6. Pananggungan	312.470.000	312.470.000	100%
7. Bragung	472.930.000	472.930.000	100%
8. Tambuko	353.629.000	353.629.000	100%
9. Payudan Nangger	378.411.000	378.411.000	100%
10. Payudan Daleman	394.726.000	394.726.000	100%
11. Payudan Karangsokon	379.187.000	379.187.000	100%
12. Batuampar	570.995.000	570.995.000	100%
Kecamatan Ganding			

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
1. Bataal Barat	361.543.000	361.543.000	100%
2. Bataal Timur	385.652.000	385.652.000	100%
3. Rombiya Barat	387.339.000	387.339.000	100%
4. Rombiya Timur	475.550.000	475.550.000	100%
5. Talaga	426.696.000	426.696.000	100%
6. Billapora Barat	361.852.000	361.852.000	100%
7. Billapora Timur	387.474.000	387.474.000	100%
8. Ganding	468.204.000	468.204.000	100%
9. Gadu Timur	466.339.000	466.339.000	100%
10. Gadu Barat	467.996.000	467.996.000	100%
11. Ketawang Larangan	377.695.000	377.695.000	100%
12. Ketawang Parebaan	312.050.000	312.050.000	100%
13. Ketawang Daleman	377.890.000	377.890.000	100%
14. Ketawang Karay	416.665.000	416.665.000	100%
Kecamatan Pragaan			
1. Kaduara Timur	378.071.000	378.071.000	100%
2. Sendang	336.995.000	336.995.000	100%
3. Rombasan	311.927.000	311.927.000	100%
4. Sentol Laok	312.365.000	312.365.000	100%
5. Larangan Perreng	442.237.000	442.237.000	100%
6. Sentol Daya	395.567.000	395.567.000	100%
7. Pakamban Daya	467.443.000	467.443.000	100%
8. Pakamban Laok	376.953.000	376.953.000	100%
9. Jaddung	422.034.000	422.034.000	100%
10. Pragaan Laok	444.393.000	444.393.000	100%
11. Pragaan Daya	447.882.000	447.882.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
12. Prenduan	442.418.000	442.418.000	100%
13. Aeng Panas	392.350.000	392.350.000	100%
14. Karduluk	618.747.000	618.747.000	100%
Kecamatan Ambunten			
1. Ambunten Barat	392.337.000	392.337.000	100%
2. Ambunten Tengah	492.508.000	492.508.000	100%
3. Ambunten Timur	366.551.000	366.551.000	100%
4. Tambaagung Barat	338.669.000	338.669.000	100%
5. Tambaagung Tengah	369.753.000	369.753.000	100%
6. Tambaagung Ares	354.861.000	354.861.000	100%
7. Sogian	352.289.000	352.289.000	100%
8. Tambaagung Timur	377.196.000	377.196.000	100%
9. Bukabu	336.900.000	336.900.000	100%
10. Campor Barat	351.242.000	351.242.000	100%
11. Keles	363.032.000	363.032.000	100%
12. Campor Timur	311.885.000	311.885.000	100%
13. Belluk Ares	337.390.000	337.390.000	100%
14. Belluk Kenek	338.173.000	338.173.000	100%
15. Belluk Raja	391.463.000	391.463.000	100%
Kecamatan Pasongsongan			
1. Montorna	496.825.000	496.825.000	100%
2. Prancak	497.774.000	497.774.000	100%
3. Campaka	445.357.000	445.357.000	100%
4. Rajun	392.432.000	392.432.000	100%
5. Lebeng Timur	492.394.000	492.394.000	100%
6. Lebeng Barat	468.053.000	468.053.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
7. Soddara	493.938.000	493.938.000	100%
8. Pasongsongan	444.280.000	444.280.000	100%
9. Padangdangan	440.285.000	440.285.000	100%
10. Panaongan	465.707.000	465.707.000	100%
Kecamatan Dasuk			
1. Slopeng	375.585.000	375.585.000	100%
2. Semaan	361.658.000	361.658.000	100%
3. Batubellah Barat	363.133.000	363.133.000	100%
4. Batubellah Timur	337.225.000	337.225.000	100%
5. Kecer	363.107.000	363.107.000	100%
6. Bates	337.328.000	337.328.000	100%
7. Bringin	392.498.000	392.498.000	100%
8. Jelbudan	392.226.000	392.226.000	100%
9. Kerta Barat	360.809.000	360.809.000	100%
10. Kerta Timur	361.583.000	361.583.000	100%
11. Nyapar	352.272.000	352.272.000	100%
12. Dasuk Barat	336.988.000	336.988.000	100%
13. Dasuk Timur	336.821.000	336.821.000	100%
14. Dasuk Laok	352.455.000	352.455.000	100%
15. Mantajun	440.831.000	440.831.000	100%
Kecamatan Rubaru			
1. Mandala	396.551.000	396.551.000	100%
2. Pakondang	370.327.000	370.327.000	100%
3. Matanair	369.830.000	369.830.000	100%
4. Tambaksari	378.250.000	378.250.000	100%
5. Banasare	353.082.000	353.082.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
6. Bunbarat	353.026.000	353.026.000	100%
7. Karang Nangka	370.252.000	370.252.000	100%
8. Basoka	396.053.000	396.053.000	100%
9. Duko	366.410.000	366.410.000	100%
10. Rubaru	393.936.000	393.936.000	100%
11. Kalebengan	353.630.000	353.630.000	100%
Kecamatan Batang-Batang			
1. Kolpo	442.628.000	442.628.000	100%
2. Tamidung	468.699.000	468.699.000	100%
3. Batang-Batang Laok	466.317.000	466.317.000	100%
4. Batang-Batang Daya	616.980.000	616.980.000	100%
5. Totosan	376.924.000	376.924.000	100%
6. Banuaju Barat	401.891.000	401.891.000	100%
7. Banuaju Timur	400.878.000	400.878.000	100%
8. Jenangger	426.899.000	426.899.000	100%
9. Nyabakan Timur	443.591.000	443.591.000	100%
10. Nyabakan Barat	445.221.000	445.221.000	100%
11. Jangkong	362.487.000	362.487.000	100%
12. Legung Barat	401.627.000	401.627.000	100%
13. Legung Timur	489.946.000	489.946.000	100%
14. Dapenda	516.200.000	516.200.000	100%
15. Bilangan	336.764.000	336.764.000	100%
16. Lombang	362.099.000	362.099.000	100%
Kecamatan Batuputih			
1. Aengmerah	468.024.000	468.024.000	100%
2. Tengedan	361.889.000	361.889.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Juruan Laok	491.672.000	491.672.000	100%
4. Juruan Daya	442.078.000	442.078.000	100%
5. Badur	387.197.000	387.197.000	100%
6. Gedang-Gedang	417.722.000	417.722.000	100%
7. Batuputih Kenek	415.851.000	415.851.000	100%
8. Batuputih Laok	489.954.000	489.954.000	100%
9. Batuputih Daya	441.358.000	441.358.000	100%
10. Bantelan	377.740.000	377.740.000	100%
11. Larangan Barma	419.730.000	419.730.000	100%
12. Larangan Kerta	386.486.000	386.486.000	100%
13. Bulla'an	419.177.000	419.177.000	100%
14. Sergang	402.328.000	402.328.000	100%
Kecamatan Dungkek			
1. Candi	425.457.000	425.457.000	100%
2. Jadung	415.535.000	415.535.000	100%
3. Romben Barat	386.933.000	386.933.000	100%
4. Romben Rana	336.199.000	336.199.000	100%
5. Romben Guna	415.919.000	415.919.000	100%
6. Taman Sare	351.540.000	351.540.000	100%
7. Bicabbi	400.529.000	400.529.000	100%
8. Dungkek	415.215.000	415.215.000	100%
9. Bunpenang	336.873.000	336.873.000	100%
10. Bungin-Bungin	312.041.000	312.041.000	100%
11. Lapa Taman	377.036.000	377.036.000	100%
12. Lapa Laok	376.420.000	376.420.000	100%
13. Lapa Daya	336.654.000	336.654.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
14. Bancamara	464.118.000	464.118.000	100%
15. Banra'as	439.469.000	439.469.000	100%
Kecamatan Gapura			
1. Grujugan	390.817.000	390.817.000	100%
2. Longos	441.625.000	441.625.000	100%
3. Andulang	415.552.000	415.552.000	100%
4. Gapura Timur	376.045.000	376.045.000	100%
5. Mandala	311.540.000	311.540.000	100%
6. Gersik Putih	337.090.000	337.090.000	100%
7. Gapura Tengah	337.099.000	337.099.000	100%
8. Gapura Barat	415.296.000	415.296.000	100%
9. Panagan	312.003.000	312.003.000	100%
10. Palo'lo'an	352.140.000	352.140.000	100%
11. Banjar Timur	311.818.000	311.818.000	100%
12. Banjar Barat	352.309.000	352.309.000	100%
13. Batudinding	337.017.000	337.017.000	100%
14. Baban	350.871.000	350.871.000	100%
15. Karangbudi	352.299.000	352.299.000	100%
16. Braji	336.784.000	336.784.000	100%
17. Poja	337.136.000	337.136.000	100%
Kecamatan Gayam			
1. Pancor	518.668.000	518.668.000	100%
2. Prambanan	542.111.000	542.111.000	100%
3. Gendang Timur	388.342.000	388.342.000	100%
4. Karang Tengah	337.838.000	337.838.000	100%
5. Jambuir	338.641.000	338.641.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
6. Gayam	368.408.000	368.408.000	100%
7. Kalowang	540.445.000	540.445.000	100%
8. Nyamplong	337.319.000	337.319.000	100%
9. Gendang Barat	453.871.000	453.871.000	100%
10. Tarebung	402.654.000	402.654.000	100%
Kecamatan Nonggunong			
1. Nonggunong	337.648.000	337.648.000	100%
2. Somber	312.334.000	312.334.000	100%
3. Tanah Merah	312.699.000	312.699.000	100%
4. Sokaramme Timur	362.896.000	362.896.000	100%
5. Sokaramme Paseser	417.245.000	417.245.000	100%
6. Talaga	312.604.000	312.604.000	100%
7. Rosong	312.494.000	312.494.000	100%
8. Sonok	514.470.000	514.470.000	100%
Kecamatan Ra'as			
1. Ketupat	393.180.000	393.180.000	100%
2. Jungkat	312.708.000	312.708.000	100%
3. Kropoh	394.053.000	394.053.000	100%
4. Karangnangka	392.349.000	392.349.000	100%
5. Alas Malang	353.592.000	353.592.000	100%
6. Poteran	401.450.000	401.450.000	100%
7. Brakas	490.419.000	490.419.000	100%
8. Tonduk	397.857.000	397.857.000	100%
9. Guwa-Guwa	391.306.000	391.306.000	100%
Kecamatan Masalembu			
1. Sukajeruk	369.218.000	369.218.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
2. Masalima	370.136.000	370.136.000	100%
3. Masakambing	313.282.000	313.282.000	100%
4. Kramian	367.020.000	367.020.000	100%
Kecamatan Arjasa			
1. Pajanangger	592.249.000	592.249.000	100%
2. Sawah Sumur	453.336.000	453.336.000	100%
3. Paseraman	542.075.000	542.075.000	100%
4. Gelaman	519.858.000	519.858.000	100%
5. Buddi	392.202.000	392.202.000	100%
6. Kolo-Kolo	592.670.000	592.670.000	100%
7. Angkatan	514.956.000	514.956.000	100%
8. Kalisangka	514.188.000	514.188.000	100%
9. Bilis-Bilis	539.394.000	539.394.000	100%
10. Laok Jang-Jang	440.159.000	440.159.000	100%
11. Sumbernangka	336.540.000	336.540.000	100%
12. Duko	514.797.000	514.797.000	100%
13. Kalikatak	537.913.000	537.913.000	100%
14. Arjasa	514.232.000	514.232.000	100%
15. Kalinganyar	474.959.000	474.959.000	100%
16. Angon-Angon	514.674.000	514.674.000	100%
17. Sambakati	514.316.000	514.316.000	100%
18. Pandeman	376.503.000	376.503.000	100%
19. Pabean	410.476.000	410.476.000	100%
Kecamatan Sapeken			
1. Sepanjang	450.464.000	450.464.000	100%
2. Tanjung Kiaok	394.191.000	394.191.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
3. Sakala	403.578.000	403.578.000	100%
4. Pagerungan Besar	443.541.000	443.541.000	100%
5. Pagerungan Kecil	394.414.000	394.414.000	100%
6. Saseel	395.326.000	395.326.000	100%
7. Sapeken	571.566.000	571.566.000	100%
8. Sabunten	395.326.000	395.326.000	100%
9. Paliat	407.138.000	407.138.000	100%
10. Sadulang	442.079.000	442.079.000	100%
11. Saur Saebus	468.679.000	468.679.000	100%
Kecamatan Batuan			
1. Patean	336.257.000	336.257.000	100%
2. Babbalan	336.683.000	336.683.000	100%
3. Gedungan	311.438.430	311.438.430	100%
4. Gunggung	336.862.000	336.862.000	100%
5. Batuan	391.239.000	391.239.000	100%
6. Torbang	385.455.000	385.455.000	100%
7. Galugur	336.379.000	336.379.000	100%
Kecamatan Kangayan			
1. Saobi	516.413.000	516.413.000	100%
2. Kangayan	495.437.000	495.437.000	100%
3. Torjek	470.806.000	470.806.000	100%
4. Cangkramaan	338.471.000	338.471.000	100%
5. Tembayangan	313.322.000	313.322.000	100%
6. Batuputih	339.008.000	339.008.000	100%
7. Daandung	393.194.000	393.194.000	100%
8. Timur Jang-Jang	427.274.000	427.274.000	100%

Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Realisasi Penyaluran	Persentase Penyaluran
9. Jukong-Jukong	363.947.000	363.947.000	100%
Jumlah	**131.683.768.430**	**131.683.768.430**	**100%**

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang berikan kepada pemerintahan tingkat bawahnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD sebagai pelaksana program kegiatan.

1. Permasalahan dan upaya penyelesaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

   Permasalahan :

   - Cuaca masih menjadi kendala utama yang setiap tahun mengalami perubahan yang tidak menentu sehingga kurang mendukung kegiatan produksi garam;
   - Belum meratanya teknologi untuk produksi pada waktu musim kemarau basah;
   - Kualitas garam yang dihasilkan petambak masih sangat beragam;
   - Infrastruktur pendukung produksi garam yang masih kurang memadai;
   - Kesulitan modal bagi petambak garam maupun koperasi dalam penyerapan garam.

   Upaya Penyelesaian :

   - Dilakukannya Pelatihan Teknis Teknologi Tepat Guna berupa yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi di saat musim kemarau basah;
   - Perlu adanya lahan integrasi garam agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam;
   - Perlunya standarisasi harga garam dalam tata niaga garam;

- Dibentukya Koperasi-koperasi Garam yang berperan sebagai penyangga produksi garam rakyat;
- Pembangunan sarana pendukung produksi garam sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/petani garam;
- Perlu adanya kerjasama antara petambak, koperasi dan pemerintah setempat demi memajukan swasembada garam di Kabupaten Sumenep Khusunya dan Nasional pada umunya.

2. Permasalahan dan Upanya Penyelesaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

   Permasalahan :

   - Harga satuan yang tidak sama dengan harga satuan di daerah.

   Upanya Penyelesaian

   - Menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan fisik tetap sesuai target;
   - SPJ menyesuaikan dengan harga satuan di daerah.

BAB V
P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun. 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memiliki makna penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya. Serta capaian penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 yang meliputi kebijakan pemerintah kabupaten; kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah; penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang; penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Beberapa keberhasilan penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri, karena keberhasilan yang diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, serta Legislatif (DPRD) dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep

memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Sumenep yang telah mendukung dan tetap menjaga keamanan serta kerukunan sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, dan lancar.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka selebar - lebarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan masukan, saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan penyelenggaraan pembangunan di tahun berikutnya. Karena tantangan dan permasalahan yang terjadi selama tahun 2022, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus diperbaiki dan diselesaikan, sehingga dalam pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep dapat tercapai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumenep Sejahtera dan berkeadilan.

Demikian penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 ini, apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun berikutnya. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep, dan atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.